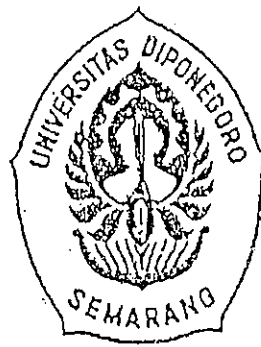


346.073  
Bud  
2 21



# ASPEK HUKUM CREDIT CARD SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN

## TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

Ambar Budhisulistyawati, S.H.

Nip : B. 4A. 000.007

Pembimbing :

Prof. Dr. Hj. Sri Redjeki Hartono, S.H.

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG

2003

UNDIP-PUSTAK-UNDIP

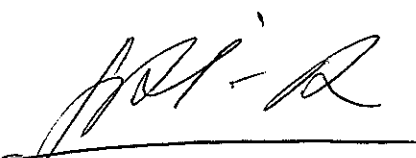
LPT-PUSTAK-UNDP
No. Datt: 2121/T/MH/121
Tgl. : 1. 01. 02


## ASPEK HUKUM CREDIT CARD SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN

Disusun Oleh :  
Ambar Budhisulistyawati, S.H.

Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal :

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing  
  
(Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H.)  
Nip. : 130 368 053

Mengetahui: Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum :  
  
(Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H.)  
Nip. : 130 350 519



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam atas segala Rachmad dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Tesis dengan judul : “ASPEK HUKUM CREDIT CARD SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN”, dibuat sebagai syarat penyelesaian studi pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum jurusan Hukum Ekonomi dan Teknologi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis sungguh menyadari bahwa penyelesaian tesis ini adalah karena dorongan bantuan dan budi baik dari berbagai pihak. Untuk itu sudah pada tempatnya jika pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Yth. Bapak Prof.Dr. Barda Nawawi Arief, SH selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
2. Yth. Ibu Prof.Dr. Sri Redjeki Hartono, SH selaku Pembimbing yang telah memberikan banyak masukan dan bimbingan sehingga terselesanya tesis ini.
3. Yth. Bapak Budiharto, SH.,MS., selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan bimbingan dalam tesis ini.
4. Yth. Bapak Paulus Hadisuprpto, SH.,MH. yang telah memberikan banyak masukan pada penulisan tesis ini.

5. Yth. Bapak Tulus, SH,SU. yang telah memberikan banyak masukan pada penulisan tesis ini.
6. Yth. Bapak Ibu di lingkungan Bank Indonesia, Bank Lippo, Bank Internasional Indonesia, dan Bank Bali.
7. Yth. Bapak Rektor Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
8. Yth. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
9. Rekan-rekan yang membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu kritik dan saran dari pembaca akan diterima dengan segala senang hati.

Semarang,

2003

Penulis

Ambar Budhisulistyawati, SH.

## ABSTRAK

Penggunaan *credit card* (kartu kredit) sebagai alat pembayaran banyak dipilih oleh sebagian besar masyarakat, karena *credit card* dapat berfungsi sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai yang lebih efektif, efisien, serta mampu memberikan berbagai kemudahan. *Credit card* (kartu kredit) sebagai alat pembayaran di Indonesia telah dikenal sejak beberapa tahun yang lalu, namun sampai saat ini belum ada peraturan hukum yang secara khusus mengaturnya, sehingga banyak permasalahan seputar *credit card* (kartu kredit) yang timbul, mengingat belum adanya peraturan-peraturan yang secara khusus mengaturnya, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang aspek Hukum *Credit Card* Sebagai Alat Pembayaran.

Permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah Operasionalisasi Pengaturan Perusahaan Penerbit *Credit Card*/ Bank Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia, Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Proses Penyelenggaraan *Credit Card* Sebagai Alat Pembayaran, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjanjian *Credit Card* Sebagai Alat Pembayaran.

Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada, penulis melakukan penelitian normatif guna memperoleh data dan informasi selengkap mungkin. Untuk memperoleh data sekunder, penulis mengadakan inventarisasi kepustakaan dalam penelitian hukum normatif, dan data sekunder ini ditunjang dengan data primer yang diperoleh dari lapangan, kemudian dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.

Berdasarkan data yang telah terkumpul dan telah dianalisis, maka dapat diketahui mengenai Operasionalisasi Pengaturan Perusahaan Penerbit *Credit Card* / Bank Sebagai Alat Pembayaran. Dari data yang ada, dapat dilakukan tinjauan secara yuridis dan didapat beberapa aspek hukum yang melingkupinya yaitu Aspek Hukum Perdata (diluar Kitab Undang-undang Hukum Perdata), Aspek Hukum Publik, dan Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan. Mengenai Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Proses Penyelenggaraan *Credit Card* Sebagai Alat Pembayaran, belaku Aspek Hukum Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) yaitu berlakunya ketentuan-ketentuan hukum perjanjian pada umumnya. Sedangkan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Proses Pelaksanaan Perjanjian *Credit Card*, untuk ini berlakulah beberapa aspek hukum yaitu Aspek Hukum Publik, dan Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, selain itu juga ada peraturan yang secara khusus dibuat para pihak dalam dokumen perjanjian.

## ABSTRACT

Ambar Budi Sulistyowati. **The Legal Aspects of Credit Card as a Medium of Payment.**

The use of *credit card* as a medium of payment is much preferred by community because it can be used as a medium of payment, which is more effective, more efficient, and able to provide lots of ease. The *credit card* used as a medium of payment has been well known since several years ago; yet, up to the present, there have not been any certain laws specifically used to regulate the existence of the *credit card*. As a result, there occur many problems around the existence of *credit card*. Based on the explanation above, the researcher was interested to conduct a research on the legal aspects of *credit card* as a medium of payment.

The problems discussed in this research were the execution of control toward companies/banks publishing the *credit card* as a medium of payment in Indonesia, the legal relations among parties involved in the process of administering the *credit card* as a medium of payment, and the law protection for the parties involved in an agreement of *credit card* as a medium of payment.

To find out answers for the mentioned problems, the researcher conducted normative research as to obtain possibly complete information and data. To obtain the secondary data, the researcher conducted library inventory toward normative law research, and the secondary data were supported with the primary data obtained from the field and analyzed with a qualitative data analysis method.

Based on the data collected and analyzed, the execution of control toward companies/banks publishing the *credit card* as a medium of payment has been identified. Based on the available data, the judicial review can be applied, and some legal aspects covering the *credit card* publication can be identified such as Civil Law Aspect (Out of Civil Code), Public Law Aspect, and Finance Company Law Aspect. In terms of the legal relations among the parties in the process of administering the *credit card* as a medium of payment, the civil law aspect has been applied (Civil Code), meaning that the legal aspects of agreement in general are in effect. Meanwhile, in order to give the law protection for the parties involved in the process of agreement implementation of the *credit card* as a medium of payment, the legal aspects applied are Public Law Aspect and Consumer Protection Law Aspect. Besides, there are some regulations specifically made by the parties in the agreement document.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAKSI .....	v
ABSTRACT .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
 BAB I      PENDAHULUAN .....	 1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kontribusi Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Kerangka Pemikiran .....	18
C. Sistematika Penulisan .....	33
 BAB II      TINJAUAN PUSTAKA ASPEK HUKUM <i>CREDIT CARD</i> SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN .....	  36
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Credit Card</i> Sebagai Alat Pem- bayaran .....	 36
1. Pengertian <i>Credit Card</i> . .....	36

a. Menurut Istilah .....	36
b. Menurut Peraturan Perundang-Undangan .....	38
c. Menurut Para Sarjana .....	40
2. Pihak Yang Terlibat Dalam Perjanjian <i>Credit Card</i>	
Sebagai Alat Pembayaran. ....	42
a. Pihak Penerbit <i>Credit Card</i> .....	42
b. Pihak Pemegang <i>Credit Card</i> .....	46
c. Pihak Penerima <i>Credit Card</i> .....	47
d. Pihak Perantara <i>Credit Card</i> .....	49
3. Sejarah Berlakunya <i>Credit Card</i> Sebagai Alat Pem-	
Bayaran .....	50
a. Secara Umum .....	50
b. Perkembangan <i>Credit Card</i> di Indonesia .....	55
4. Tujuan Diadakannya <i>Credit Card</i> Sebagai Alat Pem-	
Bayaran .....	57
5. Manfaat <i>Credit Card</i> Sebagai Alat Pembayaran .....	58
a. Bagi Pihak Penerbit <i>Credit Card</i> .....	58.
b. Bagi Pihak Pemegang <i>Credit Card</i> .....	59
c. Bagi Pihak Penerima <i>Credit Card</i> .....	60
B. Mekanisme Berlakunya <i>Credit Card</i> Sebagai Alat Pem-	
bayaran Di Indonesia .....	61



1. Landasan Hukum/Dasar Hukum Berlakunya <i>Credit Card</i> Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia .....	61
a. Perjanjian Para Pihak Sebagai Dasar Hukum .....	61
b. Perundang-undangan Sebagai Dasar Hukum .....	63
2. Jenis/macam <i>Credit Card</i> Sebagai Alat Pembayaran Yang Berlaku di Indonesia .....	65
a. Berdasar jenis kartu yang beredar di Indonesia ....	66
b. Berdasar tipenya .....	67
c. Berdasar kriterianya. ....	68
d. Lain-lain .....	72
e. Jenis kartu yang dikeluarkan bank .....	74
3. Bentuk Formal <i>Credit Card</i> Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia .....	78
4. Syarat Penerbitan <i>Credit Card</i> Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia .....	81
a. Syarat untuk Penerbit <i>Credit Card</i> .....	82
b. Syarat untuk Pemegang <i>Credit Card</i> .....	84
c. Syarat untuk Penerima <i>Credit Card</i> .....	88
5. Tata Cara Penggunaan <i>Credit Card</i> Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia .....	90
a. Transaksi Pembayaran dengan <i>Credit Card</i> .....	90

b. Cara membayar .....	94
c. Otorisasi .....	97
C. Perjanjian <i>Credit Card</i> Sebagai Alat Pembayaran .....	99
1. Perjanjian Pada Umumnya .....	99
a. Pengertian Perjanjian .....	99
b. Syarat Sahnya Perjanjian .....	104
c. Akibat Hukum Perjanjian Yang Sah .....	111
d. Asas Hukum Perjanjian .....	116
e. Pelaksanaan Perjanjian .....	132
f. Wanprestasi .....	134
2. Perjanjian Jaminan .....	137
3. Perjanjian Baku .....	139
4. Perjanjian <i>Credit Card</i> Pada Khususnya .....	144
a. Perjanjian Penerbitan <i>Credit Card</i> .....	144
b. Perjanjian Penggunaan <i>Credit Card</i> .....	146
5. Karakteristik Yuridis Dari <i>Credit Card</i> .....	148
a. Perjanjian Tentang <i>Credit Card</i> .....	148
b. <i>Credit Card</i> Sebagai Alat Bayar (alat tukar pengganti uang) .....	151
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	153
A. Hasil Penelitian .....	153

1. Operasionalisasi Pengaturan Perusahaan Penerbit <i>Credit Card</i> /Bank Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia .....	153
1.a. <u>Kegiatan Operasionalisasi Penerbitan <i>Credit Card</i></u> <u>(Kartu Kredit)</u> .....	154
1.a.1. Kegiatan Awal Pra Penerbitan <i>Credit Card</i> (Kartu Kredit) .....	154
1.a.1.a. Pemasaran .....	154
1.a.1.b. Pencantuman Syarat - syarat Per- mohonan Pembuatan <i>Credit Card</i> (Kartu Kredit) .....	155
- Syarat Umum .....	155
- Syarat Khusus .....	158
- Syarat Kelayakan Kredit .....	158
1.a.1.c. Pelayanan Terhadap Pemegang Kartu dan Pedagang .....	162
- Pelayanan Umum .....	162
- Pelayanan Pemberian Kredit .....	163
- Pelayanan Pengolahan Kartu. ....	165
1.a.2. Kegiatan Penerbitan <i>Credit Card</i> (Kartu Kredit). ....	167
1.a.2.a. Persetujuan Penerbitan Kartu Kredit. .	167

1.a.2.b. Keputusan .....	183
1.a.3. Kegiatan Pemberian <i>Credit Card</i> (Kartu Kredit) .....	186
1.b. Mekanisme Pelaksanaan Transaksi <i>Credit Card</i> (Kartu Kredit) .....	187
- Prosedur Pembayaran <i>Credit Card</i> (Kartu Kredit) .....	187
1.c. Bentuk Perjanjian <i>Credit Card</i> (Kartu Kredit) Sebagai Alat Pembayaran .....	191
1.c.1. Perjanjian Penggunaan <i>Credit Card</i> (Kartu Kredit), .....	191
1.c.2. Perjanjian Usahawan <i>Visa/MasterCard</i> . ....	193
2. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Proses Pe- nyelenggaraan <i>Credit Card</i> Sebagai Alat Pembayar- an. ....	194
2.a. Hubungan Hukum Antara Pihak Penerbit <i>Credit Card</i> (Kartu Kredit) Dengan Calon Pemegang <i>Credit Card</i> (Kartu Kredit) .....	194
2.a.1. Unsur-unsur Perkreditan .....	195
2.a.2. Syarat-syarat Perkreditan .....	198
a. Syarat umum .....	199
b. Syarat khusus .....	200
c. Syarat kelayakan kredit .....	203

d. Syarat persetujuan Perjanjian kredit .....	209
e. Syarat administrasi .....	213
2.a.3. Hak dan Kewajiban Penerbit Kartu Kredit dan Pemegang Kartu Kredit .....	214
2.b. Hubungan Hukum Antara Pihak Penerbit <i>Credit Card</i> (Kartu Kredit) Dengan <i>Merchant</i> (Penjual/Pengusaha Dagang) .....	218
- Hak dan Kewajiban Pihak Penerbit Kartu Kredit dan <i>Merchant</i> .....	220
2.c. Hubungan Hukum Antara Pemegang <i>Credit Card</i> (Kartu Kredit) Dengan <i>Merchant</i> . ....	225.
2.d. Wanprestasi Dalam Hubungan Hukum Para Pihak Yang Terkait Dalam Transaksi <i>Credit Card</i> (Kartu Kredit) Sebagai Alat Pembayaran .....	230
3. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Proses Pelak- sanaan Perjanjian <i>Credit Card</i> (Kartu Kredit) .....	233
- Modus Operandi Kejahatan <i>Credit Card</i> (Kartu Kredit)...	233
B. PEMBAHASAN .....	240
1. Operasionalisasi Pengaturan Perusahaan Penerbit <i>Credit</i> <i>Card</i> /Bank Sebagai Alat Pembayaran .....	240
1.a. Perusahaan Penerbit <i>Credit Card</i> /Bank Dalam Pelaksana	

an Penerbitan <i>Credit Card</i> Sebagai Alat Pembayaran .....	241
1.a.1. Aspek Hukum Perusahaan Penerbit <i>Credit Card</i> /Bank .....	241
1.a.1.a. Perusahaan <i>Credit Card</i> /Bank .....	242
- Pengertian Bank .....	242
- Jenis Bank .....	244
- Bentuk Bank .....	244
- Usaha Bank .....	245
1.a.1.b. Aspek Hukum Perusahaan Penerbit <i>Credit Card</i> (Kartu Kredit). ....	249
- Aspek Hukum Perdata (diluar KUH Perdata) .....	249
- Aspek Hukum Publik .....	250
- Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan .....	251
1.a.2. Aspek Hukum Kegiatan Operasionalisasi Penerbitan <i>Credit Card</i> (Kartu Kredit) .....	255
1.a.2.a. Aspek Hukum Administrasi Negara .....	255
1.a.2.b. Aspek Hukum Perdata (KUH Perdata) .....	256
1.h. Bentuk Perjanjian <i>Credit Card</i> (Kartu Kredit) Sebagai Alat Pembayaran) .....	258
- Aspek Hukum Perdata (KUH Perdata) .....	258
2. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Proses Penyelenggaraan <i>Credit Card</i> Sebagai Alat Pembayaran .....	264

- Aspek Hukum Perdata (KUH Perdata) .....	264
2.a. Hubungan Hukum Antara Pihak Penerbit <i>Credit Card</i>	
Dengan Calon Pemegang <i>Credit Card</i> .....	264
2.a.1. Asas Kebebasan Berkontrak .....	265
2.a.2. Syarat Sahnya Perjanjian .....	267
2.a.3. Perjanjian Pinjam Pakai Habis .....	273
2.a.4. Penyelesaian Masalah Wanprestasi .....	275
2.a.5. Jaminan Dalam Penerbitan <i>Credit Card</i> .....	278
2.a.6. Bentuk Perjanjian .....	281
2.b. Hubungan Hukum Antara Pihak Penerbit <i>Credit Card</i>	
Dengan <i>Merchant</i> .....	281
2.b.1. Jenis Perjanjian .....	282
2.b.1.a. Perjanjian Kerjasama .....	282
2.b.1.b. Perjanjian Jual Beli Segitiga .....	285
2.b.2. Bentuk Perjanjian .....	287
2.b.3. Syarat Sahnya Perjanjian .....	288
2.b.4. Perjanjian Pihak Ketiga .....	291
2.b.5. Subrogasi .....	292
2.c. Hubungan Hukum Antara Pemegang <i>Credit Card</i>	
(Kartu Kredit) Dengan <i>Merchant</i> .....	293
- Hubungan Hukum Perjanjian Jual Beli .....	293

3. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Proses	
Pelaksanaan Perjanjian <i>Credit Card</i> (Kartu Kredit) .....	296
3.a. Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) .....	298
3.b. Perlindungan Terhadap Pihak Pemegang Kartu dan	
<i>Merchant</i> .....	298
3.b.1. Perlindungan Terhadap Pemegang Kartu .....	299
3.b.2. Perlindungan Terhadap <i>Merchant</i> .....	299
3.c. Ancaman Pidana Bagi Pemalsu <i>Credit Card</i> (kartu	
Kredit) .....	299
- Aspek Hukum Pidana. ....	299
3.c.1. Ancaman Pidana Pemalsu <i>Credit Card</i> (Kartu	
Kredit) .....	299
3.c.2. Ukuran Tanggung Jawab Pemalsu <i>Credit Card</i>	
(kartu Kredit) .....	300
3.d. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8	
Tahun 1994 Tentang Perlindungan Konsumen) .....	302
- Aspek Hukum Perlindungan Konsumen. ....	302
3.e. Ketentuan-ketentuan Pengaturan Perlindungan Kon-	
sumen Kartu Kredit .....	307



BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....	309
DAFTAR PUSTAKA .....	313
LAMPIRAN.	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Pembangunan perekonomian Indonesia saat ini semakin maju ✓  
menunjukkan kearah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional  
dan internasional dalam menyongsong diberlakukannya sistem pasar  
bebas. Tetapi ironisnya pembangunan ekonomi tersebut tidak selalu ✓  
langsung diikuti oleh pembangunan hukum (dalam hal pembaharuan  
hukum) yang menunjang dan mengatur perekonomian tersebut.  
Keadaan ini terjadi sebagai akibat tidak dilakukannya secara serentak  
antara pembangunan perekonomian dan pembaharuan hukum.

Hal tersebut diatas antara lain dapat terlihat secara nyata dari  
perkembangan yang pesat di bidang *credit card* (kartu kredit) sebagai  
alat pembayaran. Penggunaan *credit card* (kartu kredit) di Indonesia  
telah dikenal sejak beberapa tahun lalu, namun pengaturan secara  
khusus yang mengatur mengenai *credit card* (kartu kredit) di Indonesia  
sampai sekarang belum ada. Terutama dalam hal hubungan hukum  
dari para pihak yang terkait dalam penggunaannya serta perlindungan  
hukumnya.

Pengertian *credit card* (kartu kredit menurut Muhammad

Djumhana adalah <sup>1)</sup>

“Kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Para pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit adalah pemegang kartu (*cardholder*), penerima pembayaran dengan kartu (*merchant*) dan penerbit (*issuer*). Pemegang kartu adalah pihak yang telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan oleh penerbit sehingga berhak memegang dan menggunakan kartu tersebut. Adapun penerima pembayaran dengan kartu, biasanya pemilik tempat pembelanjaan dan hiburan, seperti pasar swalayan, toko, hotel, restoran dan perusahaan jasa lainnya. Sedangkan pihak penerbit dapat berupa perusahaan khusus, dapat juga bank”

Uang kartal atau uang tunai adalah uang kertas dan uang logam yang diterbitkan oleh pemerintah dan atau Bank Central dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Karena uang kartal merupakan alat pembayaran yang sah, maka secara hukum seorang penjual barang wajib menerima dan tidak boleh menolak apabila dibayar dengan uang tunai atau uang kartal tersebut. Akan tetapi didalam perkembangannya persetujuan kedua belah pihak antara si pembayar dan si penerima bisa saja pembayaran dengan uang tunai dirubah menjadi pembayaran dengan pembayaran lain. Hal ini dapat terjadi bila pembayaran meliputi jumlah besar sehingga pembayaran dengan uang tunai dirasakan kurang aman, tidak praktis dan merepotkan.

---

<sup>1)</sup>Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1933, hal 1932.

Dalam lalu lintas pembayaran modern, alat pembayaran yang digunakan sangat bervariasi selain digunakan uang tunai, dapat juga digunakan pembayaran lain seperti *cheque*, *bilyet giro*, *travellers cheque*, *inkasso*, *letter of credit* dan *credit card*<sup>2)</sup>

Sebagai alat pembayaran, kartu kredit dinilai lebih praktis dan aman dibandingkan dengan uang tunai. Praktis artinya dalam setiap transaksi, para pihak tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran, melainkan cukup dengan memberikan kartu kredit saja. Aman artinya tidak setiap orang yang berhak dapat menggunakan kartu kredit itu, karena pembayaran dengan kartu kredit memerlukan cara-cara tertentu.

Karena banyaknya kartu kredit yang beredar, maka banyak pula dari perusahaan atau bank yang mengeluarkan kartu kredit saling bersaing agar memperoleh anggota yang lebih luas. Dalam menggunakan persaingannya tersebut tiap-tiap bank atau perusahaan memberikan service atau pelayanan yang berbeda-beda, misalnya memberikan ganti rugi atau asuransi jika kartu kreditnya hilang atau ingin menjadi anggota tanpa memberikan uang pemasukan lebih dahulu.

---

<sup>2)</sup> Thonias Suyatno dkk., *Lalu Lintas Pembayaran Dalam dan Luar Negeri*, Jilid I, Intermedia, Jakarta, 1988, hal.9

Didalam bekerjanya/penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran, menurut Millet J, secara serempak bekerja tiga perjanjian yang satu sama lain saling terpisah, yaitu :<sup>3)</sup>

1. Perjanjian penjualan barang dan/atau jasa antara pedagang dan pemegang jasa antara pedagang dan pemegang kartu.
2. Perjanjian antara pedagang dan perusahaan penerbit kartu, yang berdasarkan perjanjian itu pedagang yang bersangkutan setuju untuk menerima pembayaran yang menggunakan kartu itu.
3. Perjanjian antara penerbit kartu dan pemegang kartu, atau pemegang rekening, yang berdasarkan perjanjian itu pemegang kartu menyetujui untuk melunasi pembayaran yang telah dilakukan oleh penerbit kartu kepada penjual barang dan/atau jasa berkenaan dengan penggunaan kartu oleh pemegang kartu yang bersangkutan.

Dengan demikian, didalam *credit card* (kartu kredit) ada beberapa pihak yang terlibat dalam hubungan hukum yaitu pihak penerbit (*issuer*), pihak pemegang kartu (*card holder*), dan pihak penjual

---

<sup>3)</sup> Mullet J (dalam Remy Sjahdeini), *Reformasi Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Volume 2/1997, hal.57

barang atau jasa (*merchant*), serta kadang-kadang ada pihak perantara (*Acquirer*).

Usaha *credit card* (kartu kredit) di Indonesia masuk dalam kegiatan perusahaan pembiayaan. Menurut Sri Redjeki Hartono.

"Perusahaan pembiayaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di dalam bidang usaha pembiayaan, yang meliputi perusahaan-perusahaan yang bergerak pada usaha-usaha :

- Sewa Guna Usaha
- Modal Ventura
- Perdagangan Surat Berharga
- Anjak Piutang
- Usaha Kartu Kredit
- Pembiayaan Konsumen."<sup>4)</sup>

Lembaga Pembiayaan dan perusahaan-perusahaan Pembiayaan di Indonesia diatur secara khusus, baik mengenai keberadaannya dan tata cara pendirian perusahaan, dimulai dengan Surat Keputusan Presiden RI. Nomor 61 tahun 1988, tentang Lembaga Pembiayaan dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan<sup>5)</sup>

Usaha Pembiayaan ini, pada khususnya usaha *credit card* (kartu kredit) juga dilakukan oleh lembaga keuangan Bank, dan hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Pasal 6 huruf 1 tentang Usaha

---

<sup>4)</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hal.122.

<sup>5)</sup> Ibid, hal 123.

Bank Umum jo Undang-Undang N0. 10 Tahun 1998).

Secara umum, hubungan hukum diantara para pihak yang mengadakan transaksi “produk-produk” perusahaan pembiayaan adalah dibawah naungan asas-asas Hukum Perjanjian. Sebagai dasar terikatnya para pihak, dalam hal ini hukum perjanjian secara umum dapat dikatakan relatif cukup. Masalahnya menjadi lain, mengingat setiap jenis usaha pembiayaan pada dasarnya mempunyai karakteristik sendiri. Secara teknis masing-masing mempunyai dan menuntut syarat-syarat dan kondisi yang sangat khas sesuai dengan karakteristik setiap jenis usaha kegiatan pembiayaan yang bersangkutan. Mengingat sistem perundangan yang berlaku di Indonesia sampai sekarang belum ada/belum mengaturnya, maka perlu dipikirkan dan dicari jalan keluar guna mengisi kekosongan tersebut (dalam arti menyediakan perangkat hukum para pihak). Hal ini perlu dan patut dipikirkan, termasuk perlu dikaji lebih mendalam, dalam rangka mengisi dan memberikan warna bagi pembentukan Hukum Perdata Nasional Indonesia yang akan datang.<sup>6)</sup>

Permasalahan hukum bagi keberadaan kartu kredit yang lain adalah lemahnya posisi hukum bagi pihak pemegang kartu kredit (*card holder*) sebagai konsumen dari suatu produk jasa yang ditawarkan

---

<sup>6)</sup> Ibid, hal.124

oleh bank/penerbit (*issuer*), mengalami rentanisasi terhadap perjanjian baku yang disepakati demikian juga bagi pihak-pihak lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, masalah perlindungan konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk dicari solusinya, terutama di Indonesia mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.<sup>7)</sup>

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seputar *credit card* (kartu kredit) sebagai alat pembayaran, maka perlu dikaji aspek hukum *credit card* (kartu kredit) sebagai Alat Pembayaran sehubungan dengan

---

<sup>7)</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 78



belum adanya peraturan perundangan yang secara khusus mengatur mengenai masalah *credit card* sebagai alat pembayaran di Indonesia.

#### B. Permasalahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Operasionalisasi pengaturan Perusahaan Penerbit *credit card* (kartu kredit) sebagai alat pembayaran di Indonesia ?
2. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam proses penyelenggaraan *credit card* (kartu kredit) sebagai alat pembayaran ?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian *credit card* (kartu kredit) sebagai alat pembayaran ?

#### C. Tujuan Penelitian.

Bertitik tolak pada permasalahan-permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Bagaimana Operasionalisasi pengaturan Perusahaan Penerbit *credit card* (kartu kredit) sebagai alat pembayaran di Indonesia ?
2. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam proses penyelenggaraan *credit card* (kartu kredit) sebagai alat pembayaran ?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian *credit card* (kartu kredit) sebagai alat pembayaran ?

3. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian *credit card* (kartu kredit) sebagai alat pembayaran ?

#### D. Kontribusi Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

##### 1. Kontribusi Teoritis

- Menambah perbendaharaan kepustakaan mengenai *credit card* (kartu kredit) sebagai alat pembayaran.
- Sebagai bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai *credit card* (kartu kredit) sebagai alat pembayaran.
- Berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai *credit card* (kartu kredit) sebagai alat pembayaran.

##### 2. Kontribusi Praktis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berupa bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan (pembuat atau policy) yang dipakai dalam penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan maupun penyempurnaan peraturan dan kebijakan-kebijakan mengenai *credit card* (kartu kredit) sebagai alat pembayaran.

- Bagi para pelaku yang terkait dalam transaksi *credit card* (kartu kredit), sebagai alat pembayaran hasil penelitian ini diharapkan memberikan alternatif masukan (input) dalam pembuatan perjanjian *credit card* (kartu kredit) sebagai alat pembayaran.

## E. Metode Penelitian.

### 1. Objek Penelitian.

Didalam penelitian ini, obyek atau fokus yang diteliti adalah mengenai operasionalisasi pengaturan Perusahaan Penerbit *credit card* sebagai alat pembayaran di Indonesia, hubungan hukum atau pertanggung jawaban para pihak dalam perjanjian *credit card* sebagai alat pembayaran, serta perlindungan hukum bagi konsumen yang terlibat dalam perjanjian *credit card* sebagai alat pembayaran.

### 2. Metode Pendekatan.

Pendekatan terhadap permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian hukum empiris.<sup>8)</sup>

Pendekatan yuridis normatif (*legal research*), yaitu pendekatan terhadap peristiwa hukum dengan menggunakan pisau analisis berupa

---

<sup>8)</sup> CFE. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-21*, Alumnus Bandung, 1994, hal. 142.

asas-asas yang terkandung dalam peraturan hukum tertentu. Sebagai penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini dilakukan melalui tahapan penelitian sebagai berikut :<sup>9)</sup>

- Tahap pertama adalah melakukan inventarisasi norma-norma hukum tidak tertulis dan norma-norma hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan *credit card* sebagai alat pembayaran.
- Tahap kedua, melakukan penelitian terhadap norma-norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang telah diinventarisir tersebut guna menemukan aspek-aspek hukum *credit card* sebagai alat pembayaran.
- Tahap ketiga, adalah usaha untuk menemukan hukum *in concreto* yaitu norma hukum yang bisa diterapkan didalam *credit card* sebagai alat pembayaran.

Disamping itu, untuk menunjang akurasi data dan mencari kejelasan mengenai apa yang terkandung didalam aspek hukum *credit card* (kartu kredit) sebagai alat pembayaran, dilakukan pula penelitian empiris.

Metode pendekatan empiris ini bersifat kualitatif, karena data yang dihasilkan dalam penelitian adalah data deskriptif berupa kata-kata

---

<sup>9)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal.12-32

tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>10)</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data.

#### a. Jenis Data.

Jenis data yang dibutuhkan meliputi data sekunder dan data primer sebagai penunjang. Data sekunder yang dipergunakan adalah data sekunder di bidang hukum meliputi :<sup>11)</sup>

##### a.). Bahan Hukum Primer, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
4. Keputusan Presiden No.61 Tahun 1980 tentang Lembaga Pembiayaan.
5. Keputusan Menteri Keuangan No.125/KMK-013/1988 tentang Ketentuan dan Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden No.61 Tahun 1988
6. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

##### b). Bahan Hukum Sekunder :

---

<sup>10)</sup> Bogman dan Taylor, seperti dikutip Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV Remaja Karya, Bandung, 2000, hal.3, lihat juga Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.

<sup>11)</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hal.14.

1. Buku-buku literatur mengenai Hukum dan ekonomi yang berkaitan dengan *credit card*.
  2. Hasil penelitian hukum, tesis dan disertasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
  3. Berbagai jurnal, makalah/bahan penataran maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian.
- c). Bahan Hukum Tertier, yaitu kamus, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, yang dimaksudkan sebagai pendukung dalam mengkaji data sekunder, diperoleh melalui penelitian lapangan. Data primer diharapkan diperoleh dari nara sumber dan responden yang diarahkan kepada atau pandangan para akademisi di bidang *credit card* (kartu kredit).

#### b. Sumber Data.

Untuk memperoleh data tersebut diatas ditentukan sumber data sebagai berikut :

1. Bank Indonesia. ✓
2. Pihak-pihak yang terkait dengan *credit card*. ✓

#### 4. Lokasi Penelitian/Penentuan Sampel.

Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua obyek atau semua gejala atau semua individu atau semua kejadian atau semua unit tersebut, untuk dapat memberikan gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel.<sup>12)</sup>

Agar suatu penelitian dapat berhasil sesuai dengan tujuan, maka diperlukan penentuan sampel dengan cara teknik penarikan sampel yang benar, karena penarikan sampel yang tidak representatif (tidak mewakili sifat populasi) dapat mengakibatkan generalisasi yang keliru.<sup>13)</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan penarikan sampel secara *non Random Sampling* terutama *purposive sampling* sehingga dengan demikian tidak semua dalam populasi dapat menjadi sampel, akan tetapi diambil unsur yang mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu saja yang merupakan ciri-ciri utama populasi dan merupakan unsur yang paling banyak mengandung ciri-ciri populasi.<sup>14)</sup>

Untuk menunjang penelitian ini, maka sampel yang dipilih adalah :

---

<sup>12)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal.44.

<sup>13)</sup> Hanari Nawawi, *Metodologi Penelitian Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1987, hal.151.

<sup>14)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hal.51

- a. Bank Indonesia Cabang Surakarta
- b. Beberapa Bank yang menerbitkan *credit card* (Bank Internasional Indonesia, PT. Bank Bali Tbk, PT. Bank Lippo Tbk., PT. Bank BNI 1946 (Persero) Tbk
- c. Beberapa tempat usaha yang menerima pembayaran dengan *credit card*.
- d. Beberapa nasabah pemegang *credit card*.

## 5. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data yang relevan guna menjawab permasalahan seperti telah disebutkan di atas, di samping dipelajari berbagai literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian, maka dilakukan pula penelitian lapangan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Oleh karena itu pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Studi dokumen dan studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa :
  - Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari undang-undang. Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya berdasarkan hirarkis perundang-undangan,



bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan selama menyangkut dengan penelitian ini.

- Bahan hukum sekunder, yaitu penjelasan menjelaskan mengenai bahan-bahan hukum primer, yaitu Rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.
- Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, yang dapat mendukung menjelaskan dan melengkapi bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Penelitian Lapangan.

Untuk menunjang data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen/kepuustakaan sebagaimana dikemukakan di atas. Data lapangan dikumpulkan dengan menggunakan alat penelitian wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang difokuskan

*(focused interview).<sup>15)</sup>*

Didalam penelitian ini wawancara akan dilakukan terhadap sumber informasi yang mempunyai pengalaman tertentu atau terlibat langsung pada obyek tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

---

<sup>15)</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, Op.cit., hal.60.

## 6. Teknik Analisis Data.

Data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen/kepuustakaan dan data primer yang diperoleh dari lapangan, dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.

### Metode Pengecekan Validasi Data.

Pengecekan data yang dilakukan dengan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.<sup>16)</sup> dengan cara :

- a. membandingkan data hasil penelitian kuesioner dengan hasil wawancara.
- b. membandingkan apa yang dikatakan didepan umum dan secara pribadi.
- c. membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu.
- d. membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
- e. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

---

<sup>16)</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, 1997, hal.178.

## F. Kerangka Pemikiran.

Dalam rangka penelitian untuk penulisan tesis ini, arah dari penelitian dimulai dari pembahasan tentang sejarah alat pembayaran di Indonesia yang berkembang ke arah pembayaran dengan *credit card* (kartu kredit). Berdasarkan sejarah alat pembayaran, bentuk transaksi yang paling tua adalah bentuk tukar menukar atau barter. Barter ini sudah ada sejak zaman dulu, karena bentuk barter sebagai alat pembayaran merupakan transaksi yang paling sederhana (*simpel*) untuk dilakukan, karena tanpa perlu suatu alat bayar apapun. Kemudian lama kelamaan manusia semakin maju sehingga sistem barter dianggap tidak praktis lagi, dan muncullah suatu alat bayar yang bisa memenuhi kebutuhan manusia dimanapun yaitu alat bayar dalam bentuk uang. Dari sini mulailah berkembang dengan apa yang dinamakan transaksi jual beli.

Lama kelamaan uangpun tidak menjamin keamanan pemegangnya. Selain tidak praktis, uang juga sering menimbulkan resiko bagi pemegangnya (*hilang, dirampok, dan sebagainya*). Maka kemudian berkembang bentuk alat bayar lain yaitu misalnya cek. Cekpun pada akhirnya masih dirasakan tidak cukup *comfortable*, bagi pemegang maupun penerimanya.

Karena itu, kemudian berkembanglah alat bayar lain yang berbentuk kartu plastik, yang secara populer disebut kartu kredit. Walaupun eksistensi kartu kredit tidak dimaksudkan untuk menghapus total sistem pembayaran dengan menggunakan uang cash ataupun cek, tetapi terutama untuk kegiatan pembayaran yang *day to day* dengan jumlah pembayaran tingkat menengah, maka keberadaan kartu kredit sesungguhnya dapat menggeser peranan uang cash ataupun cek. Untuk pembayaran yang bukan tingkat menengah, memang menggunakan kartu kredit masih belum populer. Karena, untuk transaksi kecil, orang cenderung menggunakan uang cash, sementara transaksi yang besar, pilihannya jatuh pada alat bayar cek ataupun surat-surat berharga lainnya.<sup>17)</sup>

Usaha *credit card* (kartu kredit) ini di Indonesia masuk ke dalam usaha pembiayaan, yang oleh pemerintah usaha ini diatur dalam Keppres No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Pasal 2 ayat 1 dari Keppres No.61 ini antara lain menyebutkan bahwa salah satu kegiatan dari Lembaga Pembiayaan adalah melakukan usaha kartu kredit. Sementara dalam Pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Kartu Kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam rangka pembelian barang/jasa dengan mempergunakan kartu kredit.

---

<sup>17)</sup> Munir Fuady, *Hal Tentang Pembiayaan*, Op.cit. hal.172.

Selain Keppres tersebut diatas, pemerintah juga mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Menurut pasal 3 Keppres No. 61 Tahun 1988, yang dapat melakukan kegiatan lembaga pembiayaan, termasuk kegiatan *credit card* (kartu kredit) adalah :

1. Bank.
2. Lembaga Keuangan Bukan Bank (sekarang sudah tidak ada lagi dalam sistem hukum keuangan kita).
3. Perusahaan pembiayaan.<sup>16)</sup>

Sejauh yang berhubungan dengan perbankan, maka kegiatan yang berkenaan dengan kartu kredit mendapat legitimasinya dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Pasal 6 huruf I Jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998., dengan tegas menyatakan bahwa salah satu kegiatan bank adalah melaksanakan usaha kartu kredit.

Semua peraturan tersebut diatas hanyalah mengatur tentang tata cara penyelenggaraan *credit card* (kartu kredit) dan sampai sekarang di Indonesia belum ada peraturan yang secara khusus mengatur *credit card* (kartu kredit), sehingga untuk mengisi kekosongan hukum, hukum

---

<sup>16)</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal.228.

lama masih diberlakukan (Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945).

Karena perkembangan kartu kredit masih terbilang relatif baru dibandingkan dengan alat bayar lainnya, seperti uang cash, cek dan sebagainya, maka tentang berlakunya kartu kredit tidak ditemukan dasar hukum yang tegas dalam Kitab Undang-Undang. Karenanya, baik KUH Dagang maupun KUH Perdata tidak menyebut istilah Kartu Kredit ini.

Karena itu, yang menjadi dasar hukum atas legalisasi pelaksanaan kegiatan kartu kredit di Indonesia, khususnya yang mengatur hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam perjanjian *credit card* (kartu kredit) sebagai alat pembayaran, bisa dipakai KUH Perdata (Buku III tentang Perikatan).

Sebagaimana diketahui, bahwa sistem hukum kita menganut asas kebebasan berkontrak (vide Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata). Pasal 1338 ayat 1 tersebut menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (asas kekuatan mengikat). Dengan berlandaskan kepada pasal 1338 ayat 1 ini, maka asal saja dibuat secara tidak bertentangan dengan hukum atau kebiasaan yang berlaku, maka setiap perjanjian (lisan maupun

tertulis) yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit, akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut.<sup>19)</sup>

Dengan demikian pula, tentunya pasal-pasal tentang perikatan dalam buku ketiga berlaku terhadap perjanjian-perjanjian yang berkenaan dengan kartu kredit secara *mutatis mutandis*.

Aspek lain dari penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran yang juga cukup penting jika ditinjau dari segi hukum adalah aspek perlindungan konsumen. Untuk melindungi konsumen dalam hal ini Undang-Undang No.8 Tahun 1999. Juga perlu dibahas.

Didalam praktek penggunaan *credit card* (kartu kredit) sebagai alat pembayaran, selain menguntungkan dan juga *prestise* dari *cardholder*, banyak permasalahan-permasalahan yang timbul yang bisa mengakibatkan kerugian-kerugian bagi *cardholder* sendiri. Permasalahan-permasalahan ini akan diselesaikan sesuai dengan peraturan permasalahan yang bersangkutan misalnya mengenai pemalsuan kartu kredit maka penyelesaiannya akan mengacu pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

---

<sup>19)</sup> Munir Fuady, *ibid*, hal.227.

### Mekanisme pelayanan *credit card* (kartu kredit)

Mekanisme pelayanan *credit card* (kartu kredit) pada umumnya melibatkan beberapa pihak yaitu *Issuer Bank*, *Merchant* dan *Card Holder*.

1. *Issuer Bank* atau Bank penerbit atau disebut juga sebagai pihak kreditur, menerbitkan *credit card* untuk seorang *card holder* setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan *issuer bank* seperti misal bonafiditas, serta *card holder* telah menyetujui perjanjian-perjanjian yang berlaku dalam pemakaian. Pada saat itu *issuer bank* akan memungut *joining fee* (uang pangkal) dari *card holder* dan kemudian setiap tahun memungut lagi *annual fee* (tahunan).
2. *Card holder* melakukan transaksi pembelian barang maupun jasa pada *merchant* dengan menunjukkan *credit card*nya dan selanjutnya cukup menandatangani *bill* atau faktur pembelian tentunya sebelum *card holder* diminta untuk menandatangani *bill* tersebut pihak *merchant* akan memeriksa secara seksama keaslian dari *credit card* yang bersangkutan.
3. *Merchant* akan menyerahkan *bill* yang sudah ditandatangani *card holder* kepada *issuer bank*, untuk menagih pembayaran atau transaksi



penjualan tersebut selanjutnya bank penerbit akan membayar sejumlah nilai transaksi setelah dikurangi dengan *discount rate* untuk keuntungan bank.

4. Setelah tenggang waktu tertentu atau tanggal jatuh tempo seperti yang telah dituangkan dalam surat perjanjian (misalnya 20 hari dari pembayaran kepada *merchant*), bank penerbit akan menagih kepada *card holder* sejumlah nilai transaksi.<sup>20)</sup>

Dari mekanisme tersebut di atas terlihat bahwa hubungan antara para pihak (*issuer bank*, *merchant* dan *card holder*) dasarnya adalah “perjanjian” yang masing-masing saling terpisah yaitu ;

- (1) perjanjian antara perusahaan penerbit kartu (*Issuer Bank*) dan pemegang kartu (*Card holder*),
- (2) perjanjian penjualan barang/jasa antara pedagang (*merchant*) dan pemegang kartu (*Card holder*),
- (3) perjanjian antara pedagang (*Merchant*) dan perusahaan penerbit kartu (*Issuer Bank*).

Dengan memperlihatkan hubungan hukum antara para pihak diatas, tampak bahwa hukum yang berlaku yang mengatur masalah kartu kredit adalah hukum kebebasan berkontrak antara para pihak berlandaskan Pasal 1338 KUH Perdata. Dikatakan demikian oleh

---

<sup>20)</sup> Achmad Ruslan & Nyoman Suastini, op cit, hal 32.

karena belum ada pengaturan yang khusus yang mengatur masalah kartu kredit (*credit card*) di Indonesia dan tentunya pula pasal-pasal tentang perikatan dalam buku ketiga terhadap perjanjian-perjanjian yang berkenaan dengan kartu kredit, secara *mutatis mutandis*.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, prinsip kebebasan berkontrak ini muncul bersamaan dengan lahirnya paham ekonomi klasik yang mengagungkan *laissez faire* atau persaingan bebas. Keduanya saling mendukung dan berakar dari paham hukum alam. Kedua paham ini berpendapat bahwa individu pada umumnya mengetahui kepentingan mereka yang paling baik dan cara mencapainya. Kemampuan tersebut diperoleh karena manusia mempergunakan akalanya oleh karenanya menurut hukum alam individu-individu berhasil mencapai kesejahteraan, maka masyarakat yang merupakan kumpulan dari individu-individu tersebut akan sejahtera pula. Dalam mencapai kesejahteraannya, individu harus mempunyai kebebasan untuk bersaing dan negara tidak boleh campur tangan. Seiring dengan berkembangnya *laissez faire* tersebut, *freedom of contract*, merupakan pula suatu prinsip yang umum dalam mendukung berlangsungnya persaingan bebas.<sup>21)</sup>

---

<sup>21)</sup> Remy Sjahdeini, *Kebudayaan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, op cit, hal 8

Dalam rangka melakukan penelitian ini, perlu pula disusun serangkaian definisi operasional mengenai batasan *credit card* (kartu kredit) sebagai alat pembayaran di Indonesia, serta macam-macam *credit card*.

#### Batasan *credit card* (kartu kredit).

Menurut Richard Burton Simatupang.<sup>22)</sup>

Kartu kredit atau yang lebih dikenal dengan *credit card* ini adalah suatu kartu plastik yang hampir sama dengan ukuran KTP, yang diterbitkan oleh *Issuer* (penerbit) dan dipergunakan oleh *card holder* (pemegang kartu) dan berfungsi sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai dan pihak penerima adalah kaum usahawan/pedagang (*merchant*) yang telah ditentukan oleh penerbit. Selain itu *credit card* pun dapat diuangkan oleh pemegangnya kepada penerbitnya.

Menurut Retnowulan Sutantio.<sup>23)</sup>

*Credit card* atau kartu kredit merupakan salah satu usaha bank dalam pemberian kredit untuk pembelian barang dan jasa. Usaha bank yang satu ini, erat hubungannya dengan istilah kredit, yaitu usaha untuk memenuhi kebutuhan akan barang dengan membayar di kemudian hari. Kredit tersebut disediakan oleh bank dengan

---

<sup>22)</sup> Richard Buttrton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal 150

<sup>23)</sup> Retnowulan Sutantio, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung, 1995, hal.9

ketentuan bahwa penerima kredit akan membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditentukan.

Menurut Muhamad Djuhana.<sup>24)</sup>

Kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Para pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit adalah pemegang kartu (*card holder*), penerima pembayaran dengan kartu (*merchant*) dan penerbit (*issuer*).

Pemegang kartu adalah pihak yang ditetapkan oleh penerbit sehingga berhak memegang dan menggunakan kartu tersebut. Adapun penerima pembayaran dengan kartu, biasanya pemilik tempat pembelanjaan dan hiburan, seperti pasar swalayan, toko, hotel, restoran dan perusahaan jasa lainnya. Sedangkan pihak penerbit dapat berupa perusahaan khusus, dapat juga bank.

Menurut Thomas Suyatno dkk.<sup>25)</sup>

Kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang atau cek. Kartu kredit ini merupakan instrumen untuk berbelanja di toko-toko, restoran, hotel, tempat hiburan dan lain-lain. Kartu kredit hanya boleh dikeluarkan oleh bank yang tergolong sehat/cukup sehat setelah mendapat persetujuan BI.

---

<sup>24)</sup> Muhamad Djuhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, op cit, hal. 192

<sup>25)</sup> Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, op cit, hal 58

Kartu kredit ini diterima di lebih 3 jutaan tempat seperti toko, hotel, perusahaan dan restoran yang terdapat di 160 negara. Setiap pemegang kartu kredit diberi buku kecil yang mencantumkan alamat-alamat tempat berbelanja. Kartu kredit tidak boleh dipindahtangankan kepada siapapun. Pemegang kartu kredit disyaratkan untuk membuka rekening koran atau deposito berjangka dan memberi kuasa kepada bank untuk mendebet rekening koran tersebut atau memperhitungkan dengan saldo deposito berjangka tersebut dalam pembayaran kepada bank apabila pemegang kartu lalai melaksanakan kewajibannya.

Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak.<sup>26)</sup>

Secara umum pengertian *credit card* atau kartu kredit adalah suatu kartu yang memberikan hak kepada pemegangnya atau pertunjukan dari kartu itu dan dengan menandatangani formulir rekening pada suatu perusahaan dapat memperoleh barang-barang atau jasa tanpa perlu membayar secara langsung.

Menurut Achmad Ruslan, Nyoman Suastini.<sup>27)</sup>

*Credit card* adalah salah satu jenis jasa bank, berupa fasilitas kredit yang diberikan oleh bank penerbit *credit card* kepada nasabah pemegang *credit card*, dimana kartu kredit tersebut dapat digunakan

---

<sup>26)</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Kartu Kredit (Credit Card)*, Penataran Dosen Hukum Perdata Dagang, Yogyakarta 16-28 Nopember/30 Nopember - 12 Desember, 1992, hal 2

pemegang *credit card*, dimana kartu kredit tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran pada tempat-tempat yang telah terdaftar untuk menerima *credit card* yang bersangkutan. Atas jumlah transaksi yang dilakukan oleh pemegang *credit card*, maka pada tanggal jatuh tempo penagihan, pemegang kartu kredit dapat membayar sekaligus uangnya yang timbul atas penggunaan *credit card*nya, atau hanya sebagian atau berdasarkan presentase tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, sedangkan sisanya dicicil dan diperhitungkan sebagai kredit dengan membayar tambahan bunga tertentu dan dapat pula tidak melampaui pagu yang telah ditetapkan.

Menurut Training & Baranch Support Card Central Bank Lippo.<sup>28)</sup>

Kartu kredit adalah fasilitas perorangan yang diberikan oleh bank untuk berbelanja barang dan atau jasa, maupun mengambil uang tunai dengan sarana kartu plastik.

Sedangkan yang dimaksud dengan alat pembayaran didefinisikan sebagai pindahnya pemilikan penguasaan atas dana dari si pembayar kepada si penerima. Dalam definisi ini disebutkan pindahnya pemilikan atau penguasaan si penerima belum tentu

---

<sup>28)</sup> Training & Baranch Support Card Centre Bank Lippo, *Credit Card*, 1997

menjadi pemilik dari dana yang diterimanya. Sebab mungkin saja dia hanya menguasai dana itu untuk kepentingan pihak ketiga

### Macam *credit card* (kartu kredit)

Ada bermacam-macam *credit card* tergantung dari bank yang mengeluarkannya Kartu Kredit Lippo Bank.

Lippo Bank menerbitkan beberapa jenis kartu kredit *mastercard* dan *visa*, yaitu :

#### 1. *Regular Mastercard (Cosmopolitan Card)*.

Penerbitan kartu ini ditujukan kepada market masyarakat kelas menengah dengan didasarkan pada standar penghasilan pertahun minimal Rp. 15 juta. Kredit limit untuk jenis kartu kredit ini maksimum Rp. 8 juta dan minimum Rp. 1 juta.

#### 2. *Gold Mastercard*

Jenis kartu kredit yang ditujukan pada masyarakat kelas atas, penghasilan pertahun minimal Rp. 40 juta. Kartu kredit ini mempunyai kredit limit diatas Rp. 8 juta.

#### 3. *Golf Mastercard*

*Gold card* pertama kali diperkenalkan pada tanggal 16 dan 17 Juni 1990 dalam suatu *golf* turnamen di Pondok Indah Jakarta. Kartu ini tampil dalam lapangan *Golf Octorial*, dan sesuai dengan namanya,

kartu ini diterbitkan khusus bagi pecinta golf dengan penghasilan minimum Rp. 40 juta.

#### 1. *Lady Mastercard*

Kartu kredit ini diterbitkan khusus bagi kaum wanita. Pertama diperkenalkan pada tanggal 20 Juni 1990. Satu hal yang membuat kartu ini unik adalah bahwa *lady card* hanya diterbitkan bagi pemegang rekening utama (tidak ada *supplementary card*). Penghasilan minimum untuk pemegang kartu jenis ini Rp. 10 Juta.

Perlu diketahui di sini, bahwa dalam *credit card* ada 2 pemegang kartu yaitu :

- *Basic*

Yaitu pemegang kartu utama, dimana semua transaksi dibebankan atas namanya termasuk transaksi oleh kartu *supplementary* (kartu tambahan).

- *Supplementary*

Yaitu pemegang kartu tambahan yang menginduk pada kartu utama (*basic*). Semua fasilitas, kredit limit dan lain-lain sama dengan kartu utama, dengan ditanggung oleh pemegang kartu utama.

#### 2. *Ima Mastercard*

*Card* ini pertama kali diperkenalkan pada tanggal 12 Juni 1990 melalui konferensi pers. *Card* ini adalah kartu kredit khusus bagi para dokter anggota IDI (*Indonesian Medical Association*) yang tampil dalam dominan



hijau dan putih dengan logo IDI terpasang disebelah kiri atas bagian muka.

### 3. *Visa Classic*

Penerbitan kartu ini ditujukan kepada market masyarakat kelas menengah dengan didasarkan pada standar penghasilan pertahun minimal Rp. 15 juta. Kredit limit untuk jenis kartu ini maksimum Rp. 8 juta dan minimum Rp. 1 juta.

### 4. *Visa Gold*

Jenis kartu kredit ditujukan pada masyarakat kelas atas. Penghasilan pertahun minimal Rp. 40 juta. Kartu kredit ini mempunyai kredit limit di atas Rp. 8 juta.

Bank Bali menerbitkan *credit card* yang disebut dengan Kartu Kredit Staff, yaitu :

Kartu kredit untuk karyawan hanya akan diterbitkan kepada mereka yang mempunyai grade 8 atau yang lebih tinggi. Namun kepada wilayah atau *Manager Card Centre* mempunyai wewenang untuk memberi dispensasi jika hal tersebut dipandang perlu untuk membantu dalam pelaksanaan tugas.

Kartu kredit untuk karyawan ditinjau sebagai keuntungan tambahan terhadap apa yang sudah ada dan operasi serta pemeliharaan kartu kredit harus tunduk dengan kebijakan *Credit Card Centre*. Karyawan

dengan riwayat pembayaran yang buruk, tidak diijinkan untuk memperbaharui kartu kreditnya. Dalam situasi seperti ini, Direktur Operasional dan pemasaran dengan rekomendasi dari Manager *Card Centre* dapat memberi pengecualian.

Sedangkan BI menerbitkan Kartu perusahaan (*Corporate Card*) yaitu :

Kartu kredit *Visa/master card* yang diperuntukkan bagi perusahaan, yang akan diberikan kepada eksekutif-eksekutif perusahaan tersebut. Jadi dalam hal ini, bank penerbit kartu berhubungan dengan perusahaannya.

Adapun keuntungan yang didapat bagi perusahaan adalah :

1. Kontrol yang lebih baik dalam hal pengeluaran,
2. Menperlancar *cash flow* perusahaan,
3. Mengurangi administrasi dalam hal efisien,
4. Mendatangkan kebanggaan bagi karyawan karena perusahaan mereka dicetak pada kartu.

#### G. Sistematika Penulisan.

Tesis ini terdiri atas empat bab, yang tersusun secara berurutan, dari Bab I sampai dengan bab IV.

Bab I. Berisikan gambaran umum mengenai isi tesis, yaitu latar belakang penulisan tesis, permasalahan yang berkaitan dengan aspek

hukum *credit card* sebagai alat pembayaran, tujuan penulisan tesis, kontribusi yang diharapkan dari penulisan tesis metode penelitian, kerangka pemikiran yang memberikan petunjuk dan mengarahkan penyusunan tesis dan sistematika penulisan. .

Bab II. Merupakan tinjauan pustaka terhadap substansi dari aspek hukum *credit card* sebagai alat pembayaran, Pembahasan terdiri dari Tinjauan Umum Tentang *Credit Card* Sebagai Alat Pembayaran Serta Mekanisme Berlakunya *Credit Card* sebagai Alat Pembayaran serta Perjanjian *credit card* sebagai alat pembayaran.

Bab III. Pada bab ini merupakan penguraian hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pada bagian ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai Aspek Hukum *Credit Card* Sebagai Alat Pembayaran yang terdiri : Bagaimana Operasionalisasi pengaturan Perusahaan Penerbit *credit card* sebagai alat pembayaran di Indonesia, bagaimana hubungan hukum para pihak dalam proses penyelenggaraan *credit card* sebagai alat pembayaran, dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam proses pelaksanaan perjanjian *credit card*.

Setelah diuraikan hasil penelitian mengenai permasalahan-permasalahan tersebut di atas, pada bagian pembahasan akan dianalisis masing-masing permasalahan tersebut dengan teknik analisis yang

masing-masing permasalahan tersebut dengan teknik analisis yang diuraikan pada bab sebelumnya sehingga mencapai tujuan yang diharapkan dari penelitian ini.

Bab IV. Merupakan bagian penutup, pada bagian ini akan disajikan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan diberikan saran-saran sebagai rekomendasi yang relevan berkaitan dengan penelitian dan substansi tesis ini.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**  
**ASPEK HUKUM CREDIT CARD SEBAGAI ALAT**  
**PEMBAYARAN**

**A. TINJAUAN UMUM TENTANG CREDIT CARD SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN.**

**1. Pengertian *Credit Card*.**

**a. Menurut istilah.**

Istilah kartu kredit merupakan suatu istilah yang relatif baru, tetapi menjadi cepat dan sering didengar oleh masyarakat. Dapat dikatakan bahwa hampir disetiap terjadi transaksi barang dan atau jasa dalam jumlah relatif cukup besar kartu kredit dipercaya sebagai alat bayar.

Istilah ini menjadi semakin dikenal karena fungsinya, yaitu sebagai alat bayar yang luwes dan terpercaya. Nilai kegunaan kartu kredit yang luwes dan fungsional tersebut dalam pemanfaatannya hampir dikenal di setiap negara.

Istilah *credit card* (kartu kredit) sering disamakan dengan istilah *Master Charge*. Namun pada dasarnya terdapat perbedaan diantara keduanya, yaitu :

*Credit Card* (kartu kredit) adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk menukarkan atau membeli sesuatu barang ditempat atau cabang yang dapat menerima *credit card* (kartu kredit) dari bank atau perusahaan yang mengeluarkan. Dapat juga untuk menguangkan kepada bank yang mengeluarkan atau pada cabang bank yang mengeluarkan.

Adapun pengertian mengenai *Master Charge* adalah semacam *Credit Card*, hanya yang mengeluarkan sebuah perusahaan yang menamakan diri sebagai intern bank di Amerika, dan biasanya dalam bentuk dollar Amerika. Diantara keduanya tersebut, *credit card* (kartu kredit) yang paling banyak dikenal di masyarakat baik secara nasional maupun internasional.

Istilah kartu kredit terdiri dari dua kata yaitu kartu dan kredit. Kartu adalah kertas yang ukurannya tidak begitu tebal, biasanya persegi panjang atau disesuaikan untuk berbagai keperluan. Kredit berasal dari bahasa Romawi *Credere* yang mempunyai arti percaya.

Istilah kredit sebagai istilah teknis perbankan mengandung arti penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman-pinjaman antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan<sup>29)</sup>

Dalam istilah sederhana, Kartu Kredit Bank adalah kartu plastik untuk membebaskan pembelian-pembelian pada seseorang atau perseroan yang dibayar pada suatu tanggal kemudian. Jasa-jasa kartu kredit bank ini dapat dipakai untuk pemberian kredit di luar pemarkahan bank yang didasarkan atas garis kredit yang telah ditetapkan sebelumnya, Jasa-jasa ini telah memantapkan bank sebagai suatu pihak yang membantu pertukaran nilai di tempat penjualan jasa-jasa ini memberikan kredit kepada para pelanggannya melalui bank. Para pedagang itu menerima dananya dengan cepat tak peduli kapanpun langganan membayar pembelian tersebut.<sup>30)</sup>

b. Menurut Peraturan Perundang-undangan.

---

<sup>29)</sup> Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*, BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1994/1995, hal. 36.

<sup>30)</sup> Allen H. Lipis, Thomas Marshall, Janhinker, *Perbankan Elektronik*, diterjemahkan oleh A. Hasyni Ali, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal.3

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan pada bagian Ketentuan Umum pasal 1 angka 7, disebutkan :

Perusahaan kartu kredit (*Credit Card Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.

Kemudian dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/ KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, telah dikeluarkan Ketentuan dan Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, sebagaimana pelaksanaan Kep. Pres. No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Pada bagian B Bidang Usaha pasal 7 dari Keputusan Menteri Keuangan No.1251/ KMK.013/1988 disebutkan :

Kegiatan Kartu Kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang atau jasa.

Menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 6 huruf 1 seperti yang telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998, menyebutkan

Usaha Bank Umum meliputi :



Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat. Pada bagian penjelasan atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa :

Usaha kartu kredit merupakan usaha dalam kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa yang penarikannya dilakukan dengan kartu. Secara teknis kartu kredit berfungsi sebagai sarana pemindahbukuan dalam melakukan pembayaran suatu transaksi.

c. Manurut Pendapat Para Sarjana.

Pengertian mengenai *credit card* (kartu kredit) masih belum ada kata sepakat oleh para ahli, maka pengertian *credit card* (kartu kredit) diambil dari hal-hal yang bersifat umum.

Menurut Sri Radjeki Hartono, pengertian kartu kredit adalah kartu atau sejenis kartu yang merupakan fasilitas kredit yang dapat dipergunakan untuk membayar barang dan atau jasa ditempat-tempat yang sudah ditentukan.<sup>31)</sup>

Manurut O.P. Simorangkir, Kartu Kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Kartu Kredit ini

---

<sup>31)</sup> Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*, Op.Cit, hal 37

merupakan instrumen untuk berbelanja di toko-toko, restoran, hotel, tempat hiburan dll.<sup>32)</sup>

Menurut Munir Fuady, Kartu Kredit merupakan suatu kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan identitasnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli ditempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket pengangkutan dan lain-lain. Selanjutnya membebankan kewajiban kepada pihak penerbit kartu kredit untuk melunasi harga barang atau jasa tersebut, ketika ditagih oleh pihak penjual barang atau jasa. Kemudian kepada pihak penerbitnya diberikan hak untuk menagih kembali pelunasan harga tersebut dari pihak pemegang kartu kredit plus biaya-biaya lainnya, seperti, bunga, biaya tahunan, uang pangkal, denda dan sebagainya.

Dengan demikian, *credit card* (kartu kredit) adalah fasilitas kredit perorangan yang diberikan oleh bank untuk berbelanja barang atau jasa, maupun mengambil uang tunai dengan sarana kartu plastik.

---

<sup>32)</sup> OP. Simorangkir, *Sehuk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada Press, Jakarta, 1984, hal 120

## 2. Para Pihak Yang terlibat Dalam Perjanjian *Credit Card* (Kartu Kredit) Sebagai Alat Pembayaran.

Para pihak dalam *credit card* (kartu kredit) merupakan para pelaku di dalam lalu lintas pembayaran dengan *credit card* (kartu kredit). Pada setiap lalu lintas pembayaran dengan *credit card* (kartu kredit) melibatkan sekaligus beberapa pihak yaitu :

### a. Pihak Penerbit *Credit Card* (issuer).

- Bank
- Lembaga Keuangan yang khusus bergerak di bidang penerbitan kartu kredit. (sekarang sudah tidak ada lagi dalam sistem hukum keuangan kita).
- Lembaga Keuangan yang disamping bergerak di dalam penerbitan kartu kredit, bergerak juga di bidang kegiatan-kegiatan lembaga keuangan lainnya.

Didalam pelaksanaan yang bertindak sebagai pihak penerbit *credit card* (kartu kredit) di Indonesia sampai sekarang barulah lembaga keuangan Perbankan.

Beberapa pengertian mengenai perbankan adalah sebagai berikut :

1. R. Tjipto Adinugroho, mengatakan bahwa Bank adalah suatu lembaga atau badan yang mempunyai pekerjaan pokok memberi

kredit berupa simpanan (deposit) disamping kirim mengirim uang.<sup>33)</sup>

2. A. Abdurachman, dalam "Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan" menjelaskan bahwa bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dll.<sup>34)</sup>
3. Drs. O.P. Simorangkir, memberikan definisi Bank sebagai salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit-kredit dan jasa-jasa. Pemberian kredit-kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau pihak dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.<sup>35)</sup>

Menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada pasal 1 angka 2 mengatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

---

<sup>33)</sup> R. Tjipto Adinugroho, *Perbankan Masalah Fungsi Organisasi dan Ketatalaksanaan*, Pradnya Parapita, Jakarta, 1976, hal.1

<sup>34)</sup> Thomas Suyatno, *Kelengkapan Perbankan*, PT. Gramedia, Jakarta, 1991, hal 1

<sup>35)</sup> OP. Simorangkir, *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada, Jakarta, 1989, hal.18

masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Keppres RI No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 1 No.3, yang termasuk Bank adalah Bank Umum, Bank Tabungan dan Bank Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Bank yang beroperasi di Indonesia menurut UU No.7 Tahun 1992 pasal 5 ayat 1 (tidak dirubah dalam UU No.10 Tahun 1998), dibagi dalam 2 jenis yaitu :

1. Bank Umum
2. Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Umum menurut UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 3 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan /atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat, menurut UU No.10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 4 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Jadi menurut UU Perbankan, Bank yang melakukan jasa dalam lalu lintas pembayaran adalah Bank Umum. Bank Umum menurut ketentuan UU No.7 Tahun 1992 Pasal 6 kuruf I (tidak dirubah dalam UU No.10 Tahun 1998), melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.

Kepada pihak penerbit ini, oleh hukum dibebankan kewajiban sebagai berikut :

- a) Memberikan kartu kredit kepada pemegangnya.
- b) Melakukan pelunasan pembayaran harga barang atau jasa atas *bills* yang disodorkan oleh penjual.
- c) Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit terhadap setiap tagihannya dalam suatu periode tertentu, biasanya tiap satu bulan.
- d) Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit berita-berita lainnya yang menyangkut dengan hak, kewajiban dan kemudahan bagi pemegang tersebut.

Selanjutnya pihak penerbit kartu kredit oleh hukum diberikan hak-hak sebagai berikut :

- a) Menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit pembayaran kembali uang harga pembelian barang atau jasa.

- b) Menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit pembayaran lainnya, seperti bunga, uang pangkal, uang tahunan, denda dan sebagainya.
- c) Menerima komisi dari pembayaran tagihan kepada perantara penagihan atau kepada penjual.

b. Pihak Pemegang Credit Card (Credit Holder),

adalah seseorang atau badan yang memiliki kartu kredit setelah terlebih dahulu mengadakan permintaan dan perjanjian dengan penerbit. Pihak ini namanya tercetak pada sisi muka kartu.

Ada 2 tipe pemegang kartu :

1. *Basic.*

Yaitu pemegang kartu utama, dimana semua transaksi dibebankan atas namanya, termasuk transaksi oleh kartu tambahan (*supplementary*).

2. *Supplementary.*

Yaitu pemegang kartu tambahan yang menginduk pada kartu utama (*basic*). Semua fasilitas, kredit limit dll sama dengan kartu utama, dengan ditanggung oleh pemegang kartu utama.

Secara hukum, pihak pemegang kartu kredit mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a) Tidak melakukan pembelian dengan kartu kredit yang melebihi batas maksimum
- b) Menandatangani slip pembelian yang disodorkan oleh pihak penjual barang/jasa.
- c) Melakukan pembayaran kembali harga pembelian sesuai dengan tagihan oleh pihak penerbit kartu kredit.
- d) Melakukan pembayaran-pembayaran lainnya. Seperti uang pangkal, uang tahunan, denda dan sebagainya.

Selanjutnya , pihak pemegang kartu kredit mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a) Hak untuk membeli barang/jasa dengan memakai kartu kredit dengan atau batas maksimum.
- b) Kebanyakan kartu kredit juga memberi hak kepada pemegangnya untuk mengambil uang cash, baik pada mesin teller tertentu dengan memakai nomor kode tertentu, ataupun via bank-bank lain atau bank penerbit. Biasanya jumlah pengambilan uang cash dibatasi sampai batas plafont tertentu.
- c) Hak untuk mendapatkan informasi dari penerbit tentang perkembangan kreditnya dan tentang kemudahan-kemudahan sekiranya ada yang diperuntukkan kepadanya.

c. Pihak Penerima (Pihak Penjual Barang/Jasa)/(Merchant)



ialah tempat-tempat tertentu yang bersedia menerima kartu kredit sebagai pembayaran atas transaksi barang dan atau jasa yang telah dilakukan oleh pelanggannya (yang memegang kartu kredit), misalnya toko, hotel, restoran, agen perjalanan, dan lain sebagainya.

Pihak penjual barang atau jasa (*merchant*), secara hukum mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- a) Memperkenankan pihak pemegang kartu kredit untuk membeli barang atau jasa dengan memakai kartu kredit.
- b) Bila perlu melakukan pengecekan atau otorisasi tentang penggunaan dan keabsahan kartu kredit yang bersangkutan.
- c) Menginformasikan kepada pemegang/pembeli barang/jasa tentang charge tambahan selain harga jika ada. Misalnya charge tambahan sekian persen dari harga penjualan terhadap pembelian dengan memakai kartu kredit terhadap beberapa jenis produk tertentu.
- d) Menyodorkan slip pembelian untuk ditandatangani oleh pihak pembeli/pemegang kartu kredit.
- e) Membayar komisi ketika melakukan penagihan kepada perantara (jika dipakai perantara) atau kepada penerbit (jika dilakukan langsung kepada penerbit).

Sedangkan yang menjadi hak dari penjual barang/jasa adalah sebagai berikut

- a) Meminta pelunasan harga barang/jasa yang dibeli oleh pembelinya dengan memakai kartu kredit.
- b) Menerima pembeli/pemegang kartu kredit untuk menandatangani slip pembelian.
- c) Menolak untuk menjual barang/jasa jika tidak terdapat otorisasi dari penerbit kartu kredit.

Selain para pihak yang utama dalam lalu lintas pembayaran dengan *credit card* (kartu kredit) ada lagi pihak-pihak tambahan yaitu :

d. Pihak Perantara *Credit Card* (*Acquirer*).

Pihak perantara ini terdiri dari perantara penagihan (antara penjual dan penerbit), dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit).

Pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit ) yang disebut juga dengan *acquirer*, adalah pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara penagihan inilah yang melakukan pembayaran kepada pihak penjual tersebut. Apabila pihak perantara penagihan ini terpisah dari pihak penerbit, maka seperti juga

tagihan perantara penagihan tersebut kepada penerbit, maka jumlah yang harus dibayar kepada penjualpun terkena pemotongan komisi oleh pihak perantara.

Selanjutnya yang dimaksud dengan perantara pembayaran (antara pihak pemegang dengan pihak penerbit) adalah bank-bank dimana pembayaran kredit/harga dilakukan oleh pemilik kartu kredit. Selanjutnya bank-bank ini akan mengirim uang pembayaran tersebut kepada penerbit. Pihak perantara pembayaran ini berkedudukan dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama saja seperti pemberian jasa pengiriman uang lainnya yang biasa dilakukan. Dalam hal ini bank perantara ini akan mendapatkan bayaran berupa fee tertentu.

### 3. Sejarah Berlakunya *Credit Card* (Kartu Kredit) Sebagai Alat Pembayaran.

#### a. Secara Umum.

Sejarah dalam setiap segi kehidupan adalah sangat penting dan tidak boleh kita lupakan. Demikian juga dalam suatu transaksi pembayaran, apabila kita tengok sejarahnya, pada mulanya bentuk yang paling tua adalah tukar menukar (barter). Karena pada jaman dulu, model transaksi barter inilah yang paling simpel/mudah dilakukan, tanpa perlu suatu alat bayar apapun. Kemudian lambat

dulu, model transaksi barter inilah yang paling simpel/mudah dilakukan, tanpa perlu suatu alat bayar apapun. Kemudian lambat laun manusia mulai mengenal alat bayar dalam bentuk uang, maka mulailah berkembang transaksi jual beli.

Alat bayar dalam bentuk uang ini ternyata lambat laun tidak aman bagi pemegangnya. Hal ini dikarenakan selain tidak praktis, juga adanya resiko kehilangan karena pencurian atau perampokan amatlah membahayakan. Maka kemudian berkembanglah bentuk alat bayar lain yaitu cek karena dirasa lebih aman dari pada alat bayar bentuk uang. Tetapi kenyataannya bentuk alat bayar cek ini juga tidak cukup *comfortable* bagi pemegang maupun penerimanya, karena dengan cek sering timbul macam-macam manipulasi cek termasuk cek kosong.

Karena itu, kemudian berkembanglah alat bayar lain yang berbentuk kartu plastik, yang secara populer disebut dengan *credit card* (kartu kredit). Walaupun eksistensi kartu kredit tidak dimaksudkan untuk menghapus secara total sistem pembayaran dengan menggunakan uang cash ataupun cek, tetapi terutama untuk kegiatan pembayaran tingkat menengah, maka keberadaan kartu kredit sesungguhnya dapat menggeser peranan uang cash ataupun cek. Untuk pembayaran yang bukan tingkat menengah,

sementara untuk transaksi yang besar. pilihannya jatuh pada alat bayar cek ataupun surat-surat berharga lainnya.

Manurut sejarahnya, di USA, kartu kredit pertama kali dipergunakan dalam dekade 1920-an yang diberikan oleh Departemen-departemen Store besar kepada para pelanggannya. Tujuannya, untuk mengidentifikasi pelanggannya yang ingin berbelanja tetapi dengan pembayaran bulanan. Karena itu kartu kredit seperti ini berbentuk kartu pembayaran lunas (*charge card*), yang dibayar bulanan setelah ditagih, dan tanpa kewajiban membayar bunga. Jadi para pihaknya hanya dua pihak saja, yaitu pihak pertama toko sebagai penerbit, sedangkan pihak kedua adalah pelanggan sebagai pemegang kartu kredit.<sup>36)</sup>

Kemudian, di USA di awal dasawarsa 1950-an, *Dinner's Club* mulai memperkenalkan kartu kredit tiga pihak yang mempunyai hubungan hukum segitiga antara penerbit, pemegang kartu kredit dan penjual barang/jasa, yang dibeli dengan memakai kartu kredit (tersebut).

---

<sup>36)</sup> Ronald A Baker, *Problems of Credit Card Regulation AUS Perspective* dalam Newsletter No.6 Tahun 1994, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 1994, hal. 1

Setelah *Dinner's Club*, lembaga-lembaga lain yang menerbitkan kartu kredit adalah *American Express Company* dalam tahun 1958 dan *Hilton Credit Corporation* dalam tahun 1959.

Selanjutnya, diakhir dasawarsa 1950-an itu juga, *Bank of America* menjadi pioner dengan memperkenalkan kartu kredit "antar bank".

*Franklin National Bank* juga merupakan lembaga pertama yang mengeluarkan kartu kredit bank yang diperkenalkan kepada nasabahnya pada tahun 1951 (Infobank No.192, 1995) Pada akhir tahun 1950-an beberapa bank terbesar termasuk *Bank of America*, *Chase Manhattan* dan *Marine Midland Trust* memperkenalkan *Charge Card Bank of America* kemudian dapat menyebarluaskan penerimaan kartu kreditnya di California. Banyak Bank-bank kecil bergabung dengan sistem *Bank America Card*. Pada tahun 1961 *Bank America Card* dapat mencapai 1 juta cardholder dengan perputaran modal sebesar US \$ 75 juta dan pada tahun 1967 naik menjadi 2,7 juta cardholder dengan perputaran modal sebesar US \$ 335 juta.

Tahun 1996, *Bank of America* berhasil mengusahakan perijinan untuk rencananya menyebarluaskan kartu kredit ke seluruh Bank di Amerika Serikat dan negara lainnya. Namun, beberapa bank telah merasa tidak puas terhadap cara pengawasan

*Bank of America* atas perencanaan kartu kreditnya. Mereka menghendaki lebih otonom didalamnya mengoperasikan kartu kredit dan banyak yang tidak dapat menerima konsep dari penerbit kartu dengan nama saingan utamanya pada kartu tersebut. Ini merupakan permulaan mengarahnya operasi kartu kredit dipisahkan dari *Bank of America* dan kemudian diberi nama baru *Visa* pada tahun 1976, Nama *Bank of America* diubah menjadi *Visa Card* dengan tujuan untuk menghilangkan konotasi sosial dan politik dalam penggunaan *Bank America Card*, dan karena istilah *Visa* telah dapat diterima dan dimengerti secara umum.

Pada tahun 1968, *Western States Bank Card* memberikan seluruh hak atas logo kepada *Interbank Card Association* mengubah nama dan desain kartunya dari *Master Charge* menjadi *Master Card* dan perubahan itu secara keseluruhan selesai pada tahun 1979.

Saat ini secara keseluruhan pasaran *credit card* didominasi oleh *Master Card* dan *Visa Card*. Pada tahun 1982 *Visa Card* diterbitkan oleh kira-kira 9000 bank di seluruh dunia lebih banyak dari pada bank yang mengeluarkan *Master Card*. Sampai tahun 1982 *Master Card* mempunyai 90 juta *cardholder* dan 3 juta *merchant* di seluruh dunai, sedangkan *Visa Card* dengan motto *the will to succeed the goal to compromise*.

b. Perkembangan Credit Card di Indonesia.

Di Indonesia penggunaan kartu kredit terlihat menonjol sekitar Tahun 1970-an. Sebelumnya pada tahun 1968, *American Express Bank* telah memberikan layanan kepada para nasabahnya yang mempunyai kartu terbutan dari luar Indonesia. Baru pada tahun 1973 *Dinner's Club* mulai diperkenalkan di Indonesia jumlah pemegang kartu *Dinner's Club* yang tersebar di seluruh dunia adalah 10 juta orang yang berada di 160 negara pada 2 juta tempat pembelanjaan. Sedangkan di Indonesia sendiri, pemegang kartu ini mencapai jumlah 32.000, orang yang dapat dibelanjakan pada 11.000 tempat pembelanjaan.<sup>37)</sup>

Pada tahun 1973, seorang perintis kepariwisataan yang bernama Sri Budoyo, mendirikan PT. Diners Jaya Indonesia Internasional berdasarkan perjanjian kerja sama dengan *Diners Club Internasional* yang berada di New York menerbitkan *Diners Club Internasional Card* (Infobank, No.102, 1989). Kemudian menyusul *Master Card* dengan membuka afiliasinya di Indonesia pada tahun 1974.

---

<sup>37)</sup> Zakaria Zainudin dan M. Ali, *Kartu Kredit Di Indonesia* (Bonus Infobank, Edisi Mei No. 146), 1991, hal.4



Di Indonesia, *Diners Club* dikelola oleh PT Diners Jaya Indonesia yang khusus bergerak di bidang kartu kredit. Perbedaan kartu *Diners Club* dengan kartu kredit lain pada umumnya diterbitkan oleh Bank. Dalam Keputusan Presiden No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, pada pasal 3 disebutkan bahwa : Kegiatan usaha kartu kredit dapat dilakukan oleh Bank, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan ini dapat berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Bentuk kerjasama *Diners Club* dengan 2 Bank Pemerintah dan 18 Bank Swasta dikenal dengan program *co Branding*, dimana setiap nasabah terbaik Bank yang ikut dalam kerjasama itu bisa diterima sebagai pemegang kartu *Diners Club*. Bentuk kerjasama *Sponsor Member* maupun *co Branding* ini mengikutsertakan logo Bank tersebut, baik dalam kartu Visa maupun kartu *Diners Club*.

Tahun 1979, Bank Central Asia mengeluarkan *BCA Card*. Kemudian di awal tahun 1983 Bank Central Asia juga menerbitkan *Master Card*. Di tahun yang sama Bank Duta menerbitkan *Visa Card*, yang merupakan kartu rupiah pertama dengan fasilitas kredit. Bank Duta merupakan Bank pertama yang mendapat kepercayaan untuk menerbitkan kartu kredit Visa. Per Nopember 1990,

pemegang kartu Visa yang diterbitkan Bank Duta mencapai 90.000 orang yang dapat dilayani di 10.000 tempat perbelanjaan.<sup>38)</sup>

#### 4. Tujuan Diadakannya Credit Card Sebagai Alat Pembayaran.

Seperti telah disebutkan dimuka, bahwa untuk memperlancar arus perdagangan selain uang tunai yang dipergunakan sebagai alat pembayaran, dipergunakan pula bentuk alat pembayaran lain seperti cek. Penggunaan alat pembayaran dalam bentuk cek berkembang dengan pesat, sehingga timbullah bermacam-macam manipulasi cek termasuk cek kosong. Karena kekhawatiran di kalangan pedagang, juga keengganan untuk mempergunakan uang tunai dan cek, maka timbullah gagasan dari kalangan pengusaha bank (waktu itu gagasan timbul dari *Bank of America Overseas Bank*) menciptakan suatu alat pembayaran lain yang dirasa lebih praktis dan lebih aman yaitu yang disebut dengan *Credit Card* yang dikeluarkan oleh *Bank of America*.

Dengan menggunakan *credit card* sebagai alat pembayaran, maka tidak lain bertujuan supaya mendapatkan sesuatu kepraktisan, dan keluwesan, Karena dengan membawa selembarnya, kartu dapat membeli atau mendapatkan sebanyak-banyaknya,

---

<sup>38)</sup> Zakaria Zainudin, Loc.Cit.

kalau dapat dikatakan tidak terbatas, dan juga lebih aman terhadap resiko kehilangan, pencurian dsb.

Selain praktis, luwes, dan aman, menurut Retnowulan Sutantio, *credit card* (kartu kredit) adalah sejenis kredit tanpa jaminan. Syarat yang diminta bank untuk memperoleh kartu kredit pada umumnya hanyalah, bahwa yang bersangkutan adalah nasabah bank dan memiliki rekening koran, dan suatu saldo minimum, yang jumlahnya berbeda-beda, sesuai dengan ketentuan dari bank yang bersangkutan. Saldo minimum ini kedudukannya bukanlah sebagai jaminan jadi bukan jaminan materiil atau jaminan immateriil.<sup>39)</sup>

##### 5. Manfaat *Credit Card* Sebagai Alat Pembayaran.

Beberapa fungsi/manfaat yang diperoleh para pihak dengan *credit card* sebagai alat pembayaran adalah sebagai berikut :

###### 1. Bagi Pihak Penerbit *Credit Card*.

###### a. Dari segi finansil.

*Credit Card* merupakan *profit center*, yaitu *card issuer* memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang dikenakan *cardholder* jika tagihan per bulan terlambat, uang iuran tahunan, uang pangkal, uang administrasi penggantian *credit*

---

<sup>39)</sup> Retnowulan Sutantio, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung, 1995, hal 10.

*card* setiap tahun dan lain sebagainya. Selain hal tersebut pihak *card issuer* juga mendapatkan keuntungan diskonto yang diterima dari merchant

b. Dari segi non finansial.

- (1) Mendukung usaha pemerintah dalam meningkatkan devisa negara dari sektor pariwisata, dalam artian para wisatawan yang memiliki *credit card* khususnya.
- (2) Memperluas penyaluran kredit karena dengan dikeluarkannya *credit card* bertambah pula jenis pemberian kredit yang dapat diberikan pada masyarakat.
- (3) Memperkenalkan nama bank yang menerbitkan *credit card* tersebut ke seluruh dunia, melalui transaksi yang dilakukan oleh *cardholder* (merupakan alat promosi dalam sistem perbankan).

2. Bagi Pihak Pemegang Credit Card.

- a) Dapat melakukan transaksi dan atau pembayaran dengan aman karena tidak perlu membawa uang kontan atau cek perjalanan.
- b).Dapat melakukan pembayaran mundur untuk beberapa waktu, dengan menikmati barang dan atau jasa terlebih dahulu.

- c) Dengan *credit card*, cardholder, dapat mengurangi biaya administrasi bank karena seluruh pembelian dalam satu bulan diselesaikan dengan satu kali pembayaran.
- d) *Credit Card* merupakan alat untuk membuat rencana pengeluaran bulanan, karena cardholder dapat memperkirakan jumlah yang harus dibayar setiap bulan.
- e) Dengan diterimanya *credit card* di banyak negara di dunia, merupakan keuntungan bagi cardholder yang bergerak di bidang pariwisata ataupun usaha yang bersifat internasional.
- f) Dengan memiliki *credit card*, berarti akan melambangkan citra pribadi yang tinggi (*prestigious*), refleksi dari bonafiditas dan simbol status bagi cardholder.

### 3. Bagi Pihak Penerima Credit Card.

- a) Meningkatkan mutu pembayaran.
- b) Memperoleh kepastian pembayaran dan pencrbit.
- c) Dengan diterimanya *credit card* sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai, keamanan akan lebih terjamin, apalagi jika transaksi dilakukan dalam jumlah besar.
- d) Sistem *credit card* memperbolehkan merchant menawarkan kredit pada langganan tanpa pihak merchant terlibat dalam biaya administrasi maupun resiko.

- e) *Merchant* juga akan memperoleh bantuan dari pihak *card issuer* dalam mempromosikan barang yang dijualnya.

## B. MEKANISME BERLAKUNYA *CREDIT CARD* SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA.

### 1. Landasan Hukum/Dasar Hukum Berlakunya *Credit Card* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia.

Dasar yang tegas tentang berlakunya *credit card* (kartu kredit) di Indonesia tidak diketemukan dalam kitab undang-undang, karena perkembangan *credit card* di Indonesia masih terbilang relatif baru dibandingkan dengan alat pembayaran yang lain seperti uang cash, cek, dsb. Maka oleh karena itu baik KUH Perdata maupun KUHHD tidak menyebut-nyebut istilah kartu kredit ini.

Sebagai dasar hukum atas legalisasi pelaksanaan kartu kredit di Indonesia adalah :

#### a. Perjanjian Antara Para Pihak Sebagai Dasar Hukum.

Salah satu dasar penerbitan kartu kredit adalah perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit. Apabila timbul masalah dalam penggunaan kartu kredit, maka perjanjian ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam membuat perjanjian, para pihak harus

selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian, yang termuat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar perjanjian yaitu :

- sepakat mereka yang mengikatkan diri.
- kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- suatu hal tertentu.
- suatu sebab yang halal.

Perjanjian yang telah dibuat harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

Sebagaimana diketahui juga, sistem hukum perjanjian kita menganut asas kebebasan berkontrak (Vide pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Pasal 1338 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan berlandaskan kepada Pasal 1338 ayat (1) ini, maka asal saja dibuat secara tidak bertentangan dengan hukum atau kebiasaan yang berlaku, maka setiap perjanjian (lisan maupun tertulis) yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut.

Dan memang ternyata ada perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh mereka yang berhubungan dengan penerbitan dan pengoperasian

kartu kredit tersebut. Karena itu Pasal 1338 ayat (1) dapat menjadi salah satu dasar hukum berlakunya.

Dengan demikian pula, tentunya pasal-pasal tentang perikatan dalam buku ketiga berlaku terhadap perjanjian-perjanjian yang berkenaan dengan kartu kredit, secara *mutatis-mutandis*.

Disebutkan juga dalam dokumen kontrak Bank Internasional Indonesia (Pasal 2 angka 2 dari persyaratan dan Kondisi Pemegang Kartu (BIT) menyebutkan :

“Dengan diterimanya dan ditandatanganinya kartu tersebut pemegang kartu telah setuju untuk mengikatkan diri dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian ini serta syarat-syarat dan ketentuan yang lain yang lazim berlaku secara umum bagi para pemegang kartu *Visa/Mastercard*.”

b. Perundang-undangan Sebagai Dasar Hukum.

Seperti telah disebutkan bahwa baik KUH Perdata maupun KUH Dagang tidak dengan tegas memberikan dasar hukum bagi eksistensi kartu kredit. Tetapi ada berbagai perundang-undangan lain yang dengan tegas menyebut dan memberi landasan hukum terhadap penerbitan dan pengoperasian kartu kredit ini. Yaitu sebagai berikut :

(1) Keppres No. 61 Tahun 1988, tentang Lembaga pembiayaan.

Pasal 2 ayat (1) dari Keppres No. 61 ini antara lain menyebutkan bahwa salah satu kegiatan dari Lembaga Pembiayaan adalah



melakukan usaha kartu kredit. Sementara dalam Pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Kartu Kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam rangka pembelian barang/jasa dengan mempergunakan kartu kredit. Selanjutnya menurut Pasal 3 dari Keppres No. 61 ini, yang dapat melakukan kegiatan lembaga pembiayaan tersebut, termasuk kegiatan kartu kredit adalah :

- (1) Bank;
  - (2) Lembaga Keuangan Bukan Bank (sekarang sudah tidak ada lagi dalam sistem hukum keuangan kita);
  - (3) Perusahaan Pembiayaan.
- (2) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1998, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Pasal 2 dari Keputusan Menkeu No.1251 ini kembali menegaskan bahwa salah satu dari kegiatan Lembaga pembiayaan adalah usaha kartu kredit.

Selanjutnya dalam Pasal 7 nya ditentukan bahwa pelaksanaan kegiatan kartu kredit dilakukan dengan cara penerbitan kartu kredit yang dapat dipergunakan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang/jasa.

(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Sejauh yang berhubungan dengan perbankan, maka kegiatan yang berkenaan dengan kartu kredit legitimasinya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 6 huruf I nya dengan tegas menyatakan bahwa salah satu kegiatan bank adalah melakukan usaha kartu kredit.

(4) Berbagai Peraturan Perbankan Lainnya.

Masih terdapat berbagai peraturan perbankan lainnya yang mengatur lebih lanjut atau menyinggung tentang kartu kredit ini, yang dikeluarkan dari waktu ke waktu.<sup>40)</sup>

## 2. Jenis/Macam *Credit Card* Sebagai Alat Pembayaran Yang Berlaku di Indonesia.

---

<sup>40)</sup> Munir Fuady, Op.Cit., hal. 181.

Perkembangan di seluruh dunia dan deregulasi di Indonesia memberi kesempatan bank-bank untuk ikut meramaikan pasar *credit card*.

Kebijaksanaan suatu bank untuk menerbitkan lebih dari satu jenis kartu adalah dilandasi oleh keinginan bank untuk menyediakan *product line* yang lengkap sehingga nasabah tidak perlu berpindah kepada bank lain. Bagi nasabah yang memiliki lebih dari satu kartu akan lebih banyak mendapatkan manfaat karena ia memiliki akses terhadap sejumlah dana yang lebih besar.

a. Secara garis besar, ada beberapa jenis kartu yang telah dikenal di Indonesia, yaitu <sup>41)</sup>

(1) *Credit Card* (kartu kredit)

Yaitu kartu yang mengijinkan pemegangnya menyelesaikan tagihan secara mencicil atau seluruhnya.

Contoh : *Master Card, Visa Card*.

(2) *Charge Card* (kartu tagihan).

Yaitu kartu yang mengharuskan pemegangnya untuk membayar seluruh jumlah yang ditagihkan.

Contoh : *American Express*.

(3) *Debet Card* (kartu debit).

---

<sup>41) 41)</sup> Credit Card, *Traning & Barnch Support Card Centre Bank Lippo*.

Yaitu kartu yang mengharuskan pemegangnya untuk menyimpan sejumlah dana minimal sebesar yang akan dibelanjakannya.

Contoh : Kartu ATM.

b. Menurut tipenya, penerbitan kartu kredit dibedakan dalam :<sup>42)</sup>

(1) Kartu kredit berdasarkan dua pihak.

Kartu kredit dua pihak biasanya digunakan secara terbatas (antara perusahaan-perusahaan dengan cabang-cabangnya atau relasinya didalam sistem distribusi). Kartu kredit semacam ini dipergunakan oleh perusahaan pergudangan yang besar dalam rangka memelihara perusahaan pergudangan yang besar dalam rangka memelihara hubungan baiknya dengan pelanggan-pelanggannya terutama pelanggan tetap.

(2) Kartu kredit berdasarkan tiga pihak.

Kartu kredit dengan tiga pihak ialah kartu kredit yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan atau perusahaan kartu kredit dalam rangka menyediakan pembiayaan kepada konsumen untuk memperoleh barang dan atau jasa.

---

<sup>42)</sup> Sri Redjeki Hartono, Op.Cit., hal39

c. Pengkategorian kartu kredit ini sendiri dibedakan berdasarkan kriteria-kriteria :

(1) Kriteria Lokasi Penggunaan.

Apabila lokasi penggunaan kartu kredit yang dipakai sebagai kriteria, maka kartu kredit dapat dibagi ke dalam :

\* Kartu kredit Internasional.

Kartu kredit Internasional ini dimaksudkan sebagai kartu kredit yang penggunaannya dapat dilakukan dimana saja, tanpa terikat dengan batas antar negara. Sungguhpun kartu kredit tersebut diterbitkan di Indonesia, pemegangnya yang kebetulan sedang berada di Eropa misalnya, dapat saja membeli barang/jasa yang ada di Eropa tersebut dengan memakai kartu kredit yang bersangkutan.

Contoh dari kartu kredit seperti ini misalnya *VISA Card*, *MASTER Card*, *American Express* dan sebagainya.

\* Kartu Kredit Lokal.

Kartu kredit lokal hanya dapat digunaka di wilayah tertentu atau di suatu negara tertentu saja. Kartu kredit yang demikian tidak mempunyai jaringan operasi internasional.

Contohnya *Lippo Card*, *BCA Card*, dan sebagainya.

Apabila sistem pembayaran yang digunakan sebagai kriteria, maka kartu kredit (dalam arti luas) dapat dibeda-bedakan ke dalam dua kategori sebagai berikut :

\* Kartu kredit (dalam arti sempit).

Kartu kredit (dalam arti sempit) sering juga disebut dengan *credit card*. Dengan kartu kredit seperti ini, pembayaran yang dilakukan oleh pemegangnya dilakukan secara cicilan. Walaupun tidak tertutup kemungkinan tentunya jika ingin dibayar lunas sekaligus. Apabila pembayaran dilakukan secara cicilan, maka akan dikenakan bunga sesuai dengan lamanya pembayaran. Jadi tidak ubahnya seperti mencicil kredit bank biasa.

\* Kartu Pembayaran lunas.

Kartu pembayaran Lunas ini sering disebut juga dengan *Charge Card*. *Charge Card* kurang populer dibandingkan dengan *Credit Card*.

Kartu Pembayaran Lunas ini penggunaannya tidak jauh berbeda dengan kartu kredit (dalam arti sempit). Dimana kartu pembayaran lunas ini juga dapat dipergunakan sebagai "alat bayar" jika hendak membeli sesuatu barang/jasa tertentu dengan prosedur yang sama dengan kartu kredit (dalam arti sempit), antara lain dengan

menandatangani slip yang disodorkan oleh penjual barang/jasa.

Bedanya dengan kartu kredit (dalam arti sempit) hanya pada cara pembayarannya oleh pihak pemegangnya.

Dengan sistem kartu pembayaran lunas, sesuai dengan namanya, maka pihak pemegang kartu tersebut akan melakukan pembayaran seluruh transaksi yang dibuatnya pada saat ditagih oleh penerbitnya. Jadi tidak dibayar secara cicilan. Sehingga dengan penggunaan kartu pembayaran lunas, yang terjadi sebenarnya hanyalah penundaan pembayaran. Yakni tidak dilakukan pada saat pembelian barang/jasa kepada pihak penjual, tetapi pada saat ditagih oleh penerbit kartu tersebut. Sehingga pihak pemegang dalam melakukan pembelian barang/jasa, dengan demikian tidak perlu membawa *cash* ke mana-mana untuk berbelanja.

Namun demikian dalam karangngan ini, apabila disebut dengan "kartu kredit", berarti yang dimaksudkan adalah kartu kredit dalam pengertiannya yang luas, jadi termasuk kartu kredit dalam pengertian yang sempit, maupun kartu pembayaran lunas. Kecuali apabila dengan tegas disebutkan sebaliknya.

### (3) Kriteria Cara Pemindahan Dana.

#### \* *Credit Card.*

Yaitu dimana *cardholder* dapat memperoleh perpanjangan kredit dalam arti bahwa setiap bulan *cardholder* boleh membayar sebagian dari tagihan sesuai dengan batas minimum yang telah ditentukan, sedangkan sisa tagihannya harus dilunasi pada bulan berikutnya dengan dikenakan bunga yang besarnya telah ditentukan. Apabila seluruh tagihan dilunasi pada akhir bulan, maka *cardholder* tidak dikenakan bunga. Jumlah maksimum kredit yang boleh diambil setiap bulan ditentukan oleh *Issuer* yang besarnya berbeda untuk masing-masing *cardholder*.

#### \* *Debit Card.*

Yaitu kartu yang terbuat dari plastik yang dapat dipergunakan untuk memperoleh uang tunai, barang, atau jasa dengan pembayaran melalui rekening korang *cardholder* di bank.

#### \* *Cheque Guarantee Card.*



Yaitu kartu yang diterbitkan oleh lembaga keuangan yang menjamin pembiayaan yang dilakukan oleh *cardholder* dengan menggunakan cek sampai batas tertentu.

- d. Selain dari jenis-jenis kartu kredit yang telah disebutkan di atas, di Indonesia juga dikenal adanya jenis kartu kredit yang lain yaitu :

(1) Kartu Bayar di Muka.

Kartu bayar di muka bukanlah salah satu dari kartu kredit atau kartu debit. Kartu Bayar di Muka tersebut terbuat dari bahan Polyster tipis, yang nilainya disandikan pada sebuah garis magnet, dan dapat digunakan untuk melakukan pembelian sampai batas jumlah yang telah dibayar di muka. Kartu Bayar di Muka mulanya diterbitkan oleh perusahaan telepon di Eropa Barat selama bertahun-tahun, namun sekarang Kartu Bayar di Muka tersebut telah beralih bukan hanya dari industri telepon namun juga berbagai tempat penjualan seperti *fast food*, pasar swalayan. Kartu Bayar di Muka ini sangat digemari di Jepang.

(2) *Smart Card*.

Adalah sebuah kartu dengan microchip yang menyimpan semua keterangan.

Jenis-jenis *smart card* adalah :

\* *Dumb Smart Card.*

Yaitu kartu yang tidak dapat diisi informasi lain selain untuk 1 (satu) hal saja.

Contoh : kartu telepon.

\* *Standart Smart Card.*

Yaitu kartu yang menyimpan keterangan terdahulu dan dapat diperbaharui jika diperlukan. Kartu ini sekarang banyak digunakan di bidang medis untuk melacak riwayat medis pemilik kartu. Kartu ini dapat menyimpan keterangan berdasarkan tingkat tertentu, misal :

Tingkat 1 : berisi nama dan alamat;

Tingkat 2 : berisi golongan darah, nama dokter;

Tingkat 3 : riwayat medis pemegang kartu.

Apabila ingin membuka tingkat ini diperlukan 1 kartu dokter dan 1 kartu milik yang bersangkutan.

\* *Super Smart Card.*

Adalah sejenis kartu kredit yang bukan dikeluarkan oleh bank, melainkan dikeluarkan oleh suatu tempat usaha seperti departemen store, hotel dan sebagainya. Pemakaian kartu ini terbatas pada toko atau hotel atau perusahaan yang mengeluarkan kartu tersebut. Jadi sifatnya adalah lokal.

Fasilitas dan cara pembayaran yang ditawarkan oleh semua kartu kredit. Kartu kredit ini biasanya dikeluarkan untuk meningkatkan hubungan atau loyalitas pelanggan.

e. Jenis kartu kredit yang dikeluarkan tiap-tiap bank

(1) Jenis kartu kredit Lippo.

\* *Reguler Mastercard (Cosmopolitan Card).*

Penerbitan kartu ini ditujukan kepada market masyarakat kelas menengah dengan didasarkan pada standar penghasilan pertahun minimal Rp. 15 juta. Kredit limit untuk jenis kartu kredit ini maksimum Rp. 8 juta dan minimum Rp. 1 juta.

\* *Gold Mastercard*

Jenis kartu kredit yang ditujukan pada masyarakat kelas atas. Penghasilan pertahun minimal Rp. 40 juta. Kartu kredit ini mempunyai kredit limit di atas Rp. 8 juta.

\* *Golf Mastercard.*

*Golf Card* pertama kali diperkenalkan pada tanggal 16 dan 17 Juni 1990 dalam suatu Golf Turmamen di Pondok Indah Jakarta. Kartu kredit ini tampil dalam lapangan Golf Pictorial, dan sesuai dengan namanya. Kartu ini diterbitkan khusus bagi pecinta golf dengan penghasilan minimum Rp. 40 juta. Para anggota *Golf Card* dapat menikmati fasilitas tambahan antara lain :

- Berlatih dengan pelatih terkenal secara cuma-cuma (*Free Pro Clinic*). Saat ini fasilitas ini hanya berlaku di Jakarta. *Golf Card holder* diharuskan melakukan reservation melalui customer services *Card Center* bila ingin menggunakan fasilitas ini.
- Asuransi *Golfer's Liability* secara cuma-cuma. Hal ini memungkinkan para card holder bermain golf dengan tenang di *course* manapun di seluruh dunia sebab apabila dalam bermain Golf terjadi kecelakaan, maka kerugian akibat kecelakaan tersebut akan diganti *US\$ 100.000,00* untuk mengetahui secara detail mengenai fasilitas lainnya yang dapat diperoleh dengan memiliki *Golf Marter Card* dapat dilihat lebih lanjut pada brosur *Golf Card*.

\* *Lady Mastercard*.

Kartu kredit ini diterbitkan khusus bagi kaum wanita. Pertama dikenalkan pada tanggal 20 Juni 1990. Satu hal yang membuat kartu ini unik adalah bahwa *Lady Card* hanya diterbitkan bagi pemegang rekening utama (tidak ada *supplementary card*). Penghasilan minimum untuk pemegang kartu jenis ini Rp. 10 juta.

- \* *Ima Mastercard*. Card ini pertama kali diperkenalkan pada tanggal 12 Juni 1990 melalui konperensi pers. Card ini adalah kartu kredit khusus bagi para dokter anggota IDI (*Indonesian Medical*

*Association*) yang tampil dalam warna dominan hijau dan putih dengan logo IDI di sebelah kiri atas bagian muka.

\* *Visa Classic.*

Penerbitan kartu ini ditujukan kepada market masyarakat kelas menengah dengan didasarkan pada standar penghasilan pertahun Rp. 8 juta. dan minimum Rp. 1 juta.

\* *Visa Gold.*

Jenis kartu kredit ini yang ditujukan pada masyarakat kelas atas. Penghasilan per tahun minimal Rp. 40 juta. Kartu kredit ini mempunyai kredit limit di atas Rp. 8 juta.

(2) Jenis kartu kredit bank Bali.

\* *Kartu Kredit Tambahan.*

Kartu Kredit Tambahan hanya akan diterbitkan pada istri atau suami dan anak-anak yang berusia diatas 18 tahun. Pada suatu kasus khusus permintaan penerbitan kartu kredit tambahan untuk orang tua atau saudara atau anak yang berusia dibawah 18 tahun (minimal 16 tahun) dengan persetujuan *Manager Card Center* atau Direktur Operasi dan Pemasaran.

Para pemegang kartu kredit tambahan secara bersama-sama dan sepenuhnya bertanggung jawab atas transaksi pada rekening induk atau pemegang kartu tambahan yang melakukan transaksi.

\* Kartu Kredit Staff.

Kartu kredit untuk karyawan hanya akan diterbitkan kepada mereka yang mempunyai Grade 8 atau yang lebih tinggi. Namun Kepala Wilayah atau Manager *Card Center* mempunyai kewenangan untuk memberi dispensasi jika hal tersebut dipandang perlu untuk membantu dalam pelaksanaan tugas.

\* Kartu kredit untuk karyawan harus ditinjau sebagai keuntungan tambahan terhadap apa yang sudah ada dan operasi serta pemeliharaan kartu kredit harus tunduk dengan kebijakan *credit card center*.

Karyawan diijinkan untuk memperbaharui kartu kreditnya. Dalam situasi seperti ini, Direktur Operasi dan Pemasaran dengan rekomendasi dari *Manager Card Center* yang dapat memberi pengecualian.

(3) Jenis kartu kredit BII.

Kartu Perusahaan (*Corporate Card*) merupakan kartu kredit *Visa/Mastercard* yang diperuntukkan bagi perusahaan yang akan diberikan kepada eksekutif-eksekutif perusahaan tersebut. Jadi dalam hal ini, bank penerbit kartu berhubungan dengan perusahaannya. Adapun keuntungan yang didapat bagi perusahaan adalah :

- a. Kontrol yang lebih baik dalam hal pengeluaran;
- b. Memperlancar *cash flow* perusahaan;
- c. Mengurangi administrasi dalam hal efisien;
- d. Mendatangkan kebanggaan bagi karyawan karena perusahaan mereka dicetak pada kartu.

### 3. Bentuk Formal *Credit Card* Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia.

Bentuk fisik kartu kredit adalah berupa kartu plastik, yang merupakan perpaduan antara magnetik, elektronik, komputer dan beberapa unsur lain. Pada setiap kartu kredit mengandung dua identitas sekaligus. Identitas pertama adalah identitas dari penerbit, dan identitas yang kedua adalah identitas pemegang kartu.

Secara fisik setiap kartu kredit mengandung ciri-ciri (*credit card, Training & Branch Support Card Centre Bank Lippon*) sbb. :

- a) Logo perusahaan atau bank penerbit kartu kredit logo suatu perusahaan atau bank adalah menunjukkan siapa penerbit kartu kredit yang bersangkutan. Hal ini penting artinya karena dapat dipakai sebagai ciri apabila digunakan untuk belanja maka hanya kartu kredit dari perusahaan atau bank tertentu saja yang diterima suatu toko, hotel atau tempat pembelanjaan lainnya. Nama Perusahaan atau bank yang menerbitkan kartu kredit dapat digunakan sebagai tanda bahwa penerima kartu kredit

benar-benar mempercayai perusahaan atau bank tersebut. Kepercayaan itu timbul karena masyarakat menganggap bahwa perusahaan atau bank yang bersangkutan telah dianggap bonafide. Tidak kalah pentingnya yaitu yang menyangkut segi komersial dari perusahaan /bank yang mengeluarkan reklame demi peningkatan nasabah atau usaha kemajuan perusahaannya karena sudah mendapat kepercayaan di kalangan masyarakat.

- b) Nama Pemegang Kartu. Nama pemegang kartu sangat penting artinya, karena hanya orang yang namanya tercantum di dalam kartu yang berhak mempergunakan kartu tersebut sebagai alat bayar. Hal tersebut karena pemegang kartu merupakan orang yang mempunyai hubungan hukum dengan penerbit, sehingga hanya pemeganglah yang mempunyai hak menggunakan.

- c) Tanda tangan pemegang kartu.

Tanda tangan yang tercantum pada kartu kredit sangat penting karena merupakan tanda tangan pemegang kartu. Tanda tangan ini merupakan salah satu identifikasi dari siapa yang berhak mempergunakan kartu kredit bersangkutan. Tanda tangan pada kartu adalah tanda tangan orang yang atau pihak yang telah melakukan perjanjian dengan penerbit. Tanda tangan setiap kali akan dicocokkan dengan tanda tangan di atas dokumen transaksi.



apabila transaksi yang bersangkutan dibayar dengan kartu kredit. Hal ini tidak lain berguna untuk menghindari penipuan dari orang yang tidak berhak dengan kartu kredit.

d) Nomor Kartu. Nomor yang tercantum pada sebuah kartu kredit merupakan nomor yang tidak sama antara pada setiap kartu dan pada setiap pemegang. Nomor tersebut mempunyai dua arti dan dua fungsi.

(1) Nomor kartu sebagai perhitungan oleh penerbit. Maksudnya untuk mengetahui sampai nomor berapa atau seberapa banyak kartu telah diterbitkan oleh perusahaan atau bank penerbit yang bersangkutan. Hal ini penting dari segi pengawasan bank yang bersifat internal maupun eksternal.

(2) Nomor kartu berfungsi sebagai identitas kartu.

Biasanya dibawah dengan nomor tertentu sebagai kode bagi jenis kartu tertentu sesuai dengan jenis kartu dari masing-masing penerbit. Misalnya nomor untuk jenis silver dan gold pada jenis kartu yang sama adalah berbeda.

e) Masa Berlaku. Ketentuan mengenai masa berlaku yang merupakan suatu rentang waktu tertentu sebagai waktu berlakunya suatu kartu kredit bagi seseorang yang nama dan tanda tangannya tercantum pada kartu yang bersangkutan.

Masa berlaku merupakan masa atau waktu kartu kredit tersebut dapat dipergunakan dengan sah. Penggantian kartu karena habis masa berlakunya kartu kredit, selalu diberikan sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku. Untuk masa berlakunya kartu kredit ini tiap-tiap bank memberikan waktu yang berbeda-beda.

f) Keuntungan yang berbunyi *Card*.

Keterangan yang berbunyi *card* dalam istilah bahasa Indonesia berarti kartu. Istilah *Card* berhubungan erat dengan perusahaan atau bank yang mengeluarkan, karena dengan dicantumkan keterangan *card*, maka sekilas dapat dibedakan antara dua atau bermacam-macam surat berharga lainnya, yang mungkin diterbitkan oleh perusahaan atau bank yang sama. Surat berharga lain yang dimaksud adalah cek, *traveller's cheque*, *wessel*, dan lain sebagainya. Keterangan yang berbunyi *card* mengandung pengertian adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban dari para pihak yang berkaitan dengan fungsi kartu kredit.

4. Syarat Penerbitan *Credit Card* Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia.

Secara umum, dalam penerbitan credit card, diperlukan tiga pihak, yaitu :

- 1) Bank atau perusahaan yang mengeluarkan kartu sebagai tempat untuk menyimpan dana milik pemegang kartu.
- 2) Pihak pemegang kartu yang mempunyai simpanan giro atau deposito yang *disimpan dalam bank yang mengeluarkan*.
- 3) Dan pihak *Merchant*, yaitu cabang-cabang, tempat-tempat yang digunakan untuk belanja/penerimaan *credit card* dapat berlaku.

Dalam setiap penerbitan *credit card* sebagai sistem pembayaran di Indonesia, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ketiga pihak tersebut diatas, yaitu :

a. Syarat Bagi Penerbit Credit Card.

Dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran di Indonesia, termasuk dalam hal ini Bank yang ingin menerbitkan kartu kredit menurut ketentuan UU Bank Indonesia 1999 ( UU RI No.23 Tahun 1999) pasal 15, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

Pasal 15 UU No.23 Tahun 1999 (ayat 1a).

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia berwenang :

- a. "Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;

- b. Mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
- c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran”.

Untuk mendapatkan izin tersebut, Bank harus memebnuhi syarat antara lain tergolong sehat atau cukup sehat.

Selain itu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 mengenai Ketentuan dan Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, pada pasal 10 disebutkan :

“Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang menjalankan usaha dibidang Usaha Kartu Kredit Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen Wajib melaporkan usahanya kepada Menteri”<sup>43)</sup>

Keputusan pihak bank untuk menerbitkan kartu kredit mempunyai pengaruh jangka panjang terhadap jasa-jasa bank dimasa depan, maka diperlukan suatu studi kelayakan yang akan mempertimbangkan berbagai faktor, yaitu <sup>44)</sup>

- 1) Profil konsumen dan pedagang dari lembaga keuangan itu;
- 2) Persaingan di pasar;
- 3) Kesesuaian tujuan-tujuan lembaga keuangan itu dengan fasilitas dan masa depan dari rencana kartu;

---

<sup>43)</sup> Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 mengenai *ketentuan dan Cara Pelaksanaan Lembaga Prmbiaayaan*, yang dimaksud “Menteri adalah Menteri Keuangan”

<sup>44)</sup> Allen Lipis, Thomas Marchall, Jan Linkerr, Op.Cit., hal.45

- 4) Jasa-jasa penunjang dari penerbit kartu yaitu promosi, otorisasi dan sistem penyelesaian produk-produk baru;
- 5) Seleksi terhadap calon pemegang kartu dan pedagang.

b. Syarat Bagi Pemegang Credit Card.

Syarat ini pada umumnya ditetapkan oleh perusahaan/bank dalam mengeluarkan *credit card* yang terdiri dari :

1). Mengisi surat permohonan.

Surat permohonan diisi berdasarkan formulir yang disediakan oleh bank/perusahaan, dimana *credit card* dikeluarkan, formulir permohonan diketik oleh yang bersangkutan. Formulir tersebut untuk tiap-tiap penerbit adalah berbeda-beda biasanya/pada umumnya formulir permohonan tersebut berisi :

- a. Pas foto dari pemohon.
- b. Identitas dari pemohon yaitu :
  - Nama lengkap.
  - Alamat Rumah.
  - Alamat untuk penagihan.
  - Kewarganegaraan.

- Jika mempunyai perusahaan, maka dicantumkan nama perusahaan, bidang usahanya, pangkatnya, alamat perusahaan.
- pendapatan sebulan.
- Bila menjadi nasabah bank maka ditulis nama dan alamat bank jenis rekeningnya.
- Bila sudah mempunyai *credit card* yang lain, maka ditulis nama *credit card*, nama bank yang mengeluarkan.
- Kemudian ditanda tangani pemohon, dan dibubuhi meterai.

## 2). Mengisi formulir perjanjian.

Pengisian formulir perjanjian biasanya juga sudah disediakan oleh bank/perusahaan, jadi tinggal menyetujui atau tidaknya si pemohon, isi perjanjian tersebut, bila pemohon menyetujui maka tinggal menerapkan tanda tangan dan dibubuhi meterai. Sedang isi perjanjian itu biasanya mengatakan bahwa pemohon bertanggung jawab bila terjadi hal-hal yang menyela dari perjanjian yang telah dibuat. Selain itu bila pemohon mempunyai perusahaan atau bekerja pada suatu perusahaan atau kantor, maka diwajibkan mengisi formulir jaminan untuk pemegang *credit card* oleh perusahaan/kantor yang bersangkutan.

3). Membayar uang muka.

Besarnya uang muka dari bank satu berbeda dengan bank lainnya.

- 4). Menunjukkan Bukti Rekening di Bank atau mempunyai Simpanan Deposito di Bank. Berapa batasnya jumlah yang dipunyai oleh calon pemohon tidak ada angka pasti yang bila dijadikan pegangan, karena peraturan dari bank yang satu berbeda dengan bank yang lain.

Selain syarat-syarat tersebut diatas yang harus dipenuhi oleh pemegang *credit card*, masih ada syarat khusus yang harus dipenuhi yaitu : syarat yang dipunyai oleh bank tertentu saja, misalnya Bank Bank of America Jakarta memberi peraturan bahwa calon pemohon setidaknya mempunyai rekening di bank US \$ 250 dan angka pendapatan tiap bulannya US \$ 1.000.- Ukuran ini tidaklah cocok untuk diterapkan di Indonesia. Amex menetapkan syarat-syarat pendapatan minimum US \$ 15 setahun. Visa mempunyai peraturan yang istimewa yaitu tidak memungut sama sekali iuran tahunan dari para anggotanya. Pemegang kartu hanya dikenakan bunga 1,5% sebulan dari sisa pengeluaran yang belum dilunasi, pungutan ini disebut *instatment payment*. BCA menentukan peraturan harus mempunyai rekening koran di bank yang cukup kurang lebih Rp. 250.000,- dan tidak memberi batasan pendapatan seseorang.

Kalau dilihat dari semua syarat tersebut maka batasan bank yang mengeluarkan *credit card* yang paling penting adalah mengenai

identitas calon anggotanya, maka yang terang adalah : kartu kredit hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, setelah dilakukan penyelidikan tentang kemampuan pembayarannya. Dengan persyaratan ini di samping jumlah penghasilan tetap yang cukup, dinilai juga sejarah kejujuran seseorang dalam melunasi utang-utangnya, termasuk disini penganalisaan terhadap sifat pengeluaran belanja dari si pemohon itu. Atau dengan kata lain bank mencari kepercayaan terhadap calon pemohon, dasar-dasar pertimbangan yang umum untuk adanya kepercayaan adalah "*The six C's of credit*"<sup>49)</sup>

Keenam faktor itu adalah :

- (a) Wewenang untuk meminjam (*Competence to borrow*);
- (b) Watak pemilik perusahaan (*Character*);
- (c) Kemampuan menciptakan sumber dana (*Capacity to create sources of funding*);
- (d) Kondisi harta operasional perusahaan (*Capital*);
- (e) Jenis dan nilai jaminan yang ada (*Collateral*);
- (f) Perkembangan ekonomi dan sektor usaha perusahaan debitur (*Condition of economy and sector of business*).

---

<sup>49)</sup> Siswanto Sutojo, *Analisa Kredit Bank Umum*, PT.Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1995, hal.44



Faktor-faktor (a) sampai dengan (e) tergolong faktor intern perusahaan, sedangkan faktor (f) merupakan faktor ekstern perusahaan.

Sesudah semua syarat terpenuhi dan menurut penilaian bank/perusahaan calon pemohon dianggap cukup menjadi anggota dan selanjutnya menerima *credit card*, maka oleh bank ditentukanlah

- 1) Nomor urut dari *credit card*nya;
- 2) Tanggal jatuh temponya dari *credit card*, kalau di BCA biasanya berlaku 1 tahun.
- 3) Batas pembelian per transaksi untuk toko-toko umum dan juga batas untuk hotel restouran.

Kemudian setelah pemegang menerima *credit card* dengan komplit, maka pemegang menerima juga tanda terima yang berfungsi sebagai kuitansi. Mengenai *master charge* cara-cara menjadi anggota dan syarat-syaratnya pada dasarnya sama dengan *credit card* hanya anggota tinggal memilih menjadi anggota dengan *master charged* atau *credit card*, biasanya *master charge* dalam bentuk dollar.

c. Syarat Bagi Penerima Credit Card (Merchant).

*Merchant* yang bekerjasama dengan bank penerbit harus diteliti kebonafiditasnya, karena hal ini menyangkut pelayanan

terhadap pemegang kartu. Selain hal tersebut, diatas *Merchant* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Mengisi dan menandatangani formulir perjanjian usahawan (perjanjian *Merchant*). Formulir ini berbentuk baku/standar yang dibuat pihak penerbit. Walaupun dibuat secara sepihak, tetapi pihak *Merchant* diberi kesempatan untuk memeriksa sebelum menandatangani persetujuan.

Pasal 12 Perjanjian Usahawan *Visa/Martercard* menyebutkan :

“Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan akan teta berlaku sampai adanya pemberitahuan . pemutusan hubungan perjanjian ini secara tertulis oleh salah satu pihak”

- 2). Menunjukkan Surat Ijin Usaha perdagangan (SIUP).

SIUP menunjukkan bahwa si pemohon adalah pemilik sah dari perusahaan uyang akan menerima pembayaran dengan kartu kredit.

- 3). Menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- 4). Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Berdasarkan pasal 11 Perjanjian Usahawan *Visa/Mastercard*, ditetapkan :

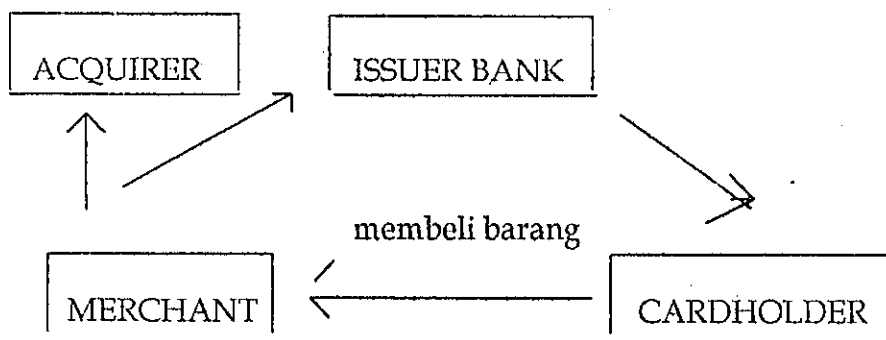
- a. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini berlaku KUH Perdata serta ketentuan-ketentuan pemerintah lainnya.

- b. Segala perbuatan atau penambahan terhadap perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak.
- c. Usahawan tidak diperkenankan mengalihkan perjanjian ini, baik seluruhnya maupun sebagian daripadanya kepada pihak manapun juga tanpa persetujuan dari bank.

## 5. Tata Cara Penggunaan *Credit Card* Sebagai Alat pembayaran di Indonesia.

### a. Transaksi Pembayaran dengan *Credit Card*.

Seperti telah ditulis dimuka, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pembayaran dengan *credit card* adalah *Issuer Bank*, *Cardholder*, dan *Merchant*. Serta *acquirer*. Untuk lebih jelasnya mengenai pihak-pihak yang terlibat didalamnya serta fungsinya masing-masing secara sederhana dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini.<sup>46)</sup>



<sup>46)</sup> Achmad Ruslan, Nyoman Suastini, Op.Cit., hal.32.

1. *Issuer* bank atau bank penerbit atau disebut juga sebagai pihak kreditur, menerbitkan *credit card* untuk seorang *cardholder* setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan *issuer* bank seperti misalnya bonafiditas, serta *cardholder* telah menyetujui perjanjian-perjanjian yang berlaku dalam pemakaian. Pada saat itu *issuer* bank akan memungut fee dari *cardholder* dan kemudian setiap tahun memungut lagi *annual fee*.
2. *Cardholder* melakukan transaksi pembelian barang maupun jasa pada *merchant* dengan menunjukkan *credit card*-nya dan selanjutnya cukup menandatangani bill atau faktur pembelian. Tentunya sebelum *cardholder* diminta untuk menandatangani bill tersebut pihak *merchant* akan memeriksa secara seksama keaslian dari *credit card* yang bersangkutan.
3. *Merchant* akan menyerahkan bill yang sudah ditandatangani *cardholder* kepada *issuer* bank, atau melalui *acquirer* untuk menagih pembayaran atas transaksi penjualan tersebut. Selanjutnya bank penerbit akan membayar sejumlah nilai transaksi setelah dikurangi dengan *discount rate* untuk keuntungan bank.
4. Setelah tenggang waktu tertentu atau tanggal jatuh tempo seperti yang telah dituangkan dalam surat perjanjian (misalnya 20 hari

dari pembayaran kepada *merchant*), bank penerbit akan menagih kepada *cardholder* sejumlah nilai transaksi.

Sedangkan menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak dalam "Kartu Kredit (*Credit Card*),<sup>47)</sup> bekerjanya *credit card* dalam lalu lintas pembayaran adalah : pemegang *credit card* membeli barang pada suatu toko atau perusahaan yang terikat dalam organisasi yang bergabung dengan penerbitan *credit card*, menyerahkan *credit card* sebagai pengganti uang untuk membayar. Pemilik toko atau pengusaha itu sebelumnya telah menguasai sejumlah formulir rekening yang disebut "*invoices*".

Formulir atau *invoices* ini dibuat oleh lembaga yang mengeluarkan *credit card* (*emitter*) dan tiap *invoices* dibuat rangkap tiga yaitu dimaksudkan satu copy untuk pemilik toko atau pengusaha, satu lagi yang disebut *salesslip* dikirim oleh pemilik toko atau pengusaha kepada *emitter* dan satu lagi untuk pemegang *credit card* itu sendiri. Pemilik toko dengan suatu alat yang disebut *imprinter* (sebagai stempel) memasukkan data yang ada diatas *credit card* itu keatas *invoices* dan selanjutnya diminta untuk ditandatangani oleh pemegang *credit card*. Kemudian pemilik toko/pengusaha meneliti atau memeriksa hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah *credit card* itu masih berlaku.

---

<sup>47)</sup> Emy Pangaribuan Simanjuntak, *Kartu Kredit (Credit Card)*, Penataran Dosen Hukum Perdata/Dagang, Yogyakarta, 1992, hal.3

2. Apakah tanda tangan yang terdapat pada *credit card* sesuai atau cocok dengan tanda tangan pada *invoices*.
3. Apakah nomor *credit card* termasuk dalam "*stoplist*" yaitu daftar yang memuat nomor *credit card* yang dicuri, hilang atau yang sudah diambil kembali.

Setelah meneliti kesesuaian hal-hal diatas dan setelah memperoleh otorisasi dari emitten, dalam hal harga pembelian melampaui batas yang ditentukan oleh emitten bagi pemilik toko/pengusaha, maka pembeli menerima kembali *credit cardnya* dan menerima satu lembar copy *invoices* dan bon dari kassa. Dengan selesainya proses ini maka kewajiban membayar dari pembeli dianggap telah dipenuhi dan dia bebas dari pemilik toko atau pengusaha. Pemilik toko atau pengusaha, selanjutnya mengirim *salesslip* kepada emitten. Emitten selanjutnya menyerahkan sejumlah uang seperti yang tertera dalam *salesslip* kepada pemilik toko atau pengusaha, setelah dipotong atau didiscount sesuai dengan presentase yang diijinkan antara mereka, yang biasanya berkisar antara 1% sampai dengan 10%.

Pada akhir bulan emitten mengirim perhitungan total kepada pemegang *credit card*, dengan maksud untuk dipenuhi, biasanya dalam jangka waktu tertentu atau lazimnya 20 hari.

Menurut Petunjuk Layanan Kartu Kredit Bank BNI, yang disebut dengan Slip Penjualan (*Sales Draft/Sallseslip*) adalah :<sup>48)</sup>

Formulir yang disediakan Bank Pemroses untuk digunakan oleh *Merchant* dalam melakukan transaksi penjualan barang-barang, makanan atau jasa dan merupakan bukti yang sah bagi merchant untuk menagih kepada Bank atau badan usaha lainnya yang ditunjuk oleh Bank.

Bank Pemroses adalah :

“Bank yang melakukan pemrosesan atas transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Kartu di *Merchant*”.

Transaksi-transaksi adalah :

1. Semua transaksi akan ditagihkan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang dilakukan di Luar Negeri. Akan dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar yang akan ditetapkan Bank pada saat transaksi dibukukan.
2. Besarnya transaksi yang ditagihkan adalah sesuai dengan jumlah yang ditagihkan oleh *Merchant* kepada Bank Pemroses.
3. Bank berhak membatasi pemakaian kredit, menolak transaksi untuk sementara ataupun selamanya.
4. Pembatalan transaksi hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara Pemegang Kartu dan *Merchant*. Atas pembatalan tersebut *Merchant* harus memberikan Slip Kredit (adalah slip pembatalan atas transaksi yang telah ditagihkan. Slip Kredit harus disetorkan oleh *Merchant* kepada Bank Pemroses untuk dikreditkan ke rekening Pemegang Kartu) sejumlah kredit yang telah dibatalkan yang selanjutnya akan dikreditkan oleh Bank Pemroses ke rekening Pemegang Kartu.
5. Apakah Pemegang Kartu kehilangan bukti slip transaksi (*sales draft*) dan menginginkan fotocopynya melalui pihak BNI Card Center, maka Pemegang Kartu akan dibebankan biaya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

b. Cara Membayar.

---

<sup>48)</sup> Petunjuk Layanan Kartu Kredit Bank BNI.

Ada beberapa cara pembayaran. Menurut Bank BNI ada 6 cara kemudahan pembayaran yaitu :<sup>49)</sup>

1. Pembayaran dengan Uang Tunai.

Pemegang Kartu dapat melakukan pembayaran dengan uang tunai di lebih dari 500 kantor cabang Bank BNI dalam negeri melayani pembayaran dengan uang tunai pada jam kerja yaitu pukul 08.00 hingga 16.00 (Senin-Jum'at) Pembayaran akan dibukukan oleh Bank BNI ke rekening pemegang kartu pada hari kerja yang sama.

2. Pembayaran melalui ATM BNI di seluruh Indonesia.

Kemudahan lainnya untuk pembayaran BNI VISA/*Master Card* Biru Pemegang Kartu yaitu dengan menggunakan Kartu Plus BNI melalui ATM BNI terdekat yang terbesar di seluruh Indonesia.

3. Pembayaran dengan Pemindahbukuan dari Rekening

Pemegang Kartu di Bank BNI. Bila Pemegang Kartu memiliki rekening Giro/Tabungan/Pinjaman di Bank BNI. Pemegang Kartu dapat mendebit rekening tersebut melalui pemindahbukuan untuk pembayaran BNI VISA/*Master Card* dengan datang langsung ke kantor cabang Bank BNI terdekat. Pembayaran akan dilakukan pihak bank untuk membukukan ke rekening kartu pemegang pada hari kerja yang sama.

---

<sup>49)</sup> Petunjuk Layanan Kartu Kredit Bank BNI.



4. Pembayaran melalui Layanan 24 Jam *Phone Plus* BNI. Bagi Pemegang Kartu yang sudah menjadi pelanggan layanan perbankan *Phone Plus* BNI, dapat melakukan transaksi pembayaran tagihan BNI *VISA/Master Card* Biru Pemegang Kartu melalui layanan *Phone Plus* tersebut selama 24 jam.
5. Pembayaran dengan Cek/Giro.  
Cek/Giro dapat disetorkan oleh Pemegang Kartu di kantor cabang Bank BNI setempat pada jam kerja, yaitu pukul 08.00 hingga 16.00 (Senin-Jum'at). Cek/Giro yang diterima oleh Bank BNI akan dikliringkan terlebih dahulu, yang memakan waktu 2 hari kerja. Pembayaran akan dimasukkan oleh Bank BNI ke rekening Pemegang Kartu setelah dana diterima oleh Bank BNI.
6. Pembayaran melalui Transfer (LLG).  
Pemegang Kartu dapat melakukan pembayaran melalui Transfer dari Bank Pemegang Kartu, dengan cara mendebet rekening Pemegang Kartu di Bank tersebut, atau dengan menyetorkan uang tunai untuk ditransfer ke BNI *Card Center*, Bank BNI cabang Wisma 46, Jl. Jenderal Sudirman Kav.1, Jakarta Pusat. Nomor rekening 060.000028600.001 Pada umumnya Bank Pemegang Kartu akan melakukan perintah transfer tersebut pada hari yang sama atau keesokan harinya. Bank BNI akan membukukan dana pembayaran

ke rekening Pemegang Kartu pada hari kerja berikutnya atau setelah dana diterima oleh BNI *Card Center*. Agar dana Pemegang Kartu dapat diterima oleh Bank BNI sebelum tanggal jatuh tempo, Pemegang Kartu perlu mengetahui prosedur dan batas waktu dalam melakukan transfer di Bank Pemegang Kartu. Bayaran melalui Transfer (LLG) ini membutuhkan waktu 2 hari kerja agar dana dapat dibukukan ke rekening Pemegang Kartu.

Untuk kelancaran pembayaran, diperingatkan untuk mencantumkan nomor BNI VISA/*Master Card* Biru Pemegang Kartu disetiap pembayaran yang dilakukan.

c. Otorisasi.

Yang dimaksud dengan otorisasi berdasarkan pasal 1 Perjanjian Usahawan VISA/*Master Card* BII adalah :

- Otorisasi adalah persetujuan dari Bank yang diberikan kepada Usahawan untuk penjualan yang melalui Batas Dasar.
- Batas Dasar adalah jumlah maksimum yang diberikan kepada Usahawan untuk melakukan transaksi penjualan barang/jasa kepada pemegang kartu tanpa otorisasi dari pihak Bank. Untuk transaksi dibawah batas dasar harus dicek di daftar hitam terbaru.

Otorisasi dalam praktek pembayaran dengan *credit card* diperlukan karena :

- Untuk mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh kredit.
- Pengamanan terhadap pemalsuan, kartu-kartu yang hilang dan dicuri.
- Untuk tujuan *Charge Back*.
- Proteksi bagi Bank terhadap transaksi yang melebihi kelayakan.
- Sebagai peraturan.

Adapun transaksi yang memerlukan otorisasi adalah :

- Transaksi pembelian yang melebihi batas maksimum *Floor limit* yang diberikan pada *Merchant* tersebut.
- Tanda tangan yang tertera pada kartu *Visa/Master Card* tidak sama dengan tanda tangan yang tersedia pada kartu *Visa/Master Card*.
- Transaksi yang berulang-ulang di satu toko dalam satu hari dan melebihi *Floor Limit*.
- Kartu belum berlalu atau sudah daluarsa.
- Nomor Kartu *Master Card/Visa* masuk dalam *Daftar Warning Bulletin (WB)/Card Recovery Bulletin (CRB) Master Card/Visa*.
- Jika daftar *WB/CRB* yang terbaru belum diterima.

## C. PERJANJIAN CREDIT CARD SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN.

### 1. Perjanjian Pada Umumnya.

#### a. Pengertian Perjanjian.

Sebelum membahas mengenai pengertian perjanjian, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pemakaian istilah perjanjian.

Berbagai kepustakaan hukum Indonesia memakai bermacam-macam istilah untuk menterjemahkan "*verbintenist*" dan "*overeenkomst*".

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Subekti dan Tjiptosudibio (edisi lama) menggunakan istilah Perikatan untuk "*verbintenist*" dan Persetujuan untuk "*Overeenkomst*" (Sedangkan edisi revisi menggunakan istilah Perjanjian untuk "*Overeenskoms*t").
- Utrecht dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia memakai istilah Perutangan untuk "*Verbintenist*" dan Perjanjian untuk "*Overeenkomst*"<sup>50)</sup>.
- Achmad Ichsan dalam bukunya Hukum Perdata I B menterjemahkan "*Verbintenist*" dengan Perjanjian dan "*Overeenkomst*" dengan Persetujuan.<sup>51))</sup>

---

<sup>50)</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Penerbit Balai Ichtiar, 199, Cetakan V, hal. 320 dan 621

<sup>51)</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Perdata I B*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, hal.7 dan 14

- Menurut R. Setiawan, untuk "*Verbinten*" berasal dari kata kerja *Verbinden* yang artinya mengikat. Jadi *Verbinten* menunjuk kepada adanya "ikatan" atau "hubungan". Hal ini memang sesuai dengan definisi *Verbinten* sebagai suatu hubungan hukum, maka yang tepat adalah istilah Perikatan. Sedang "*Overeenkomst*" berasal dari kata kerja "*Overeenkomen*" yang artinya "setuju" atau "sepakat". Jadi "*Overeenkomst*" mengandung kata sepakat sesuai dengan azas konsensualisme yang dianut oleh BW. Oleh karena itu, istilah terjemahannyapun harus dapat mencerminkan azas kata sepakat tersebut. Berlandaskan hal tersebut maka yang tepat adalah istilah Persetujuan.<sup>52)</sup>

Suatu perjanjian dapat juga dinamakan persetujuan (*Overeenkomst*) dengan alasan bahwa keduanya mempunyai unsur setuju untuk melakukan suatu kehendak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama.

Dalam penggunaan sehari-hari lazim digunakan istilah perjanjian daripada persetujuan. Untuk selanjutnya, didalam

---

<sup>52)</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987, hal.1-2

penulisan tesis ini, penulis menggunakan istilah perjanjian sebagai terjemahan dari "*Overeenkomst*".

Ketentuan umum mengenai Perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata, Bab II, sedangkan ketentuan khusus diatur dalam Bab V s/d. XVIII ditambah Bab VIIA. Ketentuan-ketentuan umum mengenai terjadinya dan hapusnya perikatan seperti yang terdapat dalam Bab I dan IV pun bertalian dengan perikatan yang terjadi karena persetujuan. Perjanjian adalah sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Menurut pasal 1233 KUH Perdata Perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang.

Rumusan mengenai pengertian perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa perjanjian sebagai suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih.

Rumusan tersebut menurut para sarjana selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja. Dan sangat luas luas karena dengan digunakan perkataan "perbuatan" tercakup juga perwakilan sukarela mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang

menimbulkan perjanjian juga, namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.

Sehubungan dengan itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi yaitu :

1. Perbuatan harus diartikan sebagai "perbuatan hukum", yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
2. Menambahkan perkataan "atau saling mengikatkan dirinya.

Sehingga perumusan menjadi : perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dengan demikian setidaknya dalam suatu perjanjian mengandung : <sup>53)</sup>

1. Ada pihak-pihak sedikitnya dua orang.
2. Ada persetujuan antara para pihak.

---

<sup>53)</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990, hal.71

3. Ada tujuan yang akan dicapai.
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.
5. Ada bentuk tertentu, lisan maupun tertulis.
6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Bagian-bagian (unsur-unsur) perjanjian menurut Asser (dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman)<sup>54)</sup>

Membedakan bagian inti (*wezenlijk oordeel*) dan bagian yang bukan inti (*non wezenlijk oordeel*). Bagian inti disebutkan *esensialia*, bagian non inti terdiri dari *naturalia* dan *aksidentalialia*.

**Esensialia** : bagian ini merupakan sifat yang harus ada didalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordeel*). Seperti persetujuan antara para pihak dan objek perjanjian.

**Naturalia** : bagian ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual (*vrijwaring*).

**Aksidentalialia** : bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan



oleh para pihak, seperti ketentuan-ketentuan mengenai domisili para pihak

b. Syarat Sahnya Perjanjian.

Suatu perjanjian dianggap sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti tersebut dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subyek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat obyektif, karena mengenai obyek perjanjian. Apabila dalam perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Keempat syarat tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

---

<sup>54)</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Penerbit Alimni, Bandung, 1983, hal.99

dalam suasana setelah tahun 1945, rumus ini mendapat identitas sebagai berikut :

Yaitu, Hukum Perdata adalah Hukum yang mengatur kepentingan perseorangan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Rumus ini mendorong kita untuk membahas bagaimanakah sistem hubungan individu dan masyarakat di dalam Hukum Perdata Nasional.

Almarhum Supomo, telah telah memberikan sumbangan yang sangat besar dalam hal meletakkan dasar terhadap hubungan individu dan masyarakat di Indonesia. Dari pidato inagurasinya di Fakultas Hukum Jakarta tahun 1941 dapat disimpulkan beberapa ciri perbandingan tentang kedudukan individu dalam masyarakat Indonesia dan Dunia Barat sebagai berikut :

Di Indonesia, yang primair adalah masyarakat individu terikat dalam masyarakat, Hukum bertujuan mencapai kepentingan individu yang selaras, serasi dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.

Di Barat yang primair adalah individu, individu terlepas dari masyarakat, Hukum bertujuan mencapai kepentingan individu.

Tap. MPR No. II/MPR/1978 menyatakan bahwa manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai Mahkluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Karena itu dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa "tepo sliro" serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

Falsafah negara Pancasila ini menampilkan ajaran bahwa harus ada keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara penggunaan hak asasi dengan kewajiban asasi. Dengan perkataan lain di dalam kebebasan terkandung "tanggung jawab".

Di dalam Hukum Perjanjian Nasional, asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, yang mampu memelihara keseimbangan ini tetap perlu dipertahankan, yaitu "pengembangan kepribadian" untuk mencapai

kecsejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras, dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.

Di dalam perkembangannya asas kebebasan berkontrak ini semakin sempit dilihat dari beberapa segi yaitu :

- dari segi kepentingan umum
- dari segi perjanjian baku (standart)
- dari segi perjanjian dengan pemerintah

## 2. Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata. Dalam pasal 1320 KUH Perdata penyebutnya tegas sedangkan dalam pasal 1388 KUH Perdata ditemukan dalam istilah "semua". Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (wil), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian.

Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

## 3. Asas Kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu

bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak.

Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

#### **4. Asas Kekuatan Mengikat**

Demikianlah seterusnya dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikianlah sehingga asas-asas moral kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.

#### **5. Asas Persamaan Hukum**

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dll.

Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

#### 6. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menentukan prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik. Dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan iktikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

#### 7. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

UPT-PUSTAKA UNIP

## 8. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, di mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya juga asas ini terdapat dalam ps 1339 KUH Perdata. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada "kesusilaan" (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.

## 9. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam ps 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Menurut hemat saya asas kepatutan ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

## 10. Asas kebiasaan

Asas ini diatur dalam ps. 1339 jo. 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.

Undang-undang mengatur tentang elemen-elemen isi perjanjian ini di dalam ps. 1339 dan 1347 KUH Perdata.

Menurut ps. 1339 KUH Perdata maka persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang.

Ps. 1347 KUH Perdata mengatakan pula hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan (*bestending gebruikelijk beding*) dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.

Dari kedua ketentuan itu dapatlah disimpulkan bahwa elemen-elemen dari perjanjian adalah :

1. Isi perjanjian itu sendiri
2. Kepatutan



### 3. Kebiasaan

### 4. Undang-Undang

Yang dimaksud dengan isi perjanjian ialah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban mereka di dalam perjanjian tersebut.

Kepatutan di dalam ketentuan ini adalah ulangan dari kepatutan yang telah diatur di dalam ps. 1338 KUH Perdata, yang bersama-sama dengan kebiasaan dan undang-undang harus diperhatikan pihak-pihak dalam melaksanakan perjanjian. Sudah tentu undang-undang yang dimaksud oleh ketentuan ini adalah undang-undang pelengkap karena undang-undang yang bersifat memaksa tidak dapat disimpangi oleh pihak-pihak.

Bagaimana hubungan antar kepatutan dan undang-undang telah dibicarakan ketika kita mengupas ps. 1338 KUH Perdata yang mana berdasarkan praktek peradilan disimpulkan bahwa kepatutan itu dapat mengubah isi perjanjian.

Yang menjadi masalah dalam membicarakan ketentuan-ketentuan di atas, ialah tentang hubungan masing-masing elemen perjanjian, apa yang dimaksud dengan

kebiasaan dan bagaimanakah hubungan antara kebiasaan dan undang-undang.

Dalam praktek peradilan ternyata kemudian bahwa urutan-urutan sebagaimana yang ditentukan oleh ps. 1339 KUH Perdata itu mengalami perubahan, di mana peradilan menyimpulkannya dari apa yang diatur oleh pasal. 3 A.B.(*Algemene Bepalingen*). Pasal itu menentukan bahwa kebiasaan hanya diakui sebagai sumber hukum apabila ditunjuk oleh undang-undang.

Dengan dasar itu peradilan menempatkan Undang-undang di atas kebiasaan, sehingga di dalam kenyataannya urutan-urutan elemen itu lalu menjadi :

1. Isi perjanjian
2. Undang-undang
3. Kebiasaan
4. Keputusan

Apakah yang dimaksud dengan kebiasaan ?

Kebiasaan yang dimaksud oleh ps. 1339 KUH Perdata adalah kebiasaan pada umumnya (*gewoonte*) dan kebiasaan yang diatur oleh ps. 1347 KUH Perdata ialah kebiasaan

setempat (khusus) atau kebiasaan yang lazim berlaku di dalam golongan tertentu (*bestending gebruikelijk beding*).

Di dalam praktek peradilan, maka kita melihat perbedaan tentang hubungan antara kebiasaan umum dengan undang-undang dan hubungan antara kebiasaan setempat dengan undang-undang.

Keputusan H.R. 26 Juni W. 8729 mengenai sengketa pembayaran uang sewa menunjukkan bahwa kebiasaan umum tidak dapat menyimpangi undang-undang. Undang-undang menentukan bahwa hutang uang adalah merupakan hutang yang diantarkan (*brenschuld*), ps. 1393 KUH Perdata.

Merupakan kebiasaan pembayaran sewa diambil oleh pemilik rumah kepada penyewa. Seorang penyewa berpegang pada kebiasaan itu dan tidak mau mengantarkan pembayaran sewa kepada pemilik rumah. Demikian juga pemilik rumah berpegang kepada undang-undang dan menunggu pembayaran sewa itu diantarkan oleh penyewa kepadanya. Di depan pengadilan, maka diputuskan bahwa yang dipertahankan adalah ketentuan undang-undang.

Keputusan H.R. April 1932 (N.J. 1932, 1613) mengemukakan sebagai berikut :

A menjual lembu kepada B yang akan diserahkan kemudian. Kemudian lembu itu sakit. Dengan menggunakan ps. 1460 KUH Perdata maka pembeli harus menerima lembu yang sakit itu dan harus membayar harganya ( Resiko ada di A/pembeli).

Kebiasaan yang berlaku di tempat, mengenai perdagangan hewan ialah bahwa lembu yang dijual dan belum diserahkan adalah menjadi tanggungan penjual, pembeli tidak harus menerima dan membayarnya. Pembeli menuntut akan kebiasaan itu. Dalam keputusannya pengadilan berpendapat bahwa kebiasaan yang berlaku itu (menurut isi ps. 1347 KUH Perdata) walaupun tidak dinyatakan secara tegas, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, dan karena itu merupakan bagian dari perjanjian. Dan dalam hal perjanjian yang secara tegas dibuat dapat menyimpangi undang-undang maka kebiasaan inipun dapat menyampingkan undang-undang. Jadi pada kasus ini resiko ditanggung oleh penjual.

Kesimpulannya ialah :kebiasaan yang tersebut dan ps. 1347 KUH Perdata lebih tinggi derajatnya dari undang-

undang tetapi kebiasaan tersebut dalam ps. 1339 lebih rendah derajatnya dari undang-undang.

Banyak penulis hukum berpendapat sebenarnya kebiasaan yang dimaksudkan oleh ps. 1339 dan ps. 1347 KUH Perdata itu adalah sama karena membicarakan pokok yang sama. Keduanya ditulis dalam undang-undang ialah untuk meyakinkan bahwa dalam melaksanakan perjanjian faktor kebiasaan itu harus dipertahankan.

e. Pelaksanaan Perjanjian.

Pelaksanaan perjanjian adalah melaksanakan apa yang menjadi obyek dari perjanjian yaitu melaksanakan suatu prestasi.

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata prestasi itu dibedakan atas :

1. Perjanjian untuk memberikan sesuatu. Berdasarkan Pasal 1235 KUH Perdata "Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu termaktub kewajiban yang berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik sampai pada saat penyerahan". Dari ketentuan tsb. Dapat disimpulkan bahwa perjanjian untuk memberikan sesuatu barang adalah perjanjian untuk menyerahkan (*leveren*) dan merawat barang

sampai pada saat penyerahan dilakukan. Kewajiban menyerahkan merupakan kewajiban pokok dan kewajiban merawal merupakan kewajiban preparatoir.<sup>59))</sup>

Perjanjian dengan obyek ini misalnya jual beli, tukar menukar, penghibahan, sewa menyewa dan pinjam pakai.

2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu. Perjanjian dengan obyek ini antara lain perjanjian untuk memegang barang, perjanjian perburuhan, perjanjian untuk membangun rumah dll. Apabila yang berhutang tidak memenuhi kewajiban di dalam perjanjian untuk berbuat sesuatu, maka diselesaikan dengan memberikan ganti rugi berupa biaya rugi, dan bunga (Pasal 1239 KUH Perdata).
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Perjanjian dengan obyek ini misalnya perjanjian untuk tidak berbuat gaduh dll. (semua perjanjian untuk tidak melakukan sesuatu/berbuat sesuatu). Dalam perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu pihak berpiutang adalah pihak yang berhak menuntut akan penghapusan segala yang telah dibuat berlawanan dengan yang diperjanjikan dan pihak berpiutang boleh meminta dikuasakan oleh hakim untuk menyuruh menghapuskan

---

<sup>59))</sup> Ibid, hal.14

segala sesuatu yang telah dibuat tsb., diatas biaya yang berhutang, dengan tidak mengurangi hak menuntut penggantian biaya, rugi, bunga, jika ada alasan untuk itu.

Ketiga prestasi tersebut diatas menurut ketentuan Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, pelaksanaannya harus dilakukan dengan itikad baik. Maksudnya pelaksanaan perjanjian tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Dalam pasal 1339 KUH Perdata juga dinyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

#### f. . Wanprestasi

Setiap pihak yang membuat perjanjian, terutama pihak kreditur sangat menghedaki agar pelaksanaan perjanjian di usahakan dengan sempurna secara sukarela sesuai dengan isi perjanjian.

Akan tetapi tentu tidak semua berjalan sebagaimana mestinya, boleh jadi debitur "ingkar secara sukarela"

mencapai pelaksanaannya. Hal inilah yang akan menimbulkan wanprestasi.

“Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda” *Wanprestatie*”, yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Menurut Subekti<sup>61)</sup> wanprestasi terjadi apabila seorang debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan akan dilakukannya, maka dikatakan bahwa ia melakukan wanprestasi. Ia adalah alpa atau lalai atau beacidera janji atau ia melanggar perjanjian, yaitu apabila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

Jadi seorang debitur dikatakan wanprestasi apabila:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

---

<sup>61)</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1990, hal.43



Untuk terjadinya wanpresrasi tidak secara otomatis atau langsung dinyatakan oleh kreditur kepada debitur, kecuali kalau sudah disepakati para pihak yang membuat perjanjian. Kreditur sebelum menyatakan bahwa debitur wanprestasi terlebih dahulu melaksanakan upaya hukum yang dinamakan "*Ingebreke Stelling*" atau pernyataan lalai kepada debitur.

Mengenai pernyataan lalai, ditegaskan dalam pasal 1238 KUH. Perdata.

Dalam hal debitur melakukan wanpretasi, maka ia wajib menggati kerugian yang timbul. Akan tetapi untuk itu harus ada hubungan sebab akibat atau kausal antara wanprestasi dan kerugian.

Tentang kerugian apa saja yang dapat dituntut kreditur, diatur dalam pasal 1246 KUH Perdata yaitu penggantian perongkosan, kerugian dan bunga yang boleh di tuntut kreditur adalah kerugiann yanga diderita kreditur dan keuntungan yang akan ia peroleh seandainya perjanjian dipenuhi.<sup>61)</sup>

---

<sup>61)</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hal.65

## 2. Perjanjian Jaminan

### a. Perjanjian Jaminan secara umum dan secara khusus.

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian accessoir (tambahan) dari perjanjian kredit (perjanjian pokok).

Jaminan merupakan salah satu syarat untuk dikabulkannya permohonan pemberian kredit oleh bank atau lembaga-lembaga kredit lainnya.

Ketentuan mengenai jaminan diatur dalam ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yaitu segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

Menurut perumusan yang diberikan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut diatas, memberikan suatu pengertian bahwa semua harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada akan menjadi pemenuhan hutangnya kepada si berpiutang. Jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur disebut jaminan umum, artinya benda jaminan itu tidak ditunjuk secara khusus dan tidak diperuntukkan bagi seorang

6 kreditur. Sedang hasil penjualan benda jaminan itu dibagi-bagi diantara para kreditur seimbang dengan piutangnya masing-masing.<sup>62)</sup>

Adanya jaminan merupakan unsur yang penting sebab apabila suatu kredit diberikan tanpa jaminan atau dengan jaminan yang tidak mencukupi akan mengandung bahaya yang besar bagi kreditur. Karena keadaan yang tidak menguntungkan dapat saja terjadi menimpa debitur yang mengakibatkan debitur tidak sanggup untuk mengembalikan kreditnya sebagai mana mestinya.

Mengenai jaminan secara umum, dalam prakteknya sering dirasakan kurang aman. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan harta kekayaan debitur pada suatu waktu bisa kreditur, sehingga bila terdapat banyak kreditur maka ada kemungkinan beberapa orang dari kreditur tidak mendapat pemenuhan dari piutangnya. Untuk mengatasi hal itu kreditur memerlukan adanya benda-benda tertentu atau orang tertentu, yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya dan itu hanya berlaku bagi kreditur tersebut.

---

<sup>62)</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta. 1980, hal.45

Dengan kata lain kreditur memerlukan adanya jaminan yang memerlukan adanya jaminan yang dikhususkan baginya baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan. Inilah yang disebut jaminan secara khusus.

Jaminan yang bersifat khusus ini timbul karena perjanjian yang khusus diadakan diantara pihak kreditur dan pihak debitur yang dapat berupa jaminan yang bersifat perorangan dan jaminan yang bersifat kebendaan. Jaminan yang bersifat kebendaan artinya adanya benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan, sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi bila pihak debitur melakukan wanprestasi.<sup>63)</sup>

### 3. Perjanjian Baku.

Dewasa ini berkembang bentuk perjanjian yang isinya ditentukan secara sepihak dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Pihak lawan hanya diberi kesempatan untuk setuju atau tidak setuju terhadap isi perjanjian yang telah dibakukan ini. Perjanjian semacam ini dikenal dengan perjanjian standart atau perjanjian

---

<sup>63)</sup> Ibid, hal.46

baku.

Perjanjian baku lahir karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yang artinya memberikan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian berisi apa saja asalkan memenuhi syarat sah nya perjanjian dan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Menurut Purwahid Patrik<sup>64)</sup>, perjanjian baku adalah suatu perjanjian, yang didalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak, yang umumnya disebut perjanjian *adhesion* atau perjanjian baku.

Pihak lawan yang menyusun kontrak, umumnya disebut "*adherent*", berhadapan dengan yang menyusun kontrak. Ia tidak mempunyai pilihan. Dalam hal ini penyusun kontrak mempunyai kedudukan monopoli, atau dengan demikian dikehendaki bahwa perusahaan lain supaya mempergunakan syarat-syarat yang sama. Terserah mau mengikuti atau menolak. Penyusun kontrak bebas dalam membuat redaksinya, sehingga pihak lawan berada dalam keadaan dibawah kekuasaannya.

Pengertian perjanjian baku menurut Hondius adalah konsep janji-janji tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian

konsep janji-janji tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat yang jumlahnya tak tentu, tanpa membicarakan terlebih dahulu isinya.<sup>65)</sup>

Syarat baku yang disebutkan diatas, umumnya juga dinyatakan sebagai perjanjian baku. Jadi pada azasnya isi perjanjian yang dibakukan adalah tetap dan tidak dapat diadakan perundingan lagi. Inilah yang menimbulkan masalah bahwa kebebasan berkontrak telah digerogoti dan akhirnya apakah masih dapat dikatakan adanya persesuaian kehendak dari pihak-pihak yang seimbang dalam perjanjian.

Secara yuridis yaitu siapa yang menandatangani suatu perjanjian baku telah terikat dengan isi dari perjanjian itu, meskipun pihak lain tidak punya pilihan.

Ciri dari perjanjian baku adalah sifat uniform dariu syarat-syarat perjanjian untuk semua perjanjian yang sama. Keuntungan dari penyusun kontrak adalah nyata bahwa semua pelanggan dalam perusahaan akan mempunyai syarat-syarat yang sama dalam mengadakan transaksi perdagangan.

---

<sup>65)</sup> Hondius, *Compendium Hukum Belanda*, Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia-Belanda, 1978, hal.140

Demikian pula bagi peserta perjanjian akan mendapatkan keuntungan dengan menghemat biaya dalam hal penyerahan jasa atau barang sesuai dengan harga yang normal berlaku dalam mekanisme pasar. Bermanfaat kiranya dilihat dari sudut ekonomi banyak aspek-aspek untuk dibakukan dalam organisasi perusahaan yang saling bergantung.

Dalam perkembangannya perjanjian baku banyak digunakan dalam bidang perkrediatan, dunia usaha, sewa menyewa, perusahaan asuransi dsb.

Ada beberapa macam bentuk perjanjian baku menurut Mariam Darus Badruzaman<sup>66)</sup> yaitu :

- a. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya di

Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai obyek-obyek hak atas tanah.

- b. Perjanjian baku yang ditentukan dalam lingkungan Notaris atau Advokat. Maksudnya perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan

---

<sup>66)</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 1981, hal.49

dari anggota masyarakat yang minta bantuan Notaris atau Advokat.

Berlakunya perjanjian baku adalah dengan jalan disertakan dalam perjanjian tersebut. Adapun cara-cara pengikutsertaan syarat-syarat baku adalah sebagai berikut :

a. Penandatanganan.

Yaitu pihak yang satu menyodorkan formulir perjanjian dan pihak yang lain tinggal menandatangani.

b. Pemberitahuan diatas dokumen-dokumen kontrak syarat-syarat baku tersebut diberitahukan pada pihak lainnya dengan jalan pertukaran dokumen kontrak yang mana pihak lawan diberi kesempatan untuk mempelajari isi syarat-syarat baku. Apabila ia setuju dengan syarat itu, ia tinggal menandatangani.

c. Penunjukan dalam dokumen kontrak.

Apabila di dalam suatu kontrak tidak menunjuk syarat-syarat baku maka yang berlaku adalah syarat-syarat tersebut, tetapi jika masing-masing pihak menunjuk syarat-syarat baku selama tidak bertentangan maka kedua syarat tetap berlaku, namun jika ada perbedaan maka yang berlaku adalah penunjukkan yang pertama.



d. Pemberitahuan diatas papan pengumuman.

Dalam penunjukkan syarat-syarat baku dalam papan pengumuman harus dapat dilihat dengan jelas dan mudah dibaca oleh pihak lain. Dengan demikian setiap orang yang mengadakan kontrak dengan syarat-syarat baku dengan sendirinya penunjukkan pada pengumuman tersebut telah menjadi bagiannya, meskipun tidak dimasukkan dalam kontrak itu.

4. Perjanjian *Credit Card* Pada Khususnya.

a. Perjanjian Penerbitan *Credit Card*.

Perjanjian penerbitan *credit card* merupakan perjanjian antara bank penerbit *credit card* (*issuer*) dengan calon pemegang *credit card* (*cardholder*). Perjanjian penerbitan *credit card* adalah perjanjian antara satu pihak (bank) yang setuju untuk menerbitkan *credit card* kepada pihak lain yang dimanfaatkan untuk pembayaran barang atau mengambil uang (kredit) di bank, atau ditempat-tempat yang ditunjuk oleh bank. Sesuai dengan namanya, perjanjian penerbitan *credit card* termasuk ke dalam golongan perjanjian kredit.

Perjanjian penerbitan *credit card* merupakan suatu pemberian fasilitas kredit oleh suatu bank penerbit kepada pemegang kartu. Penerbitan suatu *credit card* diawali dengan permintaan yang dengan penawaran *credit card*. Pada saat penawaran tersebut akan dijelaskan tentang fasilitas tertentu yang akan diperoleh, dengan mempergunakan *credit card* produknya masing-masing.

Apabila penawaran dan perusahaan atau bank penerbit *credit card* yang ditawarkan disambut dan dapat diterima dan diminati oleh calon pemegang *credit card*, maka yang bersangkutan mengajukan permintaan menjadi pemegang kartu. Bila permintaan memenuhi syarat dan dapat diterima oleh penerbit, maka terjadilah kata sepakat yang merupakan awal dari hubungan hukum antara perusahaan penerbit *credit card* atau bank dengan calon pemegang *credit card*. Kata sepekat tersebut akan menjadi dasar terjadinya perjanjian. Bentuk perjanjian penerbitan *credit card* adalah perjanjian haku (*standart contract*).

Dalam perjanjian penerbitan kartu kredit (*credit card*) timbul hubungan kewajiban dan hak. Pemegang kartu wajib

menyctorkan dana kepada Penerbit, dan Penerbit wajib menerbitkan kartu kredit kepada pemegang kartu.<sup>67)</sup>

b. Perjanjian Penggunaan Credit Card.

1. Perjanjian antara bank penerbit *credit crad* dengan perusahaan atau pedagang yang menerima pembayaran dengan *credit card (merchant)*.

Secara umum perjanjian antara bank penerbit *credit card* dengan *merchant (merchant agreement)* diartikan sebagai perjanjian antara *card issuer* dengan *merchant* dengan maksud, pihak *merchant* bersedia menerima *credil card* sebagai alat pembayaran atas transaksi terhadap barang atau jasa dengan *card holder*, dan pihak bank penerbit berkewajiban melakukan pembayaran terhadap *merchant* atas transaksi tersebut, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak.

Perjanjian antara kedua belah pihak diawali dengan kata sepakat sebagai dasar perjanjian untuk melakukan

---

<sup>67)</sup> Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hal.267

kerjasama. Pada umumnya perjanjian ini juga merupakan perjanjian baku, yang syarat-syaratnya sudah ditentukan oleh Penerbit secara sepihak.

2. Perjanjian antara pemegang *credit card* dengan perusahaan atau pedagang yang menerima pembayaran dengan *credit card* (*merchant*).

Perjanjian antara pemegang *credit card* dengan *merchant*, sebagian besar merupakan bentuk perjanjian jual beli atas barang atau jasa. Perjanjian antara pemegang *credit card* dengan *merchant* bersifat insidental dan sementara. Insidental dalam artian bahwa perjanjian tersebut terjadi pada saat itu, dan berakhir pada saat itu juga atau sementara.

Perjanjian antara pemegang *credit card* dengan *merchant* merupakan perjanjian hubungan timbal balik. Dalam transaksi ini *merchant* berkewajiban menyerahkan atau memberikan barang dan atau jasa yang ditransaksikan, dan pemegang *credit card* berkewajiban membayar harga barang atau jasa tersebut.

Dalam transaksi dengan menggunakan *credit card* sebagai alat pembayaran, terjadi bahwa meskipun pemegang

*credit card* sudah menikmati barang dan atau jasa yang sudah ditransaksikan secara riil, pihak *merchant* baru menerima pembayaran secara riil setelah syarat dan prosedur terpenuhi untuk menagih kepada bank penerbit, baru kemudian dilaksanakan pembayaran setelah dikurangi komisi yang diperjanjikan dengan penerbit.

Dalam perjanjian penggunaan kartu kredit (*credit card*) pemegang kartu wajib membayar harga barang/jasa kepada penjual dengan menunjukkan kartu kredit dan menandatangani tanda lunas pembayaran, penjual wajib menyerahkan barang/jasa kepada pemegang kartu sebagai pembeli, dan penerbit wajib membayar kepada penjual yang menyodorkan tanda lunas pembayaran yang ditandatangani oleh pemegang kartu.<sup>68)</sup>

## 5. Karakteristik Yuridis Dari *Credit Card*.

### a. Perjanjian Tentang *Credit Card*.

Seperti telah disebutkan dimuka didalam *credit card* tersangkut paling tidak tiga pihak yaitu penerbit, pemegang dan

---

<sup>68)</sup> Ibid, hal. 267

penjual barang dan atau jasa. Hal tersebut bisa dibagi dalam dua kategori yaitu (1) perjanjian penerbitan *credit card* dan (2) perjanjian penggunaan *credit card*.

Perjanjian penerbitan *credit card* merupakan perjanjian antara pihak penerbit dengan pemegang *credit card*. Dalam hal ini terjadi perjanjian bilateral, bukan perjanjian segitiga. Karena kala perjanjian dibuat, kalau ada pihak ketiga, dalam hal ini pihak penjual barang dan atau jasa. Dan juga karena bisa saja penggunaan *credit card* tidak melibatkan sama sekali pihak ketiga, yaitu misalnya jika pemegangnya ingin mendapatkan uang cash, baik lewat mesin teller, ataupun lewat bank lain, atau langsung ke penerbitnya.

Dalam hal ada pihak bank-bank lain yang terlibat misalnya sebagai perantara pelunasan cicilan oleh pemegang *credit card* atau sebagai perantara penagihan harga barang, kedudukan pihak-pihak tersebut hanyalah sebatas sebagai agen saja dari pihak penerbit. Jadi mereka bekerja bukan atas kapasitasnya sendiri melainkan untuk dan atas nama penerbit.

Sementara perjanjian penggunaan *credit card* merupakan perjanjian tertulis (dalam bentuk standart/baku) atau bisa juga tidak tertulis (tetapi hal ini jarang terjadi) yang terjadi antara para

pihak yang terkait tersebut pada gilirannya dapat berbentuk perjanjian tiga pihak.

Perjanjian segitiga tentang penggunaan *credit card* mestilah dianggap sebagai *accessoir* dari perjanjian pokoknya berupa perjanjian penerbitan *credit card* antara penerbit dengan pemegang. Sebab sewaktu pembeli barang/jasa dengan menggunakan *credit card* sudah ada understanding, bahwa harga pembelian akan dibayar oleh pihak penerbit. Jadi pembeli tidak dalam kapasitas untuk membayar secara lunas atau dengan alat pembayaran lain ataupun selainnya dengan menggunakan kartu kredit tersebut. Sehingga jual beli tersebut memang dari semula ingin dikaitkan dengan penggunaan *credit card* tersebut. Konsekuensi yuridisnya, jual beli tersebut akan batal jika misalnya perjanjian penerbitan kartu kredit antara pemegang kartu dengan pihak penerbitnya batal. Misalnya karena ada penipuan tentang kapasitas atau accountnya pihak pemegang tersebut yang dilakukan oleh pihak pemegangnya sendiri.

Tetapi jika misalnya pihak penerbit tidak mau membayarnya bukan dengan alasan batalnya perjanjian pokok (*in casu* perjanjian penerbitan) maka di samping pembatalan jual beli, pihak penjual masih punya upaya hukum lain, yaitu menggugat langsung

UPT-PUSTAKA-INDO

pihak penerbit, dengan alasan bahwa dia telah mengikat dirinya untuk membayar dengan diberikannya otorisasi ( biasanya lewat telepon) kepada penjual untuk menjual barang /jasanya kepada pembeli tersebut dengan pemakaian *credit card*.

b. Credit Card Sebagai Alat Bayar (Alat Tukar Pengganti Uang).

Sebagaimana kita ketahui bahwa jenis alat bayar yang termasuk dalam surat Berharga, yang diatur dalam KUH Dagang adalah cek, wesel. Aksep dsb. Sedangkan *credit card* juga merupakan alat bayar tetapi keberadaannya tidak diatur dalam KUH Dagang. Dalam hal ini apakah suatu *credit card* dapat juga dikategorikan sebagai suatu surat berharga menurut sistem hukum kita.

Sebenarnya suatu surat berharga mempunyai tiga fungsi utama sebagai berikut : <sup>69)</sup>

- a. Sebagai alat bayar (alat tukar pengganti uang).
- b. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (dapat diperjualbelikan).
- c. Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi).

Ternyata sungguhpun kartu kredit telah mirip dengan surat

---

<sup>69)</sup> Munir Fuady, Op.cit, hal.239



berharga, tetapi dalam pengertian hukum belumlah dapat dipandang suatu surat berharga. Sebab jika diliha dari ketiga fungsi surat berharga tersebut, hanya fungsi yang pertama yang dipenuhi oleh suatu surat berharga, Yaitu fungsinya sebagai alat penmbayaran (pengganti uang kontan). Sedangkan fungsi kedua tidak terpenuhi sama sekali, Sementara fungsi ketiga juga tidak terpenuhi, walaupun secara tidak langsung hak tagih tersebut dapat dipenuhi tetapi bukan oleh kartu kredit, melainkan oleh slip pembayaran yang telah ditandatangani oleh pemegang *credit card*.

### BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. HASIL PENELITIAN.

#### 1. Operasionalisasi Pengaturan Perusahaan Penerbit *Credit Card*/Bank Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia.

Kartu Kredit (*credit card*) adalah suatu produk perbankan (perusahaan pembiayaan) yang mempunyai tujuan, memberikan fasilitas kredit. Dalam hal ini, *credit card* merupakan kredit konsumtif. Artinya, bahwa pemberian fasilitas kredit tersebut bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan barang dan atau jasa yang bersifat konsumtif, yang dapat dimanfaatkan oleh pemegang kartu yang bersangkutan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa fungsi dan kegunaan *credit card* adalah sebagai salah satu alat pembayaran.

Penerbit *credit card*, adalah Bank/Perusahaan Pembiayaan sebagai pihak dalam perjanjian Penerbitan Kartu Kredit.

Dalam mengoperasikan *credit card* (kartu kredit sebagai salah satu alat pembayaran pihak Bank/Perusahaan Pembiayaan harus melakukan kegiatan-kegiatan sehingga *credit card* (kartu kredit) bisa berlaku secara efektif di masyarakat.

### 1.a. Kegiatan Operasionalisasi Penerbitan Credit Card. (Kartu Kredit).

Dalam pelaksanaan *credit card* sebagai alat pembayaran, berdasarkan penelitian lapangan terdapat banyak kegiatan yang harus dilakukan oleh pihak penerbit/Bank untuk mengembangkan dan mengoperasikan program kartu kredit yang efektif. Kegiatan tersebut adalah :

#### 1.a.1. Kegiatan awal pra penerbitan *credit card* (kartu kredit)

##### 1.a.1.a. Pemasaran.

Kegiatan pemasaran dapat berkaitan dengan sisi pemegang kartu dan sisi pedagang . Sisi pedagang cenderung disediakan oleh lembaga-lembaga yang besar dengan jasa-jasa perbankan yang kuat. Karena bisnis kartu kredit adalah membangun volume rekening dan mengembangkan penggunaan kartu.

Kegiatan pemasaran untuk memperoleh kartu meliputi

- Iklan dan promosi untuk memberitahu nasabah-nasabah lembaga keuangan dan nasabah lainnya

bahwa ia menawarkan suatu jasa-jasa kartu kredit.

Kegiatan seperti ini membutuhkan media, brosur-brosur.

- Kampanye langsung dengan mengirimkan bahan-bahan keterangan dan aplikasi kepada para nasabah. Banyak dari aplikasi ini berupa formulir ringkas yang telah disetujui.
- Solisitasi langsung dari nasabah ketika mereka datang ke lembaga keuangan/Bank. Cara lain yang digunakan untuk menseponsori program penggajian kartu adalah dengan memberikan hadiah-hadiah yang menarik.

1.a.1.b. Pencantuman Syarat-syarat Permohonan Pembuatan Credit Card  
(Kartu Kredit).

- Syarat Umum <sup>71)</sup>

merupakan syarat yang secara umum diminta oleh Bank.

- 1) Applicant pemohon berumur 17 - 65 tahun.

---

<sup>71)</sup> Data "PT. Bank BNI 1946 (Persero) Tbk", "Bank Internasional Indonesia", "Bank Bali".

2) Mempunyai pendapatan yang memadai bagi seorang karyawan dengan syarat :

- a) melampirkan KTP/Pasport yang masih berlaku.
- b) Melampirkan surat keterangan penghasilan yaitu slip gaji asli.

Dengan maksud untuk mendapat sebuah kartu kredit, *visa/mastercard*.

Contoh :

- BII Reguler *Visa/Mastercard* minimum penghasilan kotor adalah 15 juta pertahun dan BII Gold *Visa/Mastercard* adalah 45 juta pertahun.
- Bank Bali Reguler *Visa /Mastercard*, minimum penghasilan kotor adalah 15 juta pertahun dan Bank Bali Gold *Visa/Mastercard* adalah 50 juta pertahun.

Jadi hanya orang yang mempunyai penghasilan seperti yang tersebut diatas yang dapat memiliki kartu kredit. Dengan ditetapkannya penghasilan diatas, pemilik kartu yang bersangkutan dapat melunasi semua hutang-hutangnya.

- c) Melampirkan surat keterangan kerja yaitu SK Pangkat terakhir bagi PNS, TNI, POLISI.
- d) Melampirkan surat ijin profesi, bagi profesional.

- e) Melampirkan SIUP, bagi pengusaha.
- 3) Mengisi data pribadi (nama lengkap, nama yang dikehendaki pada kartu, tanggal lahir/umur, jenis kelamin, nomor KTP. Batasan usia untuk pemegang kartu kredit utama adalah minimal 21 tahun, maksimum 80 tahun).
- 4) Alamat tempat tinggal.
  - (1) Alamat rumah secara lengkap
  - (2) Lama tinggal.
  - (3) Status rumah.
  - (4) Fasilitas rumah.
  - (5) Jumlah tanggungan sekeluarga.
- 5) Data pekerjaan
- 6) Jumlah penghasilan.
- 7) Referensi kartu kredit yang lain.
- 8) Anggota keluarga.
- a. Syarat Tambahan.
  - 1) iuran tambahan;
  - 2) iuran tahunan;
  - 3) iuran pangkal.

#### - Syarat Khusus

Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh Karyawan, Pengusaha dan Tenaga Profesional adalah :

- Foto copy KTP atau Paspor.
- Foto copy rekening koran atau rekening tabungan 3 bulan terakhir.
- Pas Photo ukuran paspor.
- Khusus untuk yang ingin memiliki kartu kredit Spesial Gold, maka harus disertai dengan fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Selain dari syarat-syarat yang tersebut diatas, maka terdapat syarat yang lain yaitu :

Untuk karyawan harus dilengkapi dengan surat rekomendasi dari perusahaan yang menerangkan mengenai jabatan, pendapatan dan masa kerja;

Untuk pengusaha harus dilengkapi dengan akte perusahaan atau surat izin usaha perdagangan (SIUP);

Untuk tenaga profesional harus dilengkapi dengan surat izin praktek.

#### - Syarat Kelayakan Kredit.

Peninjauan kelayakan pemberian kartu kredit pada prinsipnya sama dengan cara-cara pada peninjauan (*review*) pada peninjauan komersial lainnya, yang berdasarkan :<sup>72)</sup>

a. *Character* (watak).

Adalah penilaian karakter dan kredibilitas dari calon *cardholder* (pemegang kartu kredit).

Masalah *character* ini sampai saat ini masih dinilai sebagai faktor yang dominan, sebab walaupun calon debitur tersebut cukup mampu untuk membayar hutangnya, namun apabila yang bersangkutan tidak mempunyai itikad baik, maka akan membawa kesulitan bagi bank di kemudian hari. Untuk menilai *character* memang sulit, karena setiap manusia mempunyai watak yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, para pengelola kredit (*Account Officer*) dituntut mempunyai ketrampilan psikologis praktis untuk mengenali watak dari calon debiturnya.

Sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang *character* dari calon debitur tersebut dapat dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut :

---

<sup>72)</sup> Wawancara, *Account Officer* "Bank BNI 1946 (Persero) Tbk", Surakarta.



- 1) melakukan penelitian atas riwayat hiddup calon debitur;
- 2) penelitian reputasi calon debitur di lingkungan masyarakat, lingkungan kerja atau lingkungan usaha;
- 3) menerima informasi dari bank-bank lain yang dapat memberikan informasi tentang calon debitur;
- 4) meneliti ketekunan kerja, hobi dan kegiatan-kegiatan lain, misalnya apakah yang bersangkutan mempunyai sifat foya-foya, konsumtif dan sebagainya.

Ternyata untuk dapat mengambil kesimpulan tentang *character* ini diperlukan pengalaman dan ketrampilan yang cukup untuk menilainya.

b. *Capacity* (kemampuannya).

*Capacity* yaitu penilaian mengenai kesimpulan calon debitur untuk melunasi hutang-hutangnya. Penilaian mengenai kemampuan debitur dilakukan dengan upaya penelitian terhadap informasi keuangan yang diperoleh dari pengisian lembar aplikasi, melalui penghasilan pertahun, penghasilan lain-lain, jumlah tanggungan rekening koran tabungan pinjaman yang dimiliki serta kartu kredit yang lain yang dimiliki. Tujuan dari penilaian terhadap *capacity*

adalah untuk menilai kemampuan financial debitur untuk melunasi kredit tepat pada waktu yang telah diperjanjikan.

c. *Capital* (modal).

Modal dalam hal ini adalah ukuran tentang sumber-sumber yang dimiliki oleh calon pemegang kartu kredit. Sumber-sumber yang dimaksud adalah sumber pendapatan yang dimiliki calon pemegang kartu kredit, karena salah satu modal untuk dapat memenuhi kewajibannya melunasi kredit yang diberikan berasal dari pendapatan yang diperoleh baik per bulan maupun per tahun.

d. *Collateral* (Agunan).

*Collateral* adalah jaminan dari pemegang bila tidak memenuhi prestasi. Perjanjian penerbitan kartu kredit tidak mensyaratkan adanya jaminan. Namun secara tidak langsung apabila pemegang kartu kredit melakukan wanprestasi, pihak bank dapat langsung mengeksekusi barang milik pemegang kartu yang nilainya cukup berharga, dengan tanpa diperjanjikan sebelumnya. Informasi mengenai barang-barang yang dimiliki pemegang kartu dapat diketahui pihak bank dari lembar aplikasi. Dalam memberikan kredit bank tetap berpedoman Pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 1998 meskipun

tidak disebutkan secara langsung mengenai jaminan kreditnya, tetapi barang-barang berharga milik pemegang kartu secara tidak langsung berfungsi sebagai jaminan kredit.

e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi).

Kondisi ekonomi calon pemegang kartu kredit mutlak perlu menjadi pertimbangan. Kondisi ekonomi calon pemegang kartu kredit dapat diketahui dalam lembaran aplikasi mengenai informasi pribadi calon pemegang kartu, informasi pekerjaan, informasi keuangan dan informasi pemegang kartu tambahan. Apabila calon pemegang kartu utama juga berniat untuk minta diterbitkan kartu tambahan, maka dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi yang bersangkutan cukup responsibel. Dengan demikian, kondisi ekonomi calon pemegang kartu kredit dapat menunjukkan bonafiditas debitur dalam memenuhi kewajibannya.

1.a.1.c. Pelayanan Terhadap Pemegang Kartu dan Pedagang.

- Pelayanan Umum.

Pelayanan terhadap pemegang kartu biasanya ditangani di kantor pusat, tetapi bisa juga merupakan fungsi sebuah cabang.

Kegiatan pelayanan pemegang kartu meliputi :

- \* Menjawab pertanyaan dan menyelesaikan informasi langganan dan nasabah akunting, yang diterima per pos, telepon atau orang;
- \* Memperbaharui arsip-arsip informasi pemegang kartu;
- \* Mengambil kembali wesel penjualan yang diminta dari lembaga keuangan pedagang;

Kegiatan pelayanan untuk pedagang meliputi :

- \* Memelihara pembekalan rencana kartu untuk pedagang.
- Menetapkan dan mengubah tingkat potongan bagi pedagang sehubungan terhadap volume transaksi.

#### - Pelayanan Pemberian Kredit.

Pemberian kredit ini erat kaitannya dengan pemasaran untuk para pemegang kartu baru.

Pemberian kredit ini juga berperan penting dalam hal meningkatkan hasrat dan kemampuan meningkatkan limit kredit. Sifatnya pelayanan kartu memungkinkan seseorang melampaui limit kreditnya tanpa pengetahuan dan kontrol lembaga keuangan itu. Adalah sangat penting untuk mengontrol limit-limit kredit, terutama terhadap pemegang kartu yang latar belakangnya

kurang dikenal. Pihak bank biasanya akan memberikan limit kredit yang lebih rendah dan tanggal habis kartu yang lebih cepat terhadap kliem-kliem yang kurang dikenal.

Kegiatan pemberian kredit meliputi :

- a. Meninjau daftar nasabah-nasabah untuk menentukan pemegang kartu yang potensial dan yang telah disetujui sebelumnya;
- b. Menyetujui atau menolak permohonan untuk kartu-kartu dan menetapkan limit kredit;
- c. Mengesahkan penerbitan kartu dan pengadaan rekening serta mengesahkan penerbitan ulang kartu ;
- d. Memikul tanggung jawab untuk kredit yang diberikan melalui kartu yang diterbitkan.

Pada umumnya prosedur pemberian kredit yang lemah dapat menimbulkan masalah penagihan di masa depan. Pengawasan terhadap rekening yang menunggak merupakan fungsi yang sangat penting. Apabila suatu kartu tidak ditagih, maka pemilik yang nakal dapat terus menambah utangnya. Hal seperti ini yang dapat menimbulkan menunggaknya sejumlah rekening -rekening.

Kegiatan penagihan meliputi :

- Menghimpun dan menilai informasi tentang rekening yang menunggak;
  - Menagih rekening yang menunggak;
  - Mengadakan program-program latihan penagihan.
- Pelayanan Pengolahan Kartu.

Pemegang kartu dapat memperoleh uang tunai dari bank mana saja yang ikut serta dalam rencana kartu bank yang sama. Pemegang kartu cukup mengajukan kartunya di kantor bank itu dan meminta sejumlah uang tunai. Kasir akan mencap kartu itu pada sebuah formulir persekot tunai dan mensahkan suatu pembebanan. Setelah persekot tunai disetujui, pemegang kartu diberi sejumlah uang yang diminta.

Bank menangani formulir persekot tunai seperti menangani formulir pembebanan yang disampaikan ke pusat pengolahannya. Jika pemegang kartu ditagih oleh pusat pengolahan, maka data dikirimkan secara elektronik ke pusat pengolahan yang tepat. Bank pemegang kartu akan membayar suatu fee pada Bank penerbit kartu, jika banknya berbeda.

Hal-hal yang harus dilakukan oleh pusat pengolahan terhadap pemegang kartu adalah :

- Memelihara informasi rekening pemegang kartu;
- Menangkap informasi setiap hari dari lembaga-lembaga keuangan yang lain;
- Menangkap transaksi persekot tunai dari cabang lembaga keuangan;
- Memberikan informasi dan laporan kepada lembaga keuangan dan rencana kartu.

Hal - hal yang harus dilakukan oleh pusat pengolahan kepada pedagang adalah :

- Memelihara informasi rekening pedagang;
- Menangkap setoran dari pedagang untuk pembaharuan rekening nasabah dan saling tukar dengan lembaga lain;
- Memberikan jaringan komunikasi untuk permohonan pengesahan pedagang.

### 1.a.2. Kegiatan Penerbitan *Credit Card* (Kartu Kredit)

Setelah perusahaan *credit card*/Bank melakukan kegiatan awal pra penerbitan kartu, kegiatan selanjutnya adalah melakukan penerbitan kartu.

Dalam penerbitan kartu ini, kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan Penerbit *credit card*/Bank adalah melakukan persetujuan penerbitan kartu terlebih dahulu.

#### 1.a.2.a. Persetujuan Penerbitan Kartu Kredit.

Persetujuan penerbitan kartu mengacu pada pedoman persetujuan kartu

Pedoman persetujuan Kartu Kredit ini disusun dengan tetap mengacu pada pedoman *Risk Acceptance Criteria Credit Card*, sehingga satuan kredit yang relatif kecil tidak bisa mengesampingkan ekstrapati-hati pihak perbankan.

Pedoman Persetujuan Kartu Kredit ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam proses persetujuan untuk penerbitan kartu kredit maupun



fasilitas tambahan pada kartu kredit berjalan baik yang dilakukan cabang maupun oleh Kantor pusat.

Pedoman Persetujuan Kartu Kredit ini akan dilakukan peninjauan kembali sedikitnya 1 (satu) tahun sekali dan selalu diselaraskan dengan adanya perubahan-perubahan kondisi internal perusahaan, perekonomian dan pasar yang terkait.

Tiga jenis permohonan Kartu Kredit :

- Pembukaan keanggotaan baru kartu kredit (*New Account*)
- Penambahan fasilitas kartu kredit berjalan (*Existing Cardholder*)
- Permohonan *New Account* dan *Existing Cardholder* dengan jaminan (*Collateral*).

Tiga jenis tahapan pekerjaan untuk mengambil keputusan.

1. Authentic (Pembuktian kelengkapan dan keaslian dokumen).
2. Verifikasi (Memeriksa kebenaran dokumen).
3. Analisa.

Ad. . Authenticator.

Didalam mengambil keputusan pertama-tama yang dilakukan adalah melakukan pembuktian kelengkapan dan keaslian dokumen (*authenticator*) yaitu

memeriksa kelengkapan data pada aplikasi, kelengkapan dokumen dan keabsahanannya.

Typical Application Information.

- Jenis kartu yang diajukan.
- Data Pribadi.
- Data Keluarga.
- Data Pekerjaan.
- Data Keuangan.
- Alamat Penagihan.

Keterangan :

Jenis kartu.

- Jenis kartu penerbit
  - Visa Card.
  - Master Card.
- Jenis Account.
  - Regular Card.
  - Gold Card.

Permohonan tidak dapat dipenuhi jika dalam satu nomor *customer* berbeda jenis accountnya.

#### Data Pribadi

- Nama Pemohon

Nama lengkap sesuai dengan KTP/Passpor.\*)

Apabila tidak sesuai dengan KTP harus ada akte perubahan nama.

Dihindari penulisan nama dengan title atau gelar bermanfaat untuk search database yang akurat.

- KTP/Paspor.

Nomor harus sesuai dengan KTP (fotocopy harus jelas).

- Kewarganegaraan untuk WNA kelengkapan dokumen diperlakukan beda.

- NPWP (dilampirkan untuk fasilitas plafon kredit diatas atau sama dengan Rp. 8 juta rupiah).

- Tanggal Lahir

Penting untuk diisi sesuai dengan KTP.

Sangat berguna untuk search data base yang akurat.

- Nama yang akan dicetak di kartu.

Disediakan maksimal 20 karakter termasuk titik, koma dan spasi.

Tidak disarankan untuk memakai gelar/title didepan nama yang akan dicetak di kartu. Perbedaan nama nama dengan KTP harus melampirkan akte perubahan nama.

- Jenis kelamin.

Laki-laki atau perempuan.

- Status.

Tidak kawin, kawin, duda atau janda.

- Pendidikan.

SD, SMP, SMA, Academy, Univercity.

- Alamat rumah sekarang.

Status rumah, milik sendiri, orang tua, kontrak/kost, sewa, lain-lain.

Kode pos wajib untuk diisi.

- Alamat rumah sebelumnya.

Apabila rumah sekarang berbeda dengan KTP wajib untuk diisi.

- Nomor Telephone.

Sertakan kode area sebelum nomor telephone.

Data Keluarga.

- Nama ibu kandung sebelum menikah.

Penting dan wajib diisi, gunanya sebagai salah satu pengaman transaksi kartu kredit.

- Nama suami/isteri seperti di KTP.

Wajib diisi, gunanya sebagai salah satu pengaman transaksi kartu kredit.

- Nama Saudara atau teman yang tidak tinggal bersama anda.

Dengan menyebutkan hubungan telepon kantor informasi ini berguna bagi sebagai bahan referensi pemohon.

Data Pekerjaan.

- Nama dan alamat perusahaan.

Pengisian harus jelas dan lengkap beserta kode pos.

Informasi ini sangat berguna karena semua alamat korespondensi ke alamat tersebut apabila alamat penagihan ke kantor.

- Telephone dan pesawat.

Diisi dengan kode area.

- Jenis Usaha.

Harus diisi sesuai dengan usaha dimana pemohon bekerja baik sebagai profesional maupun pemilik.

- Jabatan/Status Karyawan.

Menunjukkan kepemilikan atau jenjang posisi pemohon bekerja.

- Gaji.

Diisi khusus pemohon dengan status kerja profesional atau karyawan dalam nominal rupiah.

- Lama bekerja.

Menunjukkan lamanya pemohon bekerja atau berusaha.

Perusahaan dimana saat ini bekerja bagi karyawan dan pada jenis usaha yang sama bagi pengusaha.

- Pendapatan kotor per tahun.

Penghasilan dalam 12 bulan ditambah bonus dan THR bagi karyawan.

Penghasilan kotor per tahun dan usaha bagi pengusaha.

Ditulis dalam nominal rupiah.

- Sumber Penghasilan Tambahan.

Diisi dalam nominal rupiah dan informasi jenis usaha yang menjadi sumber penghasilan.

Nama dan alamat perusahaan sebelumnya, Jabatan, Lamanya Bekerja dan Telephone.

#### Data Keuangan.

- Nama dan alamat Bank.

Cukup ditulis nama Bank dan cabangnya.

- Jenis Rekening.

Diisi dengan jelas alpha - numeric.

- Kartu Kredit yang lain.

Sebutkan nomor kartu yang lengkap (16 digit) dan nama Bank penerbit.

#### Alamat Penagihan

- Rumah

Disarankan dan diutamakan bagi usahawan.

- Kantor.

Disarankan dan diutamakan bagi karyawan/profesional

- Lain-lain.

Sebaiknya dihindari terutama alamat ke kantor Cabang Lippobank, PO Box dan alamat selain rumah maupun kantor,

#### Pernyataan Aplikasi.

- Tanda Tangan Pemegang Kartu Usaha dan Tambahan harus sama dengan KTP.
- Apabila berbeda dimintakan pernyataan tanda tangan yang berlaku.

#### Kartu Tambahan

Pengisian data Kartu Tambahan sama dengan data kartu utama.

#### Kelengkapan dokumen *Collateral*.

- Cash Collateral.



- Fotocopy Bilyet Deposito
- SMMM Nasabah
- Gadai atas tagihan Tunai
- Surat konfirmasi cabang.
- Personal Guarantee
- Form Personal Guarantee
- Fotocpy KTP/Kartu Keluarga Penjamin.
- Dokumen umum penjamin.
- Corporate Guarantee
- Formulir Corporate Guarantee
- Fotocopy KTP penanggung (sesuai dengan akte perusahaan)
- Fotocopy akte perusahaan dan perubahannya
- Fotocopy rekening koran perusahaan.

Kelengkapan dokumen Autodebet Rekening.

- Fotocopy autodebet rekening yang ditanda tangani oleh pemilik rekening kuasa.

Ad.2. Verifikasi.

Setelah melakukan *authenticator* selanjutnya, bank melakukan apa yang dinamakan Verifikasi (memeriksa kebenaran dokumen) yaitu melakukan pemeriksaan data pemohon pada aplikasi sehingga memberikan dan menghasilkan data pemohon yang sebenarnya.

#### Type of Credit Checking

##### Sumber Informasi.

##### Pemohon.

- Cabang Lippobank
- Pihak ketiga : Keluarga, Pemilik Perusahaan, Pejabat HRG, supervisor pada perusahaan pemohon, teman pemohon, investigator, Bank dimana pemohon memiliki account/card rating (hanya dilakukan Kantor Pusat).

##### Media.

- Telephone
- Investigator
- Internal informasi Lippobank

### Jenis Kartu.

Sesuaikan permohonan jenis Account dengan penghasilan, profesi, hoby dan jenis kelamin.

- Regular Card : penghasilan kotor pertahun minimal Rp. 15 juta
- Gold Card : penghasilan kotor pertahun minimal Rp. 40 juta
- Golf Card : Golfers, penghasilan kotor pertahun minimal Rp. 40 juta.
- Lady Card : Wanita, [enghasilan kotor pertahun minimal Rp. 15 juta.
- IMA Card : Anggota IDI, penghasilan kotor pertahun minimal Rp.15 juta.

### Data Pribadi.

- Tanggal lahir  
Tidak boleh berbeda dengan Tanggal Lahir pada KTP atau ID lainnya.
- Alamat Rumah Sekarang

Mencari kebenaran data pemohon dapat dilakukan kepada pemohon, keluarga pemohon yang tinggal serumah, teman yang tidak tinggal serumah. Data yang dapat diperlukan status rumah, lama tinggal.

#### Data Pekerjaan.

Dapatkan kebenaran status pekerjaan pemohon.

- Karyawan : Status, posisi/jabatan, masa kerja, penghasilan pemohon, performance.
- Pengusaha/pemilik : Jenis usaha, klasifikasi usaha, lama usaha, omzet usaha perbulan, hubungan dagang.

#### Data keuangan.

- Rekening Bank.

Untuk karyawan Rekening Bank harus atas nama pemohon.

Pengusaha/Pemilik/Direktur - identifikasi rekening koran atas nama sendiri atau perusahaan.

Apabila nasabah Lippobank, dapatkan data lamanya menjadi nasabah, jika memiliki fasilitas berjalan

sediakan data jenis fasilitas, jenis collateral dan nilai likuid maupun pasarnya, pemakaian fasilitas dan kondisi fasilitas lancar atau tidak.

- Kartu Kredit lain yang dimiliki.

Berikan data dari hasil *Rating Card* dengan Issuer Bank lain (hanya dilakukan oleh Kantor Pusat).

- Masa berlaku
- Credit Limit
- Out Standing
- Karakter Pembayaran
- Kondisi/Status saat ini
- Delinquency 12 bulan terakhir.

- Alamat Penagih.

Lakukan kebenaran dan status pemohon pada alamat penagihan dengan sebenar-benarnya.

- Kartu tambahan.

Periksa hubungan dengan pemohon/pemegang kartu utama harus memiliki hubungan keluarga.

- Pernyataan Aplikasi.

Memeriksa tanda tangan pemohon dengan Tanda tangan fotocopy KTP.

### Ad.3. Analisa

Setelah Bank melakukan authenticator, verifikasi, kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan analisa data pemohon (*character, Capacity, Condition, Capital, Collateral*), sehingga akan memberikan penilaian terhadap kemampuan pemohon dalam memenuhi kewajiban terhadap fasilitas yang akan diberikan.

#### Risk Acceptance Criteria

- *Character.*

Umur minimal untuk basic 23 tahun dan supplementary 18 tahun Maksimal 65 tahun.

- *Capacity*

Memiliki penghasilan tetap perbulan.

Bekerja pada perusahaan tipe.

A

Multi National

COBA and SME Clients

Go Public Company (LQ45)

Bank Top Ten (BCA, BII, Bank Danamon, Bank Bali,  
Bank Universal, Bank Niaga, Bank 1946, BRI, BTN, Bank  
Mandiri.

B

Consumer Goods Company (local)

Airlines (local)

Supermarket & Dept. Store

Chain Store/Boutique

Banking others

Tobacco & Cigarettes

C

Diluar tipe A dan B

Penghasilan kotor pertahun

Reguler Card tidak kurang dari Rp. 20 juta

Gold Card tidak kurang dari Rp. 45 juta

- *Condition*

Domisili tinggal harus di Indonesia.

Status Rumah harus milik sendiri/milik orang tua atau mertua

- *Capital*

Harus memiliki telephone rumah

- *Collateral*

Cash Collateral minimum 100% dari plafon kredit.

#### 1.a.2.b. Keputusan

Setelah bank melakukan tiga jenis tahapan yaitu *Authenticator*, Verifikasi dan Analisa, barulah proses persetujuan untuk kartu kredit ini sampai pada keputusan. Dalam keputusan ini bank memberikan persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada pemohon yang layak setelah mempertimbangkan konstitusi *credit card* serta prospek pemohon minimal 2 tahun kedepan.

#### Penentuan Batas Plafon Limit.

- Maksimal 20 % dari penghasilan kotor pertahun.

Penemuan plafon limit didalam rentang batas plafon limit dipengaruhi selain 5C juga :



- Gaya hidup
- Tanggungan
- Pengeluaran rutin
- Didalam penentuan batas plafon limit dengan jaminan pribadi yang dianalisa adalah kemampuan pembayaran kembali Peminjam dan menjadi total exposure apabila penjamin adalah pemegang kartu kredit Lippobank.
- *Coverage Ratio* bukan sebagai penentuan besar kecilnya plafon kredit kepada nasabah, tetap harus melalui analisa kelayakan kemampuan pembayaran dan kebutuhan nasabah terhadap kartu kredit.

#### Pembatalan

Persetujuan atau rekomendasi fasilitas kartu kredit dapat dibatalkan/ditolak apabila dalam kondisi.

- Perusahaan dimana nasabah tersebut masuk dalam daftar black list.

- Nasabah bersangkutan masuk dalam daftar black list, memiliki performance yang tidak bagus, bad debt di card enter lain atau informasi negatif dari pihak ketiga.
- Masuk dalam kriteria kategori negatif atau high risk.

Negatif kategori

Kategori dimana permohonan tidak akan disetujui.

Tidak masuk dalam daftar black list atau bad info lainnya.

Contoh :

Rumah kontrak

Memiliki usaha atau berhubungan dengan usaha yang melanggar norma-norma keagamaan sebagai contoh perjudian, *prostitusi*, *amusement*.

*High Risk* kategori

Permohonan yang dapat diterima dengan memberikan jaminan,

Lawyer, temporary staff (sales), artis (termasuk seniman, olahragawan), pelajar, militer, polisi, pegawai negeri.

Warga Negara Asing yang bekerja pada perusahaan tipe C atau tanpa kontrak kerja.

Warga Negara Taiwan, Korea, India dan Afrika.

#### 1.a.3. Kegiatan Pemberian *Credit Card* (Kartu Kredit).<sup>73)</sup>

Kegiatan terakhir operasionalisasi penerbitan *credit card* (kartu kredit) adalah pemberian kartu kredit.

Pada kegiatan ini keamanan menjadi faktor yang penting. Banyak lembaga keuangan memakai jasa-jasa pihak luar membuat embossing (membuat huruf timbul) dan encoding (membuat kode) serta mendistribusikan kartu-kartu tersebut. Digunakannya jasa pihak luar karena pihak luar ini dianggap telah mempunyai keahlian dan pengawasan yang baik guna mengurangi resiko kartu hilang atau dicuri dalam siklus pembuatan dan penyerahannya. Pada waktu proses penyerahan pihak penerbit

---

<sup>73)</sup> Wawancara Marketing Officer BII Card Centre Jateng.

kartu harus dapat menjamin bahwa kartu-kartu tersebut telah sampai di tangan pemegang kartu.

Sangat penting untuk adanya prosedur untuk menjamin kartu-kartu yang diterbitkan mencapai langganan yang dikehendaki dan kartu yang hilang / dicuri dapat dengan cepat diidentifikasi dan dibekukan. Pengawasan terhadap penggelapan merupakan fungsi utama dalam kebanyakan rencana.

#### 1.b. Mekanisme Pelaksanaan Transaksi Credit Card (Kartu Kredit).

Pelaksanaan pembayaran pembelian barang/jasa dengan kartu kredit, tidak bisa secara langsung tetapi melalui suatu prosedur pembayaran. Dan hal ini melibatkan juga pihak yaitu pihak penerbit kartu kredit, pihak pemegang kartu kredit, pihak penjual barang/jasa.

Adapun mekanismenya/prosedurnya adalah sebagai berikut :

##### Prosedur Pembayaran Dengan *Credit Card* (kartu kredit)

1. Setelah berbelanja, pemegang kartu kredit dapat menunjukkan *credit card*-nya pada *merchant*, untuk membayar barang atau jasa yang dibelinya.

2. *Merchant* akan menerima dan menelitinya, apakah kartu kredit tersebut masih berlaku atau tidak. Apabila sudah tidak berlaku lagi (*expired*), maka *merchant* akan melakukan otorisasi terlebih dahulu ke *card issuer* (BNI).
3. Jika kartu kredit tersebut masih berlaku, maka *merchant* akan memeriksa daftar hitam (*black list*) yang terakhir, yang dikirim oleh bank penerbit secara berkala. Pemeriksaan daftar hitam tersebut untuk mengetahui apakah nomor kartu kredit yang bersangkutan ada di dalam daftar hitam, yang berarti kartu kredit tersebut merupakan kartu yang dilaporkan hilang oleh pemiliknya atau diduga telah dipalsukan. Bila nomor kartu terdapat dalam daftar hitam, maka *merchant* akan menolaknya.
4. Setelah nyata bahwa kartu kredit tersebut tidak terdaftar dalam daftar hitam, *merchant* kemudian meletakkan kartu diatas imprinter beserta faktur rangkap tiga untuk di print.
5. Kemudian *merchant* tersebut mendorong pegangan imprinter sekali sekali ke kanan dan sekali ke kiri, sehingga data pemegang kartu dan pihak penerima tercetak jelas di atas faktur rangkap tiga tersebut.

6. Setelah itu, *merchant* yang bersangkutan akan mengisi atau menuliskan tanggal transaksi dan jumlah transaksi dalam faktur.
7. Bila jumlah transaksi melebihi *floor limit*, maka *merchant* boleh melaksanakan transaksi tetapi harus meminta otorisasi terlebih dahulu dari bank.
8. *Sales draft* (slip penjualan) akan ditanda tangani oleh pemegang kartu tanpa melihat tanda tangan yang tertera pada kartu dan *merchant* akan meneliti kesamaan tanda tangan yang ada pada kartu kredit yang bersangkutan dan dengan yang terdapat pada slip penjualan, bila tidak cocok *merchant* harus menghubungi bagian otorisasi untuk mendapatkan persetujuan sebelum transaksi terjadi. Bila tanda tangan sesuai, transaksi dapat langsung dilaksanakan, dari satu lembar slip penjualan itu harus diserahkan kepada pemegang kartu.
9. *Merchant* akan menagih semua slip penjualan dengan mengirimkannya kepada BNI.
10. Bank setelah menerima slip penjualan tersebut akan memindahbuku -

kan atau menstransfer sejumlah tagihan dari *merchant* tersebut setelah dikurangi diskonto yang telah ditetapkan.

11. Satu kali dalam satu bulan bank akan menagih kepada pemegang kartu atau sejumlah transaksi yang telah dilakukannya. Dalam tagihan tersebut terdapat pembayaran minimum (*minimum payment*) yang harus dibayar oleh pemegang kartu. Pemegang Kartu Kredit BNI dapat membayar tagihan di lebih 500 kantor cabang Bank BNI dalam negeri serta lebih dari 750 ATM BNI di seluruh Indonesia tanpa dikenakan biaya administrasi.
12. Pemegang kartu kredit harus membayar tagihan tersebut sampai batas waktu yang ditentukan. Jika seluruh tagihan dibayar lunas, tidak akan dikenakan bunga. Tetapi jika hanya membayar sejumlah pembayaran minimum, akan dikenakan bunga sebesar 2,75 % untuk transaksi belanja dan atau 3,25 % untuk transaksi penarikan tunai per bulan.
13. Pembayaran minimum adalah sebesar 10 % dari jumlah tagihan yang tertera pada lembar penagihan, atau sekurang-kurangnya Rp. 50.000,- atau mana yang lebih besar.<sup>74)</sup>

---

<sup>74)</sup> Wawancara Bagian Kartu Kredit PT. Bank BNI 1946 (Persero) Tbk, Surakarta.

### 1.c. Bentuk Perjanjian Penerbitan Credit Card Sebagai Alat Pembayaran.

"Perjanjian Penerbitan *credit card*" dan "Perjanjian Penggunaan *Credit Card* pada khususnya, dan perjanjian kredit pada umumnya dalam praktek perbankan di Indonesia, dibuat dalam 2 bentuk atau cara yaitu Perjanjian kredit berupa akta dibawah tangan, dan Perjanjian kredit berupa akta notaris.

Perjanjian kredit yang dibuat baik dengan akta dibawah tangan maupun akta notaris, pada umumnya dibuat dengan bentuk perjanjian baku yaitu dengan cara kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah menandatangani suatu perjanjian yang sebelumnya telah dipersiapkan isi atau klausul-klausulnya oleh bank dalam suatu formulir tercetak. Dalam hal perjanjianm kredit bank dibuat dengan akta notaris, maka bank akan meminta notaris berpedoman kepada model perjanjian kredit dari bank yang bersangkutan. Notaris diminta untuk memedomani klausul-klausul dari model perjanjian kredit bank yang bersangkutan.

#### 1.c.1 Perjanjian Penggunaan Credit Card (Kartu kredit).

Klausul-klausul yang menjadi pedoman model perjanjian kredit bank adalah sebagai berikut :



- Judul/titel (perjanjian penggunaan *Card*).
- Identitas para pihak (pihak Bank sebagai pihak pertama dan pihak calon pemegang kartu sebagai pihak kedua).
- Persetujuan kesepakatan pengikatan diri dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan .
- Ketentuan-ketentuan perjanjian :
  - Definisi ketentuan-ketentuan obyek perjanjian.
  - Ketentuan-ketentuan tentang *card* (kartu).
  - Masa berlakunya *card*.
  - Penggunaan *Card* dan tanggung jawab.
  - Supplementary *card*.
  - Pembayaran tagihan.
  - Biaya-biaya.
  - Line Limit.
  - Penarikan uang tunai.
  - Transaksi Luar Negeri.
  - Kehilangan *Card*.
  - Pengakhiran fasilitas Perjanjian.
  - Jasa pihak ketiga.
  - Pailit/meninggal dunia.

- Lain-lain
  - Penutup.
- Tempat penandatanganan perjanjian.
  - Hari, tanggal dan tahun
  - Tanda tangan para pihak.

#### 1.c.2. Perjanjian Usahawan Visa/Mastercard.

Adapun klausul-klausul dari Perjanjian Usahawan Visa/Mastercard yang menjadi pedoman adalah sebagai berikut :

- Judul/Titel (Perjanjian Usahawan Visa/Mastercard).
- Hari, tanggal, tahun penandatanganan Perjanjian Usahawan oleh para pihak.
- Identitas para pihak (Para penerbit *credit card* /Bank sebagai pihak pertama dan pihak usahawan sebagai pihak kedua.
- Pernyataan kesepakatan kedua pihak dalam pengikatan perjanjian Usahawan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan dalam pasal-pasal.
- Ketentuan-ketentuan Perjanjian :
  - Pengertian/istilah ketentuan-ketentuan obyek perjanjian.

- Penunjukan dan transaksi kartu Bank.
  - Penerimaan Kartu Bank.
  - Batas dasar dan otorisasi.
  - Potongan/discount.
  - Pembayaran tagihan.
  - Penangguhan pembayaran.
  - Pembebanan kembali.
  - Sarana Transaksi, Komunikasi, dan Promosi.
  - Penahanan kartu Bank.
  - Umum.
  - Penghentian Perjanjian.
  - Penyelesaian Perselisihan.
- Tanda tangan kedua belah pihak/Pihak penerbit *Credit Card*/Bank dan Pihak Usahawan.

## 2. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Proses Penyelenggaraan *Credit Card* (Kartu Kredit) sebagai Alat Pembayaran.

### 2.a. Hubungan Hukum Antara Pihak Penerbit *Credit Card* Dengan Calon Pemegang *Credit Card*.

Hubungan antara pihak penerbit dengan pemegang kartu kredit, diawali dengan permohonan atau calon pemegang menjadi pemegang kartu. Pemohon tidak harus seseorang yang menjadi nasabah bank penerbit. Seseorang yang tidak menjadi nasabah dapat pula mengajukan permohonan menjadi pemegang kartu kredit. Permintaan tersebut didasarkan pada penawaran produk kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank serta pengenalan fasilitas-fasilitas yang akan diperoleh dengan menggunakan kartu kredit tersebut.

Dalam hubungan penerbitan kartu kredit antara Penerbit kartu dan calon Pemegang kartu, ada hal-hal yang penting yang menjadi pedoman yaitu :

2.a.1. Unsur-unsur Perkreditan.<sup>74)</sup>

- a. Kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi kredit (bank penerbit kartu kredit), bahwa prestasi yang diberikannya dalam bentuk uang, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian kredit dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Ketentuan

---

<sup>74)</sup> Data Bank BNI 1946 Persero Tbk.

mengenai waktu berkaitan dengan masa berlakunya kartu kredit.

c. *Degree of Risk* yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima di kemudian hari. Selama tenggang waktu tersebut, kemungkinan resiko yang dihadapi bank penerbit kartu kredit (BNI) adalah penunggakan pembayaran. Semakin lama masa berlakunya kartu kredit, semakin tinggi tingkat resikonya karena jauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan masih selalu terdapat ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan inilah yang menimbulkan unsur resiko.

d. Prestasi yaitu obyek dari penerbitan kartu kredit adalah berupa uang demikian pula kontra prestasi yang akan diterima bank penerbit kartu kredit adalah berupa uang.

Pemberian fasilitas kredit oleh Bank BNI melalui kredit, tidaklah didasarkan pada akte-akte secara otentik melainkan hanya dengan akte-akte dibawah tangan. Artinya perjanjian diantara para pihak ditandatangani tidak dengan melibatkan

notaris atau pejabat yang berwenang melainkan ditandatangani oleh masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Pemberian fasilitas kredit tersebut tidak mutlak harus ada jaminan kredit. Tidak adanya keharusan tentang jaminan kredit, menyebabkan resiko perjanjian penerbitan kartu kredit sangat besar. Kemungkinan resiko yang harus dihadapi adalah pemegang kartu kredit tidak dapat melunasi kredit yang telah diterimanya. Resiko tersebut sudah disadari pihak bank sejak pertama kali mengadakan perjanjian penerbitan kartu kredit. Dikatakan bahwa perjanjian penerbitan kartu kredit adalah perjanjian *"high risk, high profit"*, artinya bank berani menanggung resiko yang besar karena apabila semua berjalan seperti yang diperjanjikan bank akan mendapat keuntungan yang tinggi pula.

Selain itu calon pemegang kredit tidak diharuskan untuk membuka rekening pada BNI, namun sebaiknya calon pemegang kartu kredit bersedia pula untuk membuka rekening pada BNI. Meskipun demikian, bukan berarti kredit mudah diperoleh setiap anggota masyarakat, setiap calon

pemegang kartu harus memenuhi persyaratan yang sangat selektif yang ditentukan oleh bank.

Pemberian fasilitas kredit melalui melalui kartu kredit, didasarkan kepercayaan bank terhadap debitur, hal ini bila telah ada pendekatan antara pemberi dan penerima kredit. Terutama kepada mereka yang tidak mempunyai jaminan pada BNI. Untuk menimbulkan kepercayaan, maka bank akan meneliti terlebih dahulu tentang apa, bagaimana dan siapa calon pemegang kartu kredit tersebut.

Hal ini dilakukan karena penerbitan kartu kredit oleh bank menimbulkan resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank akan berpedoman pada asas-asas perkreditan yang sehat. Resiko yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak adanya simpanan pemegang kartu ada bank tersebut yang dapat dijadikan jaminan apabila pemegang kartu wanprestasi.

#### 2.a.2. Syarat-syarat Perkreditan (Kartu Kredit).

Pada dasarnya setiap bank penerbit kartu kredit menentukan tolok ukur syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang kartu. Sesuai dengan syarat

dan prosedur yang telah ditawarkan tersebut, maka pengisian formulir yang telah disediakan adalah langkah awal.

a. Syarat Umum.

- Syarat umum, merupakan syarat yang secara umum diminta oleh bank.

1) Applicant/ pemohon berumur 17-65 tahun.

2). Mempunyai pendapatan yang memadai bagi seorang karyawan dengan syarat:

a) melampirkan KTP /Pasport yang masih berlaku;

b). melampirkan surat keterangan penghasilan yaitu slip gaji asli;

c). melampirkan surat keterangan kerja yaitu SK Pangkat terakhir, bagi PNS, TNI, POLISI;

d). melampirkan surat izin profesional

e). melampirkan SIUP, bagi pengusaha.

(informasi persyaratan terlampir )

2. Mengisi data pribadi.

3. Alamat tempat tinggal.



- (1). Alamat rumah secara lengkap
- (2) Lama tinggal
- (3). Status rumah
- (4). Fasilitas rumah
- (5). Jumlah tanggungan sekeluarga.

- 5). Data Pekerjaan.
- 6). Jumlah penghasilan.
- 7). Referensi kartu kredit yang lain.
- 8). Anggota Keluarga

b. Syarat Khusus.

- Syarat khusus antara lain diminta oleh bank, tergantung dari jenis kartu kredit yang bersangkutan antara lain mengenai :

- 1). Iuran tambahan
- 2). Iuran tahunan.
- 3). Iuran pangkal.

Setelah syarat-syarat yang diminta atau disyaratkan oleh penerbit dipenuhi, yaitu mengisi surat permintaan permohonan, mengisi formulir perjanjian, membayar uang muka, menunjukkan rekening di Bank BNI

atau deposito di bank tersebut, menunjukkan dokumen-dokumen yang disyaratkan, tahap selanjutnya adalah pengiriman aplikasi.

Aplikasi yang telah diisi oleh calon pemegang kartu kredit dikirim ke BNI Kantor Pusat, dalam hal ini yaitu Bank BNI *Card Center*. Aplikasi tersebut digunakan oleh pihak bank untuk meneliti mengenai kesanggupan calon pemegang kartu kredit untuk membayar dan bonafiditas dari calon yang bersangkutan. Penelitian terhadap kesanggupan membayar dan bonafiditas calon pemegang kartu kredit, merupakan tindakan preventif mengenai kemungkinan pemegang kartu dikemudian hari menjadi tidak lagi mampu membayar dari setiap tagihan yang ada.

Kedua hal tersebut sangat penting artinya karena kesanggupan dan penilaian tentang bonafiditas merupakan salah satu hal yang sangat menjadi pertimbangan untuk dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut. Penelitian tersebut dilakukan langsung oleh BNI Kantor Pusat yakni Bagian BNI *Card Center*. Apabila permohonan tersebut

ditolak atau diterima, maka BNI Kantor Pusat akan mengirimkan jawaban melalui BNI Kantor Cabang tempat calon berdomisili atau langsung ditujukan ke alamat pemohon.

Dengan dikabulkannya permohonan kartu kredit tersebut, yang ditandai dengan dikirimnya surat balasan, maka secara otomatis pemegang kartu kredit tunduk pada ketentuan-ketentuan umum pemegang kartu kredit. Kartu kredit dikirimkan bersama dengan surat balasan. Dalam surat balasan tersebut, bank akan mencantumkan besarnya *credit limit* (batas kredit) pemegang kartu kredit. Pada saat awal diterimanya kartu kredit, kartu tersebut belum dapat difungsikan. Untuk memfungsikannya, maka pemegang kartu kredit harus menghubungi nomor telepon yang telah dicantumkan di dalam surat balasan, dan membubuhkan tanda tangannya pada kartu kredit tersebut.

Dasar suatu hubungan hukum yang timbul antara bank dengan calon pemegang kartu kredit adalah perjanjian. Perjanjian tersebut timbul dengan ditandatanganinya kartu kredit tersebut, serta dibuktikan

dengan difungsikannya kartu tersebut. Perjanjian penerbitan kartu kredit tersebut merupakan bentuk perjanjian baku, yakni suatu perjanjian yang didalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh salah satu pihak, dalam hal ini adalah BNI.

Syarat-syarat dalam perjanjian tersebut secara sepihak telah disiapkan dan ditentukan oleh pihak bank. Bank bebas dalam membuat ketentuannya, sehingga calon pemegang kartu kredit berada dalam keadaan dibawah kekuasaannya. Dalam hal ini terdapat aspek yang semakin menentukan kedudukan pihak bank, yaitu *:take it or leave it"*. Pihak calon pemegang kartu kredit hanya ada pilihan menerima syarat-syarat tersebut dengan jalan menandatangani atau tidak menandatangani sebagai tanda tidak setuju. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam hal menyusun kontrak pihak bank mempunyai kedudukan monopoli.<sup>75)</sup>

c. Persyaratan Dari Segi Kelayakan Kredit.

---

<sup>75)</sup> PT. Bank BNI 1946 Persero Tbk.

Peninjauan kelayakan pemberian kartu kredit pada prinsipnya sama dengan cara-cara peninjauan (*review*) pada pinjaman-pinjaman komersial lainnya, yang berdasarkan :

1. Character
2. Capacity
3. Condition
4. Capital
5. Collateral.

1. *Character* Dan Kredibilitas Pemohon.

Untuk menilai character dan kredibilitas dari calon *cardholder* sebenarnya cukup sulit, tapi dapat digunakan beberapa kriteria penilaian antara lain :

- *Credit Historical* dari calon *Cardholder*
- Referensi dari pihak yang dipercayai
- Daftar hitam (BI, Kredit macet, Report Bulletin, dsb.)
- Kestabilan tempat tinggal :
  - Lamanya tinggal di lokasi/tempat tersebut

- Status kepemilikan rumah (rumah sendiri, keluarga, atau kontrakan/kost).
- Kestabilan pekerjaan :
  - Lamanya kerja ditempat tersebut
  - Jabatan
  - Jenis perusahaan di tempat calon *cardholder* bekerja.

Misalkan :

Perusahaan besar multinasional yang terkenal bonafid atau PT. X yang tidak jelas.
- Pinjaman yang telah dipercayakan oleh pihak lain seperti :
  - Fasilitas pinjaman dari bank
  - Leasing dari perusahaan leasing yang dikenal
  - Atau fasilitas lain dari institusi-institusi keuangan.
- Tabungan / deposito yang dimiliki calon *cardholder*.

## 2. *Capacity.*

Adalah kemampuan dari calon *cardholder* untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan. Kemampuan *cardholder* adalah penghasilan yang dapat terdiri dari :

- Penghasilan tetap sendiri maupun gabungan (suami/istri) pertahun :

- Untuk karyawan :

Penghasilan dibuktikan dengan slip gaji dan surat pernyataan dari perusahaan.

- Untuk pengusaha :

Penghasilan dibuktikan dengan rekening koran 3 bulan terakhir sehingga dapat dianalisa perkiraan wajar pendapatan pertahunnya.

- Penghasilan Tambahan seperti :

- Bonus, THR, Bunga deposito dan

- Penghasilan lainnya yang dapat dibuktikan.

### 3. Condition.

Kondisi pada para calon *cardholder* adalah :

- Jenis usaha dimana Calon *Holder* mendapatkan penghasilannya.

Contoh :

Untuk karyawan pegawai perusahaan Besar Multinasional yang bisnisnya stabil dibanding makelar/salesman yang sebagian besar pendapatannya dari komisi.

- Kestabilan peraturan pemerintah tentang jenis usaha pengusaha atau tempat karyawan bekerja.

Misal :

Untuk pengusaha/karyawan di industri tekstil/garment dibandingkan dengan pengusaha/karyawan di Night Club yang berdasarkan lisensi yang harus diperbaharui.

- Prospek Usaha.

Ketidakstabilan usaha dimana *Card Holder* bekerja/memperoleh penghasilan, akan mengakibatkan sumber penghasilan yang tidak stabil. Kehilangan sumber penghasilan bagi *Card Holder* akan menyebabkan kesulitan pengembalian kredit yang telah diberikan.



#### 4. *Capital.*

Pada kredit lainnya, pinjaman untuk suatu usaha (ekspansi maupun baru) calon debitur umumnya harus mempunyai modal sendiri di samping modal pinjaman dari bank. Sedangkan untuk *Credit Card*, assets pribadi dari calon *Card Holder* yang dinilai :

Contoh :

- Rumah  
Status kepemilikan, lokasi, nilai likuiditas, dll.
- Mobil  
Jenis mobil, jumlahnya, dsb.
- Telepon
- Tabungan
- Deposito

#### 6. *Collateral.*

Jaminan diperlukan jika salah satu syarat tidak dipenuhi.

Misalnya :

- WNA yang tidak mendapat "*unconditional approval*"

- Penghasilan yang tidak stabil/diragukan/tidak memenuhi persyaratan tapi dinilai layak mendapat kartu kredit.
- Umur tidak mencukupi
- Dan lain-lain

Jaminan dapat berupa :

- Personal guarantee
- Blocking deposito/tabungan
- Mobil, dsb.<sup>76)</sup>

d. Syarat Persetujuan Perjanjian Kartu Kredit.

a. Mengisi formulir perjanjian.

Di dalam perjanjian pemegang kartu kredit telah tertulis pasal-pasal yang akan dijadikan pedoman bagi calon pemegang kartu dan pihak penerbit kartu kredit.

Pasal 2 dari Perjanjian Penggunaan *Cardbank* Bali, dalam ayat 4 nya disebutkan :

---

<sup>76)</sup> Data PT. Bank Lippo Tbk.

Dengan ditandatangani Card, hal ini merupakan bukti pengikatan diri atas seluruh isi perjanjian.

Dalam pelaksanaannya, persetujuan perjanjian pemegang kartu kredit tetap harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Ayat (1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Kata sepakat ini sangat penting artinya untuk mengikat masing-masing pihak dalam pelaksanaan isi dari surat perjanjian yang dibuat, dan salah satu pihak tidak boleh berada dalam suatu tekanan dalam menyetujui perjanjian. Walaupun bentuk dan isi perjanjian dibuat oleh satu pihak saja yakni pihak bank, tetapi hal ini bukan berarti melanggar kesepakatan. Karena sebelum penanda tangan calon pemegang kartu diberi kesempatan untuk memahami isi dari perjanjian tersebut.

Avat (2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Hal ini telah dipenuhi oleh pihak penerbit kartu dengan diberi batasan usia minimum 21 tahun. Usia 21 tahun adalah usia dewasa yang dianggap cakap untuk melaksanakan tindakan hukum yaitu membuat suatu perjanjian.

Ayat (3) Suatu hal tertentu.

Obyek perjanjian adalah penggunaan kartu kredit.

Yang menjadi suatu hal tertentu adalah fasilitas yang diberikan oleh penerbit kartu.

Pasal 2 ayat 2 dari Perjanjian Penggunaan Card Bank Bali, disebutkan :

(2) Bahwa dengan Card tersebut cardholder dijamin oleh Bank untuk dari waktu ke waktu dapat menggunakan antara lain tetapi tidak terbatas.

\* Sebagai alat pembayaran pada setiap transaksi (pembelian barang atau jasa) pada merchant yang ditentukan atau ditunjuk oleh Bank dan oleh Organisasi atau Badan Usaha yang merupakan anggota dari Mastercard International (MCI).

- \* Mendapatkan Cash Advance (penarikan uang tunai) sesuai ketentuan.
- \* Fasilitas-fasilitas lain dengan persetujuan terlebih dahulu dari Bank.

Ayat (4). Suatu sebab yang halal.

Ini menunjukkan bahwa kegiatan kartu kredit tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Setelah surat perjanjian memenuhi ke-4 syarat sahnya perjanjian, maka masing-masing pihak yang terlibat dalam pembuatan surat perjanjian itu tidak terikat untuk melaksanakan isi perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka (para pihak) yang membuatnya.

#### b. Membayar Uang Muka.

Jumlah uang muka yang harus dibayar oleh setiap pemegang kartu kepada pihak penerbit adalah ditentukan oleh masing-masing penerbit. Sebagai contoh, pihak Bank Bali berdasarkan pasal 7 dari

Perjanjian penggunaan Card Bank Bali, ayat 1 dan 2  
nya menetapkan :

- (1) *Cardholder* setuju untuk membayar uang pangkal dan uang iuran tahunan yang jumlahnya ditentukan oleh bank;
- (2) Uang pangkal dan uang iuran tahunan tersebut harus dibayar di muka dan tidak dapat ditarik kembali.

e. Syarat-syarat administrasi.

Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh Karyawan, pengusaha dan Tenaga Profesional adalah

- Foto copy KTP atau Paspor.
- Foto copy rekening koran atau rekening tabungan 3 bulan terakhir.
- Pas photo ukuran paspor.
- Khusus untuk yang ingin memiliki kartu kredit Special Gold, maka harus disertai dengan fotocopy dengan fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Selain dari syarat-syarat yang tersebut diatas, maka terdapat syarat yang lain yaitu : Untuk karyawan harus dilengkapi dengan surat rekomendasi dari perusahaan yang menerangkan mengenai jabatan, pendapatan dan masa kerja.

Untuk pengusaha harus dilengkapi dengan akte perusahaan atau surat ijin usaha perdagangan (SIUP).

Untuk tenaga profesional harus dilengkapi dengan surat ijin praktek.

#### 2.a.3. Hak dan Kewajiban Penerbit Kartu Kredit dan Pemegang Kartu Kredit.

Hubungan hukum yang terjadi antara pihak Penerbit kartu kredit (Bank) dengan pihak Pemegang kartu kredit, akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.

Hubungan hukum yang terjadi antara BNI selaku Bank penerbit kartu kredit dengan pemegang kartu kredit akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya, yang dicantumkan dalam Ketentuan Umum Pemegang Kartu Kredit

BNI. Namun, secara garis besar hak dari kewajiban masing-masing pihak diantaranya sebagai berikut :

a. Hak dan kewajiabn bank penerbit kartu kredit.

1) Kewajiban bank penerbit kartu kredit.

- a) Menjamin pembayaran dengan menggunakan kartu kredit yang dilakukan oleh pemegang kartu.
- b) Mengganti dengan kartu baru bagi pemegang kartu yang kehilangan kartu kreditnya, kemudian mencantumkan nomor kartu kredit yang hilang dari daftar hitam.
- c) Melakukan penagihan ke alamat pemegang kartu atas sejumlah uang yang telah dibelanjakan oleh pemegang dengan menggunakan kartu kreditnya.

2) Hak bank penerbit kartu kredit.

- a) mengubah atau menambah persyaratan bagi para calon pemegang kartu kredit.



- b) Mengambil kembali kartu kredit atau segala fasilitas yang diberikan kepada pemegang kartu setiap saat bila dianggap perlu.
- c) Mempertimbangkan sebuah kartu kredit yang yang sudah habis masa berlakunya dapat diperpanjang, atau tidak.
- d) Mengenakan denda atas keselamatan yang dilakukan oleh pemegang kartu dalam melunasi hutangnya dan mengenakan bunga pada setiap angsuran hutangnya.
- e) Memungut biaya administrasi untuk pembuatan kartu baru dan pada saat penarikan uang tunai oleh pemegang kartu.
- f) Berhak atas sejumlah komisi atau pembagian keuangan bersama pihak penerima pembayaran dengan kartu kredit.

b. Hak dan kewajiban pemegang kartu kredit.

- 1) Kewajiban pemegang kartu kredit.

- a) pemegang kartu bertanggung jawab atas pembayaran setiap transaksi yang dilakukan dengan kartu tersebut, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang yang diberi kuasa olehnya untuk menggunakan kartu tersebut.
- b) Pemegang kartu diwajibkan membayar iuran tahunan untuk setiap kartu dan akan ditagih dalam rekening pemegang kartu dan tidak dapat dibebaskan maupun diminta kembali bila sudah dibayar.
- c) Pemegang kartu harus membayar pada bank dengan jumlah harga keseluruhan yang tertera dalam sales slip atas barang dan jasa diberikan oleh merchant karena penggunaan kartu tersebut.
- d) Pemegang kartu wajib membayar biaya keterlambatan pembayaran sebesar Rp. 25.000,- apabila pelunasan tagihan melewati tanggal jatuh tempo.

- e) Pemegang kartu wajib membayar administrasi penarikantunai sebesar 4 % atau minimum Rp. 10.000,-.

2) Hak-hak pemegang kartu.

- a) pemegang kartu berhak mengambil uang tunai pada bank di Indonesia maupun luar negeri yang memasang logo kartunya selama masih dalam masa berlaku.
- b) Pemegang kartu berhak menggunakan kartu kreditnya sampai batas maksimal penggunaan kreditnya.
- c) Pemegang kartu berhak menggunakan kartu kreditnya melalui batas kreditnya asal bank penerbit kartu tersebut menyetujui <sup>77)</sup>.

2.b. Hubungan Hukum Antara Pihak Penerbit *Credit Card* Dengan *Merchant* (Penjual/Pengusaha Dagang)

---

<sup>77)</sup> Data PT. Bank BNI 1946 Persero Tbk.

Hubungan hukum yang kedua adalah hubungan hukum antara pihak penerbit kartu kredit dengan merchant. Hubungan tersebut menjadi awal bagi berfungsinya kartu kredit sebagai alat pembayaran. Sebelum menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran pada tempat usaha tertentu, terlebih dahulu harus ada hubungan kerjasama antara pihak penerbit kartu kredit (bank) dengan *merchant* (tempat usaha).

Contoh :

Kartu kredit BNI dapat digunakan pada tempat-tempat usaha yang mencantumkan logo *VISA* dan *MASTERCARD*. Tempat-tempat usaha yang melakukan kerjasama dengan Bank BNI tersebut, justru tidak memasang logo BNI Card, karena BNI tidak secara khusus memiliki alat imprinter yang ditempatkan pada merchant. Kartu kredit BNI dapat difungsikan pada tempat-tempat usaha yang mempunyai alat imprinter berlogo *VISA* atau *MASTERCARD*, baik didalam negeri maupun diluar negeri. Saat ini kartu kredit BNI dapat diterima di lebih dari 15 juta tempat usaha dan 400.000 ATM bertanda *CIRRUS PLUS* di seluruh dunia, serta lebih dari 750 ATM BNI di seluruh Indonesia. Kartu kredit BNI tersebut dapat digunakan sebagai kartu untuk

pengambilan uang tunai pada ATM-ATM yang dimaksud. Logo *VISA* dan *MasterCard* diperoleh Bank BNI atas lisensi dari *VISA Internasional* yang merupakan badan hukum yang berkantor di 30 *Raffles Place # 15-00 Caltex House Singapore* dan *MasterCard Internasional* yang juga badan hukum yang berkantor di 152 Beach Road The Gateway East Singapore 187721 <sup>78)</sup> (Sumber buku petunjuk layanan kartu kredit Bank BNI).

Dalam hal ini penyusun tidak berhasil melampirkan contoh perjanjian kerjasama antara Bank BNI dengan tempat usaha tertentu hanya ada pada kantor pusat BNI *Card Center* Jakarta dan bukti perjanjian tersebut tidak disebarkan di BNI Kanwil maupun cabang BNI Kantor Pusat hanya memberitahukan secara tertulis melalui faximili bahwa telah terjalin kerjasama dengan suatu tempat usaha tertentu. Selain itu, menurut BNI *Card Center* Pusat, perjanjian tersebut hanya untuk kepentingan internal.

- Hak dan kewajiban Pihak Penerbit Kartu Kredit dan *Merchant*.

---

<sup>78)</sup> Data PT. Bank BNI 1946 Persero Tbk.

Hubungan antara pihak Penerbit *credit card* dengan , *merchant* menimbulkan hak dan kewajiban kedua pihak. Hak dan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut :

a. Hak dan Kewajiban *merchant*.

1) Kewajiban *merchant*.

- a) Melayani segala transaksi atas pembelian barang dan jasa yang dilakukan dengan kartu kredit yang sah dan memang berasal dari bank penerbit yang bekerja sama dengan *merchant*.
- b) Menghubungi pihak penerbit kartu untuk memberitahu setiap transaksi yang terjadi.
- c) Memberitahu pihak bank penerbit kartu kredit apabila memenuhi kejanggalan-kejanggalan dalam suatu pemakaian kartu kredit.
- d) Memeriksa daftar hitam yang dikirimkan secara berkala oleh pihak bank penerbit, sebelum menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit.

- e) Mengirimkan faktur pembelian dengan kartu kredit untuk tagihan yang dilakukan terhadap pihak penerbit.
- 2) Hak-hak yang diperoleh *merchant*.
- a) *Merchant* berhak menolak pembayaran yang dilakukan oleh seseorang atas pembelian sejumlah barang dengan mempergunakan kartu kredit, apabila *merchant* meragukan keabsahan berlakunya kartu kredit tersebut.
  - b) Menerima pembagian keuntungan dari pihak bank penerbit atas sejumlah pembayaran transaksi pembelian yang dilakukan dengan kartu kredit.
  - c) Menaikkan setiap harga barang yang dibeli dengan menggunakan kartu kredit, beberapa persen (antara 20 % sampai 40 %) lebih tinggi dari harga pembelian dengan uang tunai.
  - d) Menempelkan atau memajang stiker kartu kredit dari bank penerbit yang bekerjasama dengan *merchant* dipintu muka toko, kaca

etalase, kaca kasir maupun tempat-tempat lain yang memungkinkan.

b. Hak dan Kewajiban bank penerbit kartu kredit terhadap *merchant*.<sup>79)</sup>

- 1) Hak bank penerbit kartu kredit antara lain adalah :
  - a) menerima biaya administrasi dari jumlah tagihan yang diajukan kepada penerbit.
  - b) Menerima pembayaran dari pemegang kartu.
- 2) Kewajiban bank penerbit kartu kredit adalah membayar setiap tagihan dari merchant dalam jangka waktu yang telah ditentukan, atas setiap slip yang dikirimkan.

Menurut data dari BIL, dalam Perjanjian Usahawan *Visa/Mastercard* tercantum kewajiban bagi pihak *merchant*.

*Merchant* yang akan diajak bekerjasama dengan pihak Bank sebelumnya terlebih dahulu akan diteliti kebonafiditasnannya, karena hal ini menyangkut

---

<sup>79)</sup>Data PT. Bank Internasional Indonesia.



pelayanan terhadap pemegang kartu. Selain itu pihak merchant juga wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengisi dan menandatangani formulir perjanjian usahawan atas perjanjian merchant. Formulir *merchant* ini biasanya berbentuk sudah baku atau standar yang dibuat oleh pihak Bank atau perusahaan yang menerbitkan kartu. Walaupun dibuat oleh satu pihak (dalam hal ini Bank), tetapi pihak *merchant* diberi kesempatan untuk memahami isi perjanjian sebelum menandatangani perjanjian *merchant*. Pasal 12 dari Perjanjian Usahawan Vasa/MasterCard menyebutkan :

Perjanjian ini berlaku sejak di tandatangan dan akan tetap berlaku sampai adanya pemberitahuan pemutusan hubungan perjanjian ini secara tertulis oleh salah satu pihak.

- b. Menunjukkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

SIUP menunjukkan bahwa si pemohon adalah pemilik yang sah dari perusahaan yang akan menerima pembayaran dengan kartu kredit.

- c. Menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- d. Melampirkan KTP.

Berdasarkan pasal 11 dari Perjanjian Usahawan *Visa/MasterCard*, ditetapkan :

- a. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini berlaku KUH Perdata serta ketentuan-ketentuan pemerintah lainnya.
- b. Segala perbuatan atau penambahan terhadap perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak.
- c. Usahawan tidak diperkenankan mengalihkan perjanjian ini, baik seluruhnya maupun sebagian daripadanya kepada pihak manapun juga tanpa persetujuan dari bank.

2.c. Hubungan Hukum Antara pemegang Credit Card Dengan Merchant.

Bentuk hubungan yang ketiga adalah hubungan antara pemegang kartu kredit dengan *merchant*. Hubungan ini terjadi dalam rangka memfungsikan kartu kredit dengan *merchant* didasarkan pula pada perjanjian, dan seringkali tidak tertulis. Perjanjian yang paling lazim dilakukan adalah perjanjian jual beli. Perjanjian yang terjadi ini adalah perjanjian tiga pihak antara pihak penjual, pembeli dan pihak penerbit kartu. Perjanjian tiga pihak ini merupakan aksesoir terhadap perjanjian pokoknya yaitu perjanjian penerbitan kartu kredit antara pihak penerbit kartu kredit dengan pihak pembeli (pemegang kartu kredit).

Jadi dalam hal ini, ketika penjual setuju untuk menjual barang/jasanya kepada pembeli dengan menggunakan kartu kredit, maka sebenarnya sudah terdapat suatu *understanding* yang mengikat bahwa apabila terdapat otorisasi dari pihak penerbit atau siapapun yang menjadi agennya, maka pihak penjual telah setuju bahwa jual beli tersebut tidak dibayar secara *cash*, tetapi akan dibayar oleh pihak penerbit atau agennya ketika slip yang sudah ditandatangani oleh pihak pembeli nantinya diserahkan oleh penjual kepada penerbit atau agennya.

Dengan begitu, *undestanding* diantara pihak penjual dengan dengan pembeli tersebut ,merupakan *terms and conditions* dari perjanjian jual beli yang secara hukum mengikat kedua belah pihak, sama mengikatnya dengan perjanjian jual beli tersebut. Jika otorisasi tidak dimintakan, pihak penerbit juga sudah terikat, karena ketika kartu kredit diterbitkan, pihak penerbit akan membayar harga pembelian barang/jasa kepada siapapun kartu kredit tersebut dipergunakan. Tetapi jika tanpa otorisasi, tentu saja pihak penerbit akan tidak terikat jika dia dapat membuktikan bahwa pemegang dalam melakukan transaksi jual tersebut, tidak dalam mengikuti syarat-syarat yang sudah terlebih dahulu ditetapkan. Misalnya membeli dengan melebihi batas maksimum harga yang dibenarkan.

Hubungan hukum antara pemegang kartu kredit dengan merchant sifatnya insidental dan sementara, maksudnya bahwa hubungan tersebut timbul pada saat itu juga dan berakhir saat itu juga. Dengan demikian hubungan antara pemegang kartu dengan merchant sifatnya sesaat, pada saat transaksi jual beli atau pelayanan jasa. Perjanjian yang timbul antara pemegang kartu dengan merchant juga merupakan perjanjian timbal balik.

Hal tersebut dapat diketahui dari hak dan kewajiban para pihak yang dasarnya seimbang.

Kewajiban merchant adalah menyerahkan barang yang ditransaksikan dan atau memberikan pelayanan jasa yang ditransaksikan, sedangkan kewajiban pemegang kartu kredit adalah membayar barang atau jasa yang dinikmati dengan cara menandatangani slip yang diberikan oleh merchant. Selain itu, kewajiban pemegang kartu secara langsung tidak perlu dipenuhi kepada *merchant*, karena perjanjian kartu kredit dalam arti pembayaran pada merchant telah diambil alih oleh pihak bank penerbit kartu kredit yang bersangkutan.

Pada intinya, perjanjian ini secara tidak langsung terjadi pada saat digunakannya kartu kredit sebagai alat pembayaran. Hubungan diantara para pihak yaitu pemegang kartu, merchant dan penerbit kartu kredit didasarkan pada perjanjian yang masing-masing berdiri sendiri, namun secara tidak langsung saling berhubungan.

Dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh penerbit dengan pemegang kartu dan merchant, dimasukkan ketentuan-ketentuan yang menetapkan bahwa penerbit tidak bertanggung

jawab atau terlibat atau tersangkut dalam hubungan hukum dan perselisihan antara pemegang kartu dan merchant di dalam perjanjian mereka.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan yang tercantum dalam "Perjanjian Usahawan *Visa/MasterCard* BII".

- Pasal 6 huruf g Pembayaran Tagihan

Untuk setiap permintaan copy bukti transaksi, *Cardholder* akan dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Pasal 7 (nomor 6) Penangguhan Pembayaran.

Bank akan membebankan bunga sebesar 2,5% per bulan dari jumlah tagihan yang tidak dibayar penuh. Bunga dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian setelah diperhitungkan pembayaran yang telah diterima pada bulan tersebut.

- Pasal 8 (nomor 3) Pembebanan Kembali (*Change Back*).

*Cardholder* akan dikenakan biaya sebesar 3,5% (tiga setengah persen) dari jumlah yang melampaui *Line Limit*.

2.d. Wanprestasi Dalam Hubungan Hukum Para Pihak yang Terkait Dalam Transaksi Credit Card (Kartu Kredit) Sebagai Alat Pembayaran.

Dalam transaksi kartu kredit kemungkinan timbulnya wanprestasi sangat besar sekali. Hal tersebut disebabkan karena dalam transaksi kartu kredit melibatkan lebih dari dua pihak. Wanprestasi yang mungkin timbul dalam transaksi kartu kredit adalah

1. Wanprestasi yang dilakukan bank penerbit kartu kredit selaku debitur terhadap *merchant*, dalam perjanjian kerjasama antara pihak bank dengan *merchant*.
2. Wanprestasi yang dilakukan pemegang kartu kredit selaku debitur terhadap bank penerbit kartu kredit, dalam perjanjian penerbitan kartu kredit.

Pada dasarnya kemungkinan untuk terjadinya kedua wanprestasi tersebut adalah sama. Namun, pada Bank BNI kemungkinan untuk melakukan wanprestasi terhadap *merchant*-nya sangat kecil. Alasannya adalah bahwa Bank BNI termasuk dalam kategori bank pemerintah yang sehat dan bonafid, serta memiliki reputasi internasional. Selain itu,

pihak merchantlah yang mendatangi bank penerbit kartu kredit untuk menagih pembayaran atas transaksi yang telah dilakukan oleh pemegang kartu kredit. Dengan cara tersebut kecil kemungkinan bagi BNI untuk tidak memenuhi kewajibannya terhadap sesuatu yang telah diperjanjikan.

Secara umum yang sering terjadi adalah bank akan menunda pembayaran kepada merchant, apabila merchant melebihi jangka waktu yang telah diperjanjikan untuk mengirimkan dokumen tagihan transaksi dan saat transaksi tersebut dilakukan. Keterlambatan merchant tersebut dapat mengakibatkan masa berlakunya kartu telah berakhir (*expired*), sehingga bank akan menunda pembayaran pada merchant sampai tagihan bank kepada merchant dibayar terlebih dahulu. Dengan demikian, keterlambatan pembayaran oleh bank bukan semata-mata kesengajaan pihak bank.

Terdapat pula kemungkinan bahwa merchant melakukan wanprestasi yang dimaksud adalah merchant tidak bersedia menerima pembayaran dengan kartu kredit meskipun telah ada perjanjian kerjasama dengan bank



penerbit kartu kredit tersebut. Dalam hal ini merchant harus dapat memberikan penjelasan mengenai tidak diterimanya kartu kredit tersebut sebagai alat bayar. Umumnya merchant menolak untuk menerima apabila kartu yang bersangkutan termasuk dalam daftar hitam, transaksi over limit, dan berlaku terhadap pembelian barang-barang tertentu yang memang harus dibayar *cash*.

Wanprestasi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit selaku debitur dari bank adalah jika pemegang kartu kredit tersebut sama sekali tidak membayar kredit, pada hal tidak ada jaminan uang di bank. Begitu pula yang terjadi di BNI. Wanprestasi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit adalah penunggakan hutang kredit. Apabila wanprestasi terjadi sulit bagi bank untuk sesegera mungkin mendapatkan kembali jumlah kredit yang telah diberikan pada debitur. Kesulitan yang dihadapi BNI adalah tidak adanya jaminan berupa tabungan atau deposito milik pemegang kartu kredit yang berada pada BNI. Seandainya debitur mempunyai jaminan uang di bank untuk mengatasi masalah tersebut yaitu

dengan jalan memperhitungkan tunggakan debitur dengan uang jaminan di bank.

### 3. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Proses Pelaksanaan Perjanjian *Credit Card* ( Kartu Kredit )

Penggunaan *credit card* ( kartu kredit ) dalam dunia perdagangan sebagai alat pembayaran dewasa ini semakin meluas, karena salah satu faktornya adalah kemudahan dalam penggunaannya. Kemudahan inilah yang sering kali mendorong pelaku kejahatan untuk melakukan penyalahgunaan *credit card*.

Modus Operandi dari kejahatan *credit card* ini banyak macam/ragamnya, diantaranya: (pada prinsipnya hampir semua bank sama).

#### 1. *Lost/ Stolen Card* ( Hilangnya Kartu Kredit )

yaitu kartu hilang/dicuri dipakai oleh pelaku dibawah *floor limit* dengan meniru tanda tangan si pemilik kartu. Biasanya dipakai di supermarket.

Modus operandi dalam hal ini sederhana saja. Dimana pihak pemegang kartu kredit berpura-pura menyatakan bahwa

kartu kredit hilang. Baik karena dicuri ataupun bukan, kemudian dia minta dikeluarkan kartu baru secepatnya kepadanya. Kecurangan dilakukan dengan masih menggunakan kartu lama, sebelum dapat dipantau sepenuhnya oleh pihak bank.

## 2. *Countenfeit Card* (Kartu Kredit Palsu).

Modus ini terdiri dari dua jenis :

- Kartu kredit yang dipalsukan sebagian.
- Kartu kredit yang dipalsukan seutuhnya.

Dalam hal ini dibuat suatu kartu kredit palsu yang persis sama dengan kartu kredit yang asli. Lengkap dengan logo pihak penerbit. Kadang-kadang magnetic stripe juga ikut ditiru. Dalam kasus seperti ini biasanya terlibat suatu sindikat nasional, regional maupun internasional. Berhubung meniru kartu kredit seperti ini bukanlah pekerjaan gampang. Karena untuk membuat kartu kredit palsu seperti itu antara lain harus mempunyai mesin yang canggih. Jaringan sindikat tersebut mulsi dari pembuatan kartu kredit palsu, pemberi informasi

nomor kartu kredit palsu, pengedar kartu sampai dengan pemilik toko.

### 3. *Re-Embossed Card/ Altered Card* (Mengubah Kartu Kredit)

- Modus ini menggunakan kartu kredit asli yang telah habis masa berlakunya.
- Relief nomor dan tanggal asli diratakan, lalu dicetak lagi dengan nomor dan masa berlaku yang baru. Hasilnya memang tidak pernah sempurna, kalau diamati dengan cermat, sisa relief lama masih terlihat.

Modus operandi dari perubahan kartu kredit ini relatif simpel

### 4. *Re-Encoded Card*.

- Kartu kredit asli yang telah lewat masa berlakunya diganti kode dalam magnetic stripenya.
- Dengan mesin oendeteksi dan rumus pemecah kode, mereka mengetahui kode yang terdapat dalam magnetic stripe.
- Kode-kode itu kemudian diubah tanpa harus mengganti lembaran magnetic yang menempel di permukaan.

5. *Record Of Change Pumping/Multiple Imprint* ( Pecetakan Berulang- ulang)

yaitu dengan cara mencetak / meng-iprint kartu kredit nasabah pada lebih dari satu sales draft di satu tempat oedagang, yang selanjutnya untuk yang asli sebagai transaksi asli ditandatangani oleh nasabah sedangkan selebihnya disebarkan ke pedagang lain.

Dalam hal ini tokonya yang nakal, dimana penjual barang/jasa mencetak kartu kredit dari konsumennya pada lebih dari satu slip, dan slip yang berlebihan itu kemudian diisi dengan transaksi fiktif.

6. *White Plastic* ( Kartu Putih )

Modusnya yaitu meniru relief nomor-nomor di permukaan kartu kredit yang tercetak pada sales draft yang pernah terjadi, dan dicetak pada kartu plastik polos tanpa logo dan tanda visual lainnya.

Modus operandi ni juga dilakukan oleh penjual yang nakal. Dalam hal ini, penjual meniru relief nomor-nomor di permukaan kartu kredit pelanggannya. Kemudian berdasarkan

relief tersebut, dibuatlah kartu putih yang tidak diberikan logo dan tanda-tanda visual lainnya. Tetapi hanya dibubuhi nomor kartu yang ditiru tersebut. Di luar negeri bahkan dipasang juga *magnetic strip* atas kartum putih tersebut.

#### 7. *Split Charges* ( Pemecah Jumlah Transaksi/ Pemecahan Tagihan )

Modus ini biasanya menggunakan kartu hasil curian dengan memecah jumlah transaksi menjadi transaksi-transaksi kecil di bawah floor limit untuk menghindarimotorisasi.

Modus operandi seperti ini juga memerlukan kerjasama antara pemegang kartu dengan penjual barang/jasa. Dalam hal ini slip pembayaran yang sebenarnya berisi harga yang besar dipecah menjadi beberapa slip sehingga menjadi kecil-kecil. Dengan demikian tidak terkena otorisasi. Karena itu pembeli dapat berbelanja jauh di atas batas maksimum di toko yang bersangkutan.

#### 8. *Spending Spread* ( Penyabaran Pembelian )

Pemilik kartu kredit membeli dengan harga yang kecil-kecil di banyak sekali toko, sehingga melebihi jumlah

pembelian yang maksimum. Dalam hal ini juga tidak terkena otorisasi dari bank penerbit.

#### 9. *Credit Runaway*

Modus ini dilakukan biasanya nasabah sendiri selain untuk menghindari otorisasi juga dapat menghindari *Blocking Card* akibat transaksi yang melebihi kredit limit, dan nasabah melarikan diri

#### 10. *Non-Received Card* ( Kartu Kredit yang Tidak Diterima )

- Modus ini terjadi karena peluang yang berkaitan dengan pengiriman kartu kredit.
- Kartu kredit yang dikirim oleh penerbit tidak sampai pada nasabah dan digunakan oleh orang yang tidak berhak.
- Atau ketika ditagih alamat yang sebenarnya dari pemegang kartu kredit tidak jelas, sementara alamat yang diberikan kepada penerbit bukan alamat yang sebenarnya.
- Atau diberikan alamat perusahaan, yang kemudian perusahaan tersebut pindah alamat dan tidak diketahui oleh penerbit.

#### 11. *Solicited/ Point Of Compromise* ( Kartu dari Bocoran Informasi )

Modus ini merupakan pemberian informasi nomor dan kode kartu kredit yang asli kepada sindikat pemalsu kartu kredit.

Disini ada pihak-pihak, seperti penerbit atau karyawan dari penerbit, ataupun pihak yang dekat dengan pemegang yang membocorkan informasi tentang nomor dan kode kartu kredit kepada suatu sindikat pemalsuan kartu kredit, sehingga dipalsukanlah kartu kredit tersebut.

#### 12. *Mail Order / Telephone Order Fraud* ( Kejahatan Dalam Pengiriman Kartu )

yaitu pemesanan suatu barang melalui surat atau telephone dengan memberikan data kartu kredit nasabah yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak.

Apabila kartu kredit dikirim dengan pos, maka kartu tersebut tidak sampai ke tangan pemegangnya. Biasanya pelakunya adalah orang dalam/ pegawai kantor pos tersebut.



## B. PEMBAHASAN

### 1. Operasionalisasi Pengaturan Perusahaan Penerbit *Credit Card*/Bank, Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia.

#### 1.a. Perusahaan Penerbit *Credit Card*/Bank, Dalam Pelaksanaan Penerbitan *Credit Card* Sebagai Alat Pembayaran.

Pengertian *Credit Card* seperti telah ditulis di muka adalah alat pembayaran melalui jasa perusahaan pembiayaan / bank dalam transaksi jual beli barang/jasa atau alat untuk menarik uang tunai dari perusahaan pembiayaan/bank.

Dengan demikian dapat dikatakan disini bahwa peristiwa *credit card* (kartu kredit) adalah pembuatan hukum (*legal act*) yang menciptakan perjanjian penerbitan *credit card* antara pemegang kartu dan penerbit. Di samping itu, pembuatan hukum yang menciptakan perjanjian penggunaan *credit card* antara pemegang kartu sebagai pembeli, pengusaha dagang sebagai penjual, dan bank/perusahaan pembiayaan sebagai penerbit.

Jadi pendekatan pemanfaatan *credit card* tidak hanya dilakukan dari segi kebutuhan ekonomi, melainkan harus didukung pula oleh pendekatan hukum (*legal approach*), sehingga

diakui dan berlaku dalam hubungan hukum bisnis Jadi dengan demikian *Credit Card* merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi di bidang usaha pembiayaan yang bersumber dari berbagai ketentuan hukum.

Seperti telah disebutkan dimuka, Penerbit *Credit Card* adalah Bank /Perusahaan Pembiayaan sebagai pihak dalam perjanjian penerbitan *credit card*. Apabila Penerbit itu Bank Umum, maka dia harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Dan apabila Penerbit itu Perusahaan Pembiayaan, dia harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Departemen Keuangan<sup>80))</sup>

#### 1.a.1. Aspek Hukum Perusahaan Penerbit *Credit Card*/Bank.

##### 1.a.1.a. Perusahaan Penerbit *credit card*/Bank.

Seperti telah disebutkan, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian *credit card* sebagai alat pembayaran di Indonesia yang bertindak sebagai pihak penerbit *credit card* (kartu kredit) kebanyakan adalah lembaga keuangan Perbankan.

---

<sup>80)</sup> Abdulkadir Muhammad, Rilda Muniarti, SH.Mhum, Op.Cit., hal.269

Untuk itu maka perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Pengertian Bank.

Pengertian mengenai Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Pasal 1 angka 2), adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Jadi bank selain sebagai penyimpan dana juga menjadi badan/lembaga pemberi kredit. Hal tersebut dikarenakan tidak seluruh simpana diambil seluruhnya oleh pihak penyimpan, jadi uang tersebut diputar dalam bentuk kredit, sehingga disamping ada yang mengambil uang adapula yang menyetorkan atau menjadi penyimpan baru. Dari sirkulasi yang terjadi pada Bank tersebut, Bank dapat memperhitungkan berapa dari uang yang tersisa dapat dioperasikan dana perkreditan

(*Ionable Fund*) yang dapat diberikan kepada masyarakat. Bank dapat menetapkan bunga yang harus dibayar masyarakat yang menggunakan fasilitas kredit (debitur) pada Bank itu.

Berdasarkan dana yang dimiliki Bank dan dengan menggunakan prinsip pengelolaan dana (*Fund Management*) yang baik, Bank dapat melaksanakan beberapa fungsi sekaligus, yaitu :

1. Sebagai kasir
2. Perantara kredit
3. Pencipta uang giral
4. Badan pembiayaan/investor.

Status pencipta uang giral terjadi manakala Bank telah menerima titipan dalam bentuk demand deposito. Sedangkan status lembaga pembiayaan tercipta manakala kelebihan dana yang dimilikinya diinvestasikan pada harta yang dapat menghasilkan (*Earning Assets*), seperti surat-surat berharga.

- Jenis Bank

Jenis Bank menurut Undang-Undang Perbankan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 5 ayat 1, tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Th. 1998, yaitu :

\* Bank Umum (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).

Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

\* Bank Perkreditan Rakyat (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).

• Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

- Bentuk Bank.

Dalam Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 21 disebutkan bahwa bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa :

- Perseroan Terbatas.
- Koperasi atau
- Perusahaan Daerah.

Sedangkan bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat menurut Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dapat berupa salah satu dari :

- Perusahaan Daerah
- Koperasi
- Perseroan Terbatas
- Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- Usaha Bank.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, usaha Bank Umum meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito,

tabungan/dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan ini ;

b. Memberikan kredit;

c. Menerbitkan surat pengakuan utang;

Membeli, menjual, atau , menjamin atas resiko sendiri maupun bentuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;

1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diekseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan daam perdagangan surat-surat dimaksud;
2. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
5. Obligasi;
6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. Membeli melalui pelalangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;



- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
- m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah keluar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ketentuan Pasal 6 huruf k dihapus.

Sedangkan Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan ini;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;

- d. Menetapkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Setelah keluar UU Nomor 10 Tahun 1998, ketentuan Pasal 13 huruf c diubah, sehingga Pasal 13 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut : Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

1.a.1.b. Aspek Hukum Perusahaan Penerbit *Credit Card*/Bank.

Dilihat dari sisi perjanjian penerbitan *credit card*, berikut ini merupakan aspek hukum yang perlu diperhatikan adalah berlakunya peraturan undang-undang yang melingkupi perusahaan penerbit *credit card*, yaitu:

- Aspek Hukum Perdata (diluar KUH Perdata)

- \* UU No. 9 Tahun 1969, Tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pelaksanaannya.

Berlakunya UU ini, apabila perusahaan kartu kredit berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero).

- \* UU No 1 Tahun 1995, Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksanaannya.

Berlakunya UU ini apabila perusahaan kartu kredit berbentuk Perseroan terbatas (PT)

- Aspek Hukum Publik

- \* UU No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Peraturan Pelaksanaannya. Berlakunya UU ini karena perusahaan kartu kredit melakukan pendaftaran-pendaftaran ulang dan pendaftaran likuidasi perusahaan.
- \* UU No 12 Tahun 1985, UU No7 Tahun 1991, UU No 8 Tahun 1991 dan Peraturan Pelaksanaannya, semuanya tsb tentang Perpajakan. Berlakunya UU ini karena perusahaan kartu kredit/bank wajib membayar pajak bumi dan bangunan, penghasilan, pertambahan nilai, dsb.
- \* UU No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Berlakunya UU ini karena perusahaan kartu kredit

wajib melaksanakan pembukuan dan pemeliharaan dokumen perusahaan.

- UU No 7 Tahun 1992 jo UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Berlakunya UU ini apabila perusahaan kartu kredit adalah bank atau berurusan dengan bank.
- UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Berlakunya UU ini karena tugas Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi bank.

- Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan.

Peraturan tentang Lembaga Pembiayaan mengatur bidang usaha, pendirian dan perijinan, modal usaha, kepemilikan saham, pembatasan kegiatan usaha pengawasan dan pembinaan, sanksi karena pelanggaran.

(a) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988.

Keputusan Presiden ini mengatur tentang Lembaga Pembiayaan. Dalam keputusan presiden tersebut, Kartu Kredit merupakan salah satu jenis usaha dari lembaga.

pembiayaan yang berbentuk Perusahaan Kartu Kredit. Bentuk Perusahaan Kartu Kredit, adalah Perseroan Terbatas atau Perseroan Terbatas atau Koperasi. Saham Perusahaan Kartu Kredit dapat dimiliki oleh WNI dan atau Badan Hukum Indonesia, Badan Usaha Asing dan WNI atau Badan Hukum Indonesia (usaha patungan). Pewmilikan Usaha oleh Badan Usaha Asing tersebut ditentukan sebesar-besarnya 85% dari modal disetor. Perusahaan Kartu Kredit dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk Giro, Deposito, Tabungan, Surat Sanggup Bayar (*Promissory Note*), tetapi dapat menerbitkan Surat Sanggup Bayar hanya sebagai jaminan atas hutang kepada Bank yang menjadi krediturnya.

(b) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 Tahun 1988.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 Tahun 1988 mengatur tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kemudian keputusan tersebut diubah dan disempurnakan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468 Tahun 1995. Dalam keputusan

tersebut dinyatakan, Lembaga Pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi antara lain usaha Kartu Kredit. Kegiatan Usaha Kartu Kredit dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi Pemegang Kartu untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan Kartu Kredit.

Sebelum melakukan kegiatan usahanya, Perusahaan Kartu Kredit wajib memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan. Izin Usaha diberikan selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Izin Usaha berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berlaku selama Perusahaan Kartu Kredit masih menjalankan usahanya. Terhadap pemberian izin usaha tidak dikenakan biaya. Perusahaan Kartu Kredit wajib secara jelas mencantumkan dalam Anggaran Dasarnya kegiatan pembiayaan yang dilakukannya.

Jumlah modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib bagi Perusahaan Kartu kredit ditetapkan sebagai berikut :

1. Perusahaan Swasta Nasional sekurang-kurangnya 10 milyar rupiah.
2. Perusahaan Patungan Indonesia dan Asing sekurang-kurangnya 25 milyar rupiah.
3. Koperasi sekurang-kurangnya 5 milyar rupiah.

Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Kartu Kredit dilakukan oleh Menteri Keuangan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Departemen Keuangan dan dibantu oleh Bank Indonesia yang diatur dengan surat keputusan bersama. Perusahaan Pembiayaan yang memperoleh izin usaha yang lebih dari 1 (satu) kegiatan pembiayaan, wajib memilih untuk menjadi Perusahaan Pembiayaan atau Perusahaan Modal Ventura. Perusahaan Pembiayaan yang telah memilih menjadi Perusahaan Modal Ventura dilarang melakukan transaksi Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Kartu Kredit, Pembiayaan Konsumen. Perusahaan Kartu Kredit yang melakukan kegiatan pembayaran yang bertentangan dengan ketentuan dalam keputusan ini dihentikan dari kegiatannya atau dicabut izin usahanya. Penghentian kegiatan atau pencabutan izin usaha dilakukan setelah :

1. diberikan peringatan secara tertulis, kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
2. dilakukan pembekuan kegiatan atau izin usaha diberlakukan kembali. Tetapi apabila sampai dengan berakhirnya masa pembekuan tidak juga dilakukan perbaikan, kegiatan dihentikan atau izin usaha dicabut.<sup>81)</sup>

1.a.2.. Aspek Hukum Kegiatan Operasionalisasi Penerbitan Credit Card  
(Kartu Kredit)

1.a.2.a. Aspek Hukum Administrasi Negara

- UU No 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok Pers. diubah dan ditambah dengan UU NO 4 Tahun 1967 dan UU No 12 Tahun 1982 Tentang Undang-Undang Pokok Pers. diperbaharui dengan UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
- Berlakunya UU tsb karena perusahaan kartu kredit/bank melakukan kegiatan pemasaran kartu kredit dengan jalan promosi/iklan. Di Indonesia UU yang secara khusus mengatur

---

<sup>81)</sup> Abdulkadir Muhammad, Rilda Muniarti, Op.Cit. hal.282



tentang Periklanan belum ada, maka acuannya adalah UU yang setingkat yaitu UU tentang Pers

1.a.2.b. Aspek Hukum Perdata ( KUH Perdata )

- Pasal 1338 KUH Perdata ( asas Kebebasan Berkontrak )

Dalam perjanjian penerbitan kartu kredit dasarnya adalah kebebasan berkontrak (pasal 1338 KUHPerdata ) yaitu terjadi persetujuan bilateral antara perusahaan kartu kredit/bank sebagai penerbit dan pemegang kartu sebagai pihak peminjam uang. Sebelum terjadi persetujuan, calon pemegang kartu mempelajari lebih dahulu syarat-syarat yang berlaku terhadap kartu kredit. Apabila syarat-syarat tersebut disetujui, maka calon pemegang kartu mengajukan permohonan untuk menjadi pemegang kartu kredit. Penerbit yang menganggap calon pemegang kartu telah memenuhi kriteria yang ditentukan memberitahukan perseyujuan atas permohonannya disertai penyerahan kartu kredit. Dengan demikian, telah terjadi perjanjian penerbitan kartu kredit dan mengikat secara sah.

- Pasal 1320 KUH Perdata (Syarat sahnya perjanjian)

Perjanjian penerbitan kartu kredit merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*), dibuat secara sah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Konsekuensi yuridis selanjutnya harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*)

Perjanjian penerbitan kartu kredit adalah perjanjian pokok, sedangkan perjanjian penggunaan kartu kredit adalah perjanjian pelengkap (*accessories*). Artinya pembeli tidak akan dapat memperoleh barang/jasa dari penjual tanpa kartu kredit yang diterbitkan oleh Penerbit berdasarkan perjanjian penerbitan kartu kredit. Penjual tidak akan dapat memperoleh pembayaran dari penerbit tanpa surat tanda pembelian yang ditandatangani pemegang kartu berdasarkan perjanjian penerbitan kartu kredit. Dengan

demikian, penerbitan kartu kredit merupakan sumber terjadinya jual beli dan pembayaran.

1.b. Bentuk Perjanjian Credit Card Sebagai Alat Pembayaran.

- Aspek Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Dasar perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Kedudukan hukum kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian adalah seimbang. Di dalam pembuatan kontrak/perjanjian kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan melalui suatu proses negosiasi di antara mereka. Namun pada dewasa ini kecenderungan makin memperhatikan bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak., tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian ini dinamakan perjanjian standart atau perjanjian baku atau perjanjian adhesi.

Menurut pasal 1 ayat (12) UU Perbankan 1992 dirubah dengan UU Perbankan 1998, pasal 1 ayat (11) ditentukan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, namun UU tersebut tidak menentukan lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk persetujuan pinjam-meminjam tsb.

Maksud dari pembentuk UU yang dapat disimpulkan dari bunyi pasal 1 ayt (12) UU Perbankan 1992 dirubah pasal 1 ayat (11) UU Perbankan tahun 1998 itu ialah bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis. Kalau semata-mata hanya dari bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (12). Undang-undang Perbankan 1992 tersebut, maka sulit kiranya untuk menafsirkan bahwa ketentuan tersebut memang menghendaki agar pemberian kredit tidak harus diberikan berdasarkan perjanjian tertulis. Namun ketentuan undang-undang tersebut harus dikaitkan dengan Instruksi Presidium Kabinet No.15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No.2/539/UPK/Pemb. Tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No.2/649 UPK/ Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi

Presidium Kabinet Ampera No. 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Februari 1967, yang menentukan bahwa dalam memberikan Kredit dalam bentuk apapun bank-bank wajib mempergunakan/membuat akad perjanjian kredit.

Dengan menyebutkan dalam ketentuan-ketentuan ini bahwa bank-bank wajib mempergunakan/membuat akad perjanjian kredit, maka dunia perbankan telah menafsirkan bahwa perjanjian kredit bank harus dilaksanakan secara tertulis.<sup>82)</sup>

Seperti telah disebutkan dimuka bahwa dalam praktek perbankan di Indonesia, bank-bank membuat perjanjian kredit dengan 2 bentuk atau cara yaitu :

- (1) Perjanjian kredit berupa akta dibawah tangan.
- (2) Perjanjian kredit berupa akta notaris.

Perjanjiaan kredit yang dibuat bank dengan akta dibawah tangan maupun akta notaris, pada umumnya dibuat dsengan bentuk perjanjian baku yaitu pihak bank dan pihak nasabah, menandatangani suatu perjanjian yang sebelumnya telah dipersiapkan isi atau klausul-klausulnya oleh bank dalam suatu

---

<sup>82) 82)</sup> Sutan Reny Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, 1993, hal. 181.

formulir tercetak. Dalam hal perjanjian kredit bank dibuat dengan akta notaris, maka bank akan meminta notaris berpedoman kepada model perjanjian kredit dari bank yang bersangkutan. Notaris diminta untuk memedomani klausul-klausul dari model perjanjian kredit bank yang bersangkutan.

Oleh karena perjanjian kredit bank di Indonesia dibuat dalam bentuk perjanjian baku, maka sebaiknya kita lihat tentang keabsahan dari perjanjian baku tersebut.

Beberapa pendapat sarjana hukum Belanda dikemukakan berikut ini. Sluijter mengatakan perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha itu (yang berhadapan dengan konsumen) adalah pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Sedangkan Pitlo menyatakan bahwa perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (*dwangcontract*).

Dalam barisan para sarjana hukum yang mendukung perjanjian baku antara lain adalah Stein yang berpendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu,

berarti ia secara sekarela swetuju pada isi perjanjian itu. Asser Rutten mengatakan pula bahwa, setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatangani. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada suatu formulir perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan

kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.

Hondius dalam disertasinya mempertahankan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan "kebiasaan" (*gebruik*) yang berlaku dilingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, berpendapat bahwa keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu lagi dipersoalkan oleh karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Kenyataan itu terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa

perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhkan oleh dan karena itu diterima oleh masyarakat.

Jadi keabsahan berlakunya perjanjian baku itu tidak dipersoalkan tetapi perlu diatur aturan-aturan dasarnya sebagai aturan-aturan mainnya agar klausul-klausul atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian baku itu, baik sebagian maupun seluruhnya, mengikat pihak lainnya.<sup>83)</sup>

Di dalam perjanjian baku juga terdapat apa yang disebut dengan klausul eksemsi ( *eksomerasi* ) yaitu klausula yang berisi pembatasan pertanggungjawaban kreditur.<sup>83)</sup>

Klausul-klausul eksemsi itu dapat muncul dalam berbagai bentuk. Klausul tersebut Dapat berbentuk pembebasan sama sekali dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihaknya apabila ingkar janji (*wonprestasi*). Dapat pula berbentuk pembatasan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut. Dapat pula berbentruk pembatasan waktu bagi orang yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi. Dalam hal yang terakhir ini batas waktu tersebut

---

<sup>83)</sup> Ibid, hal.71

<sup>83)</sup> Ibid, hal.74



sering kali lebih pendek dari batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang bagi seseorang untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi.

Jadi bentuk perjanjian baku dalam pelaksanaan perjanjian *credit card* ini, menurut pendapat penulis adalah sah menurut hukum, karena asas perjanjian adalah kebebasan berkontrak, dan juga dalam hal ini walaupun bentuknya baku/standar, apabila suatu perjanjian telah disepakati bersama dalam bentuk persetujuan tanda tangan (pasal 1320 KUH Perdata) dalam perjanjian kontrak, maka berlakulah pasal 1338 KUH Perdata yaitu perjanjian mengikat kedua belah pihak.

## 2. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Proses Penyelenggaraan *Credit Card* Sebagai Alat Pembayaran.

(berlaku Aspek Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata))

### 2.a. Hubungan Hukum Antara Pihak Penerbit *Credit Card* Dengan Calon Pemegang *Credit Card*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Redjeki Hartono,<sup>84)</sup> Perjanjian yang terjadi dalam penerbitan kartu kredit antara pihak penerbit

---

<sup>84)</sup> Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*, hal. 38

kartu kredit dengan calon pemegang kartu kredit adalah perjanjian kredit. Dinamakan perjanjian kredit karena kartu kredit merupakan salah satu instrumen kredit. Artinya pemegang kartu kredit dapat menikmati barang dan atau jasa dengan tidak harus membayar secara tunai, tetapi dalam tenggang waktu tertentu. Dengan demikian penerapan istilah kredit se-mata-mata karena sistem pembayaran di belakang dengan terlebih dahulu menikmati barang dan atau jasa tersebut.

Perjanjian kartu kredit apabila dikaji lebih lanjut, ternyata didalam KUH Perdata maupun didalam KUHD tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur mengenai perjanjian kartu kredit. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata menentukan bahwa perjanjian baik yang mempunyai nama tertentu, tunduk pada ketentuan umum tentang perjanjian, sebagaimana diatur oleh Bab Kesatu dan Bab Kedua Buku III KUH Perdata.

Ketentuan-ketentuan yang penting dalam Hukum Perjanjian yang berlaku bagi perjanjian penerbitan kartu kredit diantaranya adalah :

#### 2.a.1. Asas Kebebasan Berkontrak.

Sebagaimana diketahui, bahwa sistem hukum perjanjian kita menganut asas kebebasan berkontrak (pasal 1338 ayat (1) KUH

Perdata. Pasal 1338 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1), orang bebas untuk menutup kontrak, mengatur sendiri isi perjanjian yang akan mengikat pembuatnya. Bahkan orang dapat memperjanjikan bahwa ia tak bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul karena kelalaiannya (atau hanya bertanggung jawab sampai batas-batas tertentu saja) <sup>85)</sup>

Terhadap kebebasan berkontrak tersebut hanya dikenal pembatasan dalam Pasal 1337 KUH Perdata : perjanjian tak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan Undang-undang.

Dalam hubungan hukum kartu kredit selalu terdapat 2 (dua) perjanjian

yaitu perjanjian penerbitan kartu kredit dan perjanjian penggunaan kartu kredit. Kedua tersebut dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

---

<sup>85)</sup> J. Satrio, Op.Cit., hal.360

## 2.a.2. Syarat Sahnya Perjanjian.

Perjanjian Penerbitan dan Penggunaan kartu kredit merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) dibuat secara sah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata <sup>86)</sup>

Adapun ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

### a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Perjanjian penerbitan kartu kredit adalah bentuk perjanjian baku. Artinya adalah bahwa isi dari perjanjian tersebut ditentukan secara sepihak, yakni pihak BNI. Dalam menyusun isi perjanjian tidak ada kompromi antara calon pemegang kartu kredit dengan bank. Hal yang membuktikan bahwa debitur menerima dan akan sepakat mengenai ketentuan-ketentuan yang akan mengikat debitur terjadi pada saat calon pemohon mengirimkan aplikasi. Kalimat didalam lembaran aplikasi, yang mengatakan bahwa calon pemegang akan sepakat terhadap isi perjanjian

---

<sup>86)</sup> Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, Op.Cit.,hal.278.

adalah :

"Saya memahami Ketentuan Umum Pemegang Kartu Kredit BNI yang tertera pada aplikasi ini. Jika aplikasi ini disetujui, maka saya tunduk pada Ketentuan Umum Pemegang Kartu Kredit BNI dan bertanggung jawab atas penggunaannya".

Selanjutnya apabila aplikasi tersebut disetujui, maka Bank BNI akan mengirimkan surat pemberitahuan beserta pemberitahuan beserta kartu kreditnya. Didalam surat pemberitahuan tersebut, dicantumkan syarat yang membuktikan bahwa calon pemegang kartu sepakat terhadap isi perjanjian. Hal tersebut ditandai dengan kalimat

"Untuk keamanan penggunaan kartu, tanda tangan Anda sangat diperlukan pada tempat yang telah tersedia di bagian belakang kartu yang juga berarti anda menyetujui Ketentuan bagi Pemegang Kartu Kredit Bank BNI yang tercantum dibalik halaman ini. Jika kartu ini adalah Kartu Baru silahkan menghubungi Layanan Telepon 24 jam

Teleplus BNI di (021) 572.8888 untuk mengaktifkan kartu anda dan dalam beberapa hari ini anda akan menerima PIN (*Personal Identification Number*).

Apabila calon pemegang kartu setuju, maka ia akan menandatangani kartu tersebut dan menghubungi nomor telepon yang telah dicantumkan. Kesepakatan diantara bank dengan calon pemegang terjadi pada saat ini. Artinya kesepakatan antara Bank dengan debitur sudah jelas terjadi saat debitur menghubungi nomor telepon, guna mengaktifkan kartu kreditnya. Pada saat itu bank mengetahui secara langsung bahwa debitur sepakat mengenai isi dan ketentuan umum bagi pemegang kartu. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kesepakatan diantara kedua belah pihak telah tercapai.

Pada prinsipnya kesepakatan tersebut sudah tidak murni lagi, karena bentuk dan isi perjanjian telah dibuat sebelumnya oleh bank, kemudian baru disodorkan kepada calon pemegang kartu, apakah menyetujui isi perjanjian tersebut atau tidak. Jadi bentuk dan isi perjanjian itu sebenarnya sudah baku, atau sudah ada ketentuan-

ketentuan yang sifatnya telah standar (standarr form). Oleh karenanya, kesepakatan yang terjadi sudah tidak murni lagi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Namun demikian, peranan terutama dalam dunia usaha semakin dirasakan sebagai salah satu faktor yang merupakan kebutuhan, sehingga apabila konsumen atau debitur yang dihadapi dalam jumlah banyak dan kasus sama, dirasa perlu untuk lebih dahulu mempersiapkan isi dan bentuk perjanjiannya. Oleh karena itu perjanjian baku semakin mendapat tempat dan semakin berkembang dalam masyarakat.

Dalam perjanjian baku atau standart, terdapat unsur keamanan dan kepercayaan para pihak untuk mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Debiturpun secara sadar dan nyata setuju pada isi perjanjian dan tidak merasa terpaksa untuk menyepakati isi perjanjian tersebut. Selain itu, posisi debitur yang hanya membubugkan tanda tangan sebagai tanda sepakat, dianggap dapat bertanggung jawab sendiri terhadap isi dan apa yang ditandatangani. Hal tersebut

menjadi syarat tersebut, maka pihak pemohon dinyatakan cakap untuk membuat suatu perjanjian. Selanjutnya akan disebut sebagai pemegang kartu. Adapun definisi Pemegang kartu adalah seorang yang namanya tercantum pada kartu dan berhak menggunakan kartu tersebut.

Namun, apabila selama waktu berlakunya kartu kredit tersebut terjadi suatu hal yang menyebabkan pemegang kartu kredit menjadi tidak cakap, maka bank secara sepihak akan mengakhiri masa berlakunya kartu kredit tersebut. Ketentuan tersebut dinyatakan dengan kalimat pada point XI (1) (Ketentuan Umum Bagi Pemegang Kartu Kredit Bank BND). "Bank akan memblokir atau mengakhiri masa berlaku kartu dan karenanya seluruh tagihan menjadi jatuh tempo serta harus dibayar sekaligus apabila pemegang kartu dinyatakan pailit, diletakkan di bawah pengampunan atau dinyatakan tidak berhak untuk mengelola harta kekayaan karena sebab apapun....."

b. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu maksudnya adalah mengenai isi dari perjanjian penerbitan kartu kredit, yang antara lain mengatur



mengenai hal yang diperjanjikan, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hal yang diperjanjikan dalam perjanjian ini adalah mengenai penerbitan kartu kredit.. Lebih jelas lagi, kartu yang dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan dalam surat balasan pada point 'PERIHAL : KARTU BARU BNI MASTERCARD ANDA" (terlampir).

d. Sebab yang halal

Sebab yang halal dalam hal ini adalah tujuan yang ingin dicapai para pihak dalam membuat perjanjian. Tujuan dari perjanjian penerbitan kartu kredit bagi bank adalah memberikan fasilitas kredit baik bagi nasabah yang bersangkutan ataupun pihak lain yang bukan merupakan nasabah dari bank tersebut. Adapun tujuan bagi pemegang kartu kredit adalah memperoleh kemudahan melakukan pembayaran tanpa menggunakan uang tunai. Secara umum tujuan kedua belah pihak dalam membuat perjanjian adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Dalam Pasal 6 titik 1 Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1998, menyebutkan bahwa usaha bank umum adalah melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.

Selain itu, hal yang diperjanjikan dalam perjanjian kartu kredit harus halal atau diperbolehkan, dalam arti tidak dilarang oleh Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

#### 2.a.3. Perjanjian Pinjam Pakai Habis.

Perjanjian penerbitan kartu kredit antara penerbit dan pemegang kartu dapat digolongkan kedalam "perjanjian pinjam pakai habis" yang diatur dalam pasal 1754 - 1773 KUH Perdata.

Menurut Pasal 1754 KUHPerdata yang dimaksud dengan "Pinjam Pakai Habis" adalah suatu perjanjian, dalam mana ditentukan bahwa pihak yang memberi pinjaman (kreditur) menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai (*in casu uang*) kepada pihak peminjam dengan syarat, bahwa pihak peminjam tersebut akan mengalihkan barang

sejenis (*in casu uang*) kepada pihak pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Selanjutnya ditentukan pula bahwa apabila yang dipinjamkan tersebut berupa sejumlah uang, maka para pihak diperkenankan untuk memperjanjikan pengembalian uang pokok plus bunga (*vide* pasal 1765 KUH Perdata).

Salah satu karakteristik dari perjanjian pinjam pakai habis adalah bahwa begitu perjanjian selesai dilakukan, maka barang pinjaman tersebut menjadi milik mutlak dari pihak perjanjian (debitur), sehingga apabila barang tersebut musnah karena sebab apapun, maka kerugian tersebut menjadi tanggungan peminjam sendiri (*vide* Pasal 1755 KUHPerdata).

Karakteristik lainnya adalah pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan (*in casu* pembayaran hutang) sebelum lewat waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian. Lihat Pasal 1759 KUHPerdata. Kecuali jika ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi yang menurut perjanjian tersebut, pihak peminjam diharuskan membayar hutang sebelum jatuh tempo. Tetapi pemutusah perjanjian karena salah satu syarat tidak dipenuhi haruslah dilakukan lewat jalur pengadilan. Lihat

Pasal 1266 KUHPerdata. Seringkali dalam praktek. Lihat Pasal 1266 KUHPerdata telah dengan tegas dikesampingkan oleh para pihak. Kita telah menemukan beberapa kasus pengadilan, seperti misalnya dalam kasus-kasus pemutusan perjanjian kredit bank, dimana sungguhpun Pasal 1266 tersebut telah dengan tegas oleh para pihak, tetapi oleh pengadilan pemutusan perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Dengan demikian pengadilan menafsirkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal 1266 tersebut sebagai mandatory, yang tidak dapat dikesampingkan oleh kedua belah pihak. Melihat bunyi Pasal 1266 KUH Perdata tersebut seperti penafsiran pengadilan yang demikian memang sudah tepat, sungguhpun ketentuan seperti itu terasa sangat kaku dan tidak praktis bila dipraktekkan.

#### 2.a.4. Penyelesaian Masalah Bila Terjadi Wanprestasi.

Apabila terjadi masalah wanprestasi antara pemegang kartu dengan penerbit kartu, penyelesaian pertama adalah dengan memakai/berpedoman pada ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan " si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akte sejenis itu telah

dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Perkataan akta sejenis dimaksudkan sebagai peringatan tertulis, saat ini sudah lazim ditafsirkan sebagai pemberitahuan atau peringatan yang juga boleh dilakukan secara lisan, asal cukup tegas menyatakan desakan agar debitur segera memenuhi prestasi.

Sarana hukum yang lain selain pasal 1238 KUHPerdara diatas, yang dapat digunakan bagi penyelesaian hutang piutang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Undang-Undang tersebut menjanjikan suatu prosedur yang tidak bertele-tele yaitu penyelesaian hutang piutang yang cepat, adil, terbuka dan efektif.

Berdasarkan undang-undang tersebut pemegang kartu kredit yang wanprestasi dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. Namun bank tidak gegabah menggugat semua penunggak, sebab biaya pendaftaran gugatan pailit mahal yaitu 5 juta. Jika hutang yang dipermasalahakan dibawah 5 juta, maka tidak ada keuntungan bagi bank membawa ke meja hijau. Dengan

demikian keberadaan Asosiasi kartu Kredit Indonesia selaku jembatan bagi para penerbit kartu kredit, membatasi kriteria tentang siapa yang dapat diajukan ke meja hijau, yaitu mereka yang mempunyai hutang lebih dari 30 juta, dan sama sekali tidak memenuhi pembayaran selama 6 bulan

Melihat begitu mahal dan sulitnya proses yang akan terjadi apabila wanprestasi diajukan ke meja hijau, maka bank lebih memilih upaya damai dan negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak, yaitu bank tetap mendapatkan pembayaran dan pihak pemegang kartu kredit mendapatkan kemudahan untuk melunasi tunggakan kreditnya.<sup>87)</sup>

Apabila pemegang kartu kredit melakukan wanprestasi dengan menunggak untuk membayar kredit, maka bank akan berupaya agar kredit yang diberikan kembali. Upaya yang dilakukan bank adalah mulai berkirim surat pemberitahuan, sampai bank menemui pemegang kartu kredit, melakukan negosiasi dengan melunakan pembayaran secara mencicil sampai beberapa kali hingga hutang dapat terlunasi.

---

<sup>87)</sup> Kontan No.12, Edisi III Tahun 1998.

#### 2.a.5. Jaminan dalam Penerbitan *Credit Card*.

Menurut Retnowulan Sutantio, kartu kredit adalah kredit tanpa jaminan. Syarat yang diminta bank untuk memperoleh kartu kredit, pada umumnya hanyalah, bahwa yang bersangkutan adalah nasabah bank dan memiliki rekening koran dan suatu saldo minimum, yang jumlahnya berbeda-beda, sesuai dengan ketentuan dari bank yang bersangkutan. Saldo minimum ini kedudukannya, bukanlah sebagai jaminan, jadi bukan jaminan materiil atau jaminan immateriil.<sup>38)</sup>

Beberapa bank mensyaratkan bagi pemegang kartu kredit yang tidak memiliki rekening koran di bank tersebut, untuk menyediakan deposito sebagai jaminan. Syarat-syarat seperti ini boleh saja diadakan dan berlaku bagi kedua pihak, justru oleh karena Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka.

Persaingan bank yang berusaha menguasai pasar kartu kredit, dilakukan dengan cara berlomba-lomba menciptakan produk yang praktis dan efisien.

Kartu kredit yang dikeluarkan oleh Citibank tidak mensyaratkan bagi pemegang kartu tersebut, untuk menjadi

---

<sup>38)</sup> Retnowulan Sutantio, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Op.cit, hal.75

nasabah dan memiliki rekening koran. i kartu kredit diserahkan tanpa saldo, yang tersedia, dan tanpa jaminan Citibank hanya mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya melalui penilaian terhadap watak debitur.

Yang diamati dan dipertimbangkan adalah hal-hal :

- Surat keterangan bayar pajak.
- Surat ijin Usaha Pendirian Perusahaan.
- Anggaran dasar perusahaan.
- Pendapatan atau penghasilan.
- Kegiatan lain yang dilakukan debitur pada bank-bank lain.

Informasi dari bank-bank lain mengenai keadaan debitur, dan sebagainya. Hal-hal ini yang dipakai oleh Citibank untuk memperoleh keyakinan akan kemampuan debiturnya, justru oleh karena kemampuan seseorang terlihat dari besarnya pajak yang dibayar, penghasilan setiap bulan dan sebagainya.

Bunga yang dibayar adalah cukup besar, yaitu 3,25 persen perbulan. Jumlah ini lebih besar apabila dibandingkan dengan bunga yang ditetapkan oleh bank-bank pada umumnya, yaitu sekitar 2 - 1,5 persen.



Dari uraian tersebut diatas, nampak jelas bahwa kartu kredit merupakan suatu perjanjian tanpa jaminan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan penulis, kenyataannya ada Bank-bank penerbit kartu kredit yang mensyaratkan adanya jaminan dalam pelaksanaan kartu kreditnya, yaitu tertuang dalam perjanjian (dalam hal kelayakan kartu kredit yang dikeluarkan yaitu adanya syarat *The five C's of Analysis*).

Didalam point perjanjian dengan Bank (no.7) Petunjuk Layanan kartu kredit Bank BNI ditegaskan bahwa "Pemegang Kartu bersedia secara sukarela untuk menyerahkan harta kekayaan milik Pemegang Kartu baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak kepada Bank, apabila Pemegang kartu tidak dapat menyelesaikan semua kewajiban yang timbul sebagai akibat penggunaan Kartu tersebut".

Jadi jelas disini walaupun dalam teori, kartu kredit adalah jenis kredit tanpa jaminan, tetapi dalam pelaksanaannya Bank (pihak penerbit) untuk mengurangi resiko yang timbul, ada yang mencantumkan jaminan dalam perjanjian kartu kreditnya.

#### 2.a.b. Bentuk Perjanjian.

Hubungan antara pihak penerbit *credit card* (kartu kredit) dengan calon pemegang kartu kredit seperti terlihat dalam pelaksanaan (praktek) penerbitan kartu kredit adalah suatu hubungan hukum yang dituangkan dalam dokumen perjanjian. Perjanjian ini dibuat sepihak oleh pihak penerbit kartu kredit yang dituangkan dalam dokumen perjanjian. Perjanjian ini dibuat sepihak oleh pihak penerbit kartu kredit. Perjanjian tersebut berisi tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak. Dokumen perjanjian ini disodorkan pada pihak calon pemegang kartu kredit dan apabila calon pemegang setuju terhadap isi dokumen tersebut maka calon pemegang tinggal membubuhkan tanda tangan pada dokumen perjanjian kartu kredit tersebut.

Dokumen yang dibuat sepihak seperti tersebut diatas, dibuat dalam bentuk baku dan berlaku secara uniform.

#### 2.b. Hubungan Antara Pihak Penerbit Credit Card Dengan Merchant (Penjual/Pengusaha Dagang).

Sama halnya dengan hubungan hukum antara Pihak Penerbit Kartu Kredit dan Pemegang Kartu Kredit, dalam hubungan hukum antara Pihak Penerbit Kartu Kredit dan Merchant, tunduk pula pada ketentuan hukum perjanjian (buku III bab Kedua KUH Perdata).

Adapun ketentuan-ketentuan penting dalam hukum perjanjian yang melingkupi hubungan hukum para pihak ini adalah :

#### 2.b.1. Jenis perjanjian.

##### 2.b.1.a. Perjanjian Kerja Sama.

Dasar hubungan antara bank penerbit kartu kredit dengan merchant adalah atas dasar kerjasama yang saling menguntungkan dengan mewajibkan pada merchant untuk melakukan pekerjaan tertentu. Unsur saling menguntungkan diperoleh apabila *merchant* melakukan transaksi dengan pemegang kartu kredit yang menggunakan kartu kredit dari bank yang telah mengadakan hubungan kerja dengan *merchant*.

Pada hakekatnya, perjanjian antara bank penerbit kartu kredit dengan *merchant* hanyalah merupakan sarana keikutsertaan pihak penerbit sebagai salah satu pihak dalam perjanjian jual beli antara *merchant* dengan pemegang kartu kredit. Dengan keikutsertaan pihak bank penerbit kartu kredit tersebut, maka timbullah perjanjian segitiga dalam transaksi kartu kredit.

Secara umum perjanjian antara pihak bank penerbit kartu kredit dengan *merchant* sama halnya dengan penerbitan kartu kredit. Perbedaannya hanyalah terdapat pada inisiatif awal untuk mengadakan perjanjian. Pada perjanjian penerbitan kartu kredit, inisiatif pertama datang dari calon pemegang kartu kredit dengan mengajukan permohonan pada lembar aplikasi, sedangkan pada perjanjian antara bank penerbit kartu kredit dengan *merchant* inisiatif pertama untuk mengadakan perjanjian antara bank dengan *merchant* merupakan perjanjian kerjasama yang diadakan untuk

kepentingan pihak ketiga, sedangkan perjanjian penerbitan kartu kredit adalah perjanjian kredit. Perjanjian penerbitan kartu kredit dan perjanjian kerjasama (perjanjian *merchant*) merupakan jenis perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak.

Bank penerbit kartu kredit dapat terlebih dahulu mengajukan inisiatif kerjasama dengan tempat-tempat, usaha tertentu yang dinilai cukup *profitable*. Walaupun inisiatif tersebut dapat muncul dari pihak *merchant* yang ingin melakukan kerjasama dengan suatu bank yang memiliki fasilitas kartu kredit. Tujuan *merchant* tersebut adalah agar transaksi jual beli yang terjadi dapat dijamin pembayarannya oleh suatu bank.

Secara umum bank penerbit kartu kredit memiliki kualifikasi dalam melakukan kerjasama dengan *merchant*. Kualifikasi yang hendaknya dimiliki *merchant* tersebut adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai rekening koran pada salah satu bank.
- b. Identitas pemilik dan identitas perusahaan tersebut jelas yaitu nama, alamat dan jenis usaha, serta mempunyai Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
- c. Frekwensi dan jurnal transaksi yang dilakukan dinilai cukup tinggi (*profitable*).
- d. Lokasi usaha memungkinkan atau cukup strategis.

#### 2.b.1.b. Perjanjian Jual Beli Segitiga.

Tidak ada suatu perjanjian khusus yang bersifat bilateral antara pihak penjual dengan pihak penerbit. Yang ada hanya keikutsertaan pihak penerbit sebagai salah satu pihak dalam perjanjian jual beli antara pihak penjual dengan pihak pemegang (pembeli). Dengan demikian perjanjian jual beli tersebut menjadi perjanjian segitiga.

Sebenarnya dengan penerbitan kartu kredit, pihak penerbit sudah dian perjanjian segitiga tersebut diperkuat lagi (dikonfirmasi) setelah diberikan otorisasi (biasanya via telepon) terhadap penjual dalam jual beli yang bersangkutan, karena jual beli yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dibayar. Kira-kira otorisasi tersebut dapat diartikan bahwa pihak penerbit setuju untuk membayar harga pembelian terhadap jual beli yang spesifik tersebut. Konfirmasi tersebut dapat juga disertai dengan dikeluarkannya daftar nama dan nomor pemegang kartu kredit secara berkala yang ditujukan ke toko-toko besar.

Akan tetapi, tanpa otorisasi/konfirmasi tersebut, artinya dengan penerbitan kartu kredit saja, pihak penerbit sudah mengikat secara hukum, asal jual beli dilakukan dengan syarat-syarat yang telah digariskan. Misalnya harganya tidak melebihi batas maksimum yang diperbolehkan. Jika misalnya terjadi jual beli dengan harga diatas nilai maksimum,

maka ini merupakan kesalahan dari pihak pembeli, karena dia tidak diperbolehkan untuk membeli diatas harga maksimum tersebut. Dalam pembeilan diatas harga maksimum, pihak penerbit baru bertanggung jawab jika dia telah memberikan otorisasinya. Karena, kenapa penerbit memberi otorisasinya jika jual beli diatas harga meksimum. Bila jadi karena penerbit telah memtolerir, dalam hal ini berasrti dia telah mengasumsi kewajibannya ataupun bisa jadi juga adanya kesilapan. Dalam hal kedua kemungkinan tersebut, tentunya pantas jika dia bertanggung jawab untuk membayar harga jual beli tersebut kepada pihak penjual, tanpa mengurangi hak penerbit untuk meminta penagihan secara penuh kepada pemegang kartu, sesuai dengan perjanjian yang berlaku.<sup>88)</sup>

#### 2.b.2. Bentuk Perjanjian.

---

<sup>88)</sup> Munir Fuady, Op.Cit., halaman 189.



Bentuk perjanjian kerjasama antara bank penerbit kartu kredit dengan *merchant* adalah bentuk perjanjian baku, karena formulir perjanjian secara sepihak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak penerbit kartu kredit yang memuat syarat-syarat kedua pihak, dalam bentuk tertulis (dokumen) dan bersifat *uniform*.

### 2.b.3. Syarat Sahnya Perjanjian.

Syarat agar perjanjian tersebut dinyatakan sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, maka perjanjian tersebut haruslah tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian tersebut haruslah memenuhi unsur :

#### a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Seperti halnya perjanjian penerbitan kartu kredit, dalam perjanjian antara bank penerbit kartu kredit dengan merchant bersedia menandatangani perjanjian tersebut. Detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak adalah pada saat kedua belah pihak membubuhkan tanda tangan pada lembar perjanjian

tersebut. Terkesan bahwa kesepakatan yang terjadi adalah tidak murni, kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan KUHPdata, karena tidak ada unsur paksaan, tekanan dan ancaman dalam menandatangani perjanjian tersebut. Walaupun isi perjanjian tersebut ditentukan secara sepihak oleh bank penerbit kartu kredit, namun merchant tidak merasa dirugikan, karena dasar hubungan antara kedua belah pihak adalah kerjasama yang saling menguntungkan.

b. Kecakapan para pihak.

Kecakapan para pihak yang dimaksud adalah kecakapan dari pihak bank penerbit dengan pihak merchant. Dalam hal ini karena bank merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, maka dalam perjanjian ini bank akan diwakilkan oleh seseorang yang telah diberi wewenang untuk itu oleh bank yang bersangkutan. Pihak merchant biasanya akan diwakilkan oleh pemilik perusahaan yang bersangkutan atau pimpinannya atau oleh seseorang yang telah diberi kuasa dan wewenang untuk itu. pihak yang mewakilkan

tersebut harus cakap bertindak dalam lalu lintas hukum, khususnya untuk membuat perjanjian. akapan yang dimaksud adalah yang sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c. Suatu hal tertentu.

Isi dari perjanjian *merchant* adalah hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Antara kedua belah pihak tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara satu pihak terhadap pihak yang lain.

d. Sebab yang halal.

Tujuan dari diadakannya perjanjian *merchant* adalah memberikan keuntungan kepada masing-masing pihak dari kerjasama tersebut. Selain itu masing-masing pihak memiliki tujuan tersendiri dari hubungan tersebut.

Tujuan pihak bank penerbit kartu kredit, selain ingin memberikan kemudahan pembayaran kepada nasabah melalui fasilitas kartu kredit, juga ingin memperoleh komisi dari pihak *merchant*. Adapun tujuan dari *merchant* adalah adanya jaminan pembayaran dari pihak bank atsa

transaksi jual beli yang dilakukan oleh pemegang kartu atas transaksi barang dan atau jasa yang tidak harus dibayar dengan tunai.

#### 2.b.4. Perjanjian Pihak Ketiga.

Perjanjian antara bank penerbit kartu kredit dengan merchant mewajibkan bank untuk membayar setiap tagihan merchant karena transaksi *merchant* dengan pemegang kartu kredit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Redjeki Hartono, dikatakan bahwa perjanjian merchant tersebut merupakan perjanjian pihak ketiga, seperti yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara.

Dari perjanjian yang dilakukan antara bank dengan merchant penyusun dapat menafsirkan bahwa perjanjian tersebut mengakomodasi kepentingan pihak ketiga. Selain untuk memperoleh keuntungan bagi masing-masing pihak, perjanjian merchant tersebut diadakan karena terdapat kepentingan pihak ketiga, yaitu pemegang kartu yang akan diakomodasi dalam perjanjian merchant tersebut.

#### 2.b.5. Subrogasi.

Penerbit menentukan persyaratan-persyaratan umum terhadap perusahaan bahwa dengan membayar jumlah yang tercantum dalam salesslip kepada perusahaan dia akan di subrogasi dalam hak menagih dari perusahaan terhadap pemegang kartu (De Rooy, 1989 : 30). Subrogasi ini berakibat bahwa tagihan itu dengan hak-hak yang berkaitan dengannya beralih kepada orang yang disubrogasi (pasal 1401 ayat 1 KUH Perdata). Ini berarti bahwa setelah pembayaran atas salesslip, piutang-piutang yang diistimewakan yang ada pada penjual berdasarkan pasal 1139 (3) KUH Perdata yang mengatur tentang harga pembelian yang belum dibayar atas barang bergerak beralih kepada penerbit. Piutang yang diistimewakan ini penting artinya apabila dalam pembelian tersebut terdapat barang yang relatif mahal, seperti perhiasan dan sebagainya.<sup>89)</sup>

---

<sup>89)</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Kartu Kredit (Credit Card)*, Penataran Dosen Hukum Perdata/Dagang, Yogyakarta 16-28 Nopember /30 Nop – 12 Desember 1992, hal.9

2.c. Hubungan Hukum Antara Pemegang Credit Card Dengan Merchant < Hubungan Hukum Perjanjian Jual-Beli >.

Telah dilihat dalam hasil penelitian, bahwa hubungan hukum antara pemegang *credit card* (kartu kredit) dengan *merchant* adalah hubungan hukum perjanjian jual beli (Buku III Bab V KUHPerdato).

Didalam perjanjian jual beli, khususnya jual beli dengan sistem kartu kredit, banyak timbul permasalahan hukum diantaranya :

- Pembatalan Perjanjian.

Dalam hal pembatalan perjanjian jual beli, kita lihat pada sistem perjanjian yang dimuat oleh buku ketiga KUH Perdata ada *terms dan conditions* berupa *understanding* antara pihak pembeli dengan pihak penjual bahwa harga akan dibayar oleh pihak penerbit kartu kredit tersebut sudah mengikat, dan apabila terjadi pembatalan sepihak harus lewat pengadilan negeri yang berwenang (1266 KUHPerdato). Seperti telah disebutkan, bahwa masih terdapat kontroversi pendapat tentang boleh tidaknya pasal 1266 dikesampingkan. Tetapi sungguhpun boleh dikesampingkan,

hal tersebut jarang dilakukan dalam praktek jual beli. Apabila terhadap jual beli yang dilakukan secara lisan saja.<sup>90)</sup>

- Gugatan Pihak Penjual terhadap Pembeli.

- \* Penjual dapat menggugat pihak pembeli berdasarkan teori bahwa yang terjadi antara penjual dengan pembeli adalah semacam perjanjian jual beli dengan syarat batal, vide Pasal 1253 KUH Perdata. Artinya, jual beli itu sudah terjadi ketika slip pembayaran telah ditandatangani oleh pihak pembeli, dan perjanjian jual beli tersebut akan batal jika syarat pembayaran oleh pihak penerbit karena alasan apapun tidak dilakukan. Kurang tepat untuk mengatakan bahwa pembayaran oleh pihak penerbit merupakan syarat tangguh, mengingat jual beli sudah terjadi saat penandatanganan slip pembayaran oleh pembeli. Karena sejak saat tersebut pembeli sudah bebas untuk menggunakan barang hasil pembeliannya itu. Sehingga seluruh resiko yang mungkin terjadi atas barang tersebut sudah menjadi tanggungan pembeli. Tetapi apabila dianggap itu syarat

---

<sup>90)</sup> Munir Fuady, Op.Cit., hal.187.

tangguh, maka sebelum dibayar lunas oleh penerbit kartu kredit, resiko masih dibebankan atas pundak penjual, dan jual beli dianggap belum pernah ada, vide Pasal 1264 KUHPerdara. Dalam kasus jual beli dengan kartu jual beli dengan kartu kredit, hal tersebut dirasakan tidak adil.

Karena jual beli dengan kartu kredit dapat dianggap sebagai perjanjian dengan syarat batal, maka apabila syarat batalnya terjadi, *in casu* tidak dibayarnya harga oleh pihak penerbit kartu kredit, maka menurut Pasal 1265 KUHPerdara, barang tersebut harus dikembalikan kepada pihak penjualnya.

- \* Pihak penjual dapat juga langsung menuntut pihak penerbit, berhubung pihak penerbit telah memberi persetujuannya untuk membayar dengan jalan memberikan otorisasi (biasanya lewat telepon) kepada pihak penjual. Dengan otorisasi tersebut, pihak penerbit telah bersetuju dan mengikat dirinya untuk membayar harga pembelian barang/jasa tersebut. Sehingga, jika penerbit tersebut tidak membayarnya, penjual dapat langsung menggugat pihak penerbit tersebut.



Tetapi jika perjanjian penerbitan kartu kreditnya batal, misalnya ada penipuan oleh pihak pemegang, maka jual belipun harus dianggap batal. Hal ini dikarenakan perjanjian penggunaan kartu kredit (antara pihak penerbit, pemegang dan pembeli) tersebut adalah *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian penerbitan, kartu kredit antara penerbit dengan pemegang kartu kredit. Andaikata pihak penjual dirugikan karenanya, maka pihak pembeli tersebut dapat menggugat siapa yang telah melakukan penipuan tersebut, *in casu* pihak pemegang kartu. Gugatan ganti rugi tersebut dapat didasari atas perbuatan melanggar hukum, *vide* Pasal 1365 KUH Perdata. Bukan atas dasar wanprestasi atas perjanjian tertentu.<sup>90)</sup>

### 3. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Proses Pelaksanaan Perjanjian *Credit Card*.

---

<sup>90)</sup> Ibid, halaman 188.

Salah satu aspek dari penggunaan kartu kredit yang juga cukup penting jika ditinjau dari segi hukum adalah aspek perlindungan konsumen.

Konsumen yang perlu dilindungi dalam masalah kartu kredit adalah semua pihak yang terkait dalam perjanjian kartu kredit yaitu pemegang kartu kredit berhadapan dengan pihak penerbit kartu kredit, pihak penjual barang/jasa, dan juga pihak penerbit kartu kredit itu sendiri.

Di Indonesia belum ada peraturan yang secara khusus mengatur masalah perlindungan konsumen yang berhubungan dengan kartu kredit seperti halnya di USA.

Di USA peraturan yang berhubungan dengan perlindungan hukum konsumen kartu kredit, misalnya :

- (1) Uniform Commercial Code
- (2) A Model Uniform Consumer Credit Code (1974)
- (3) Regulation of Federal Trade Commission (1975)
- (4) Fair Credit Billing Act.
- (5) Truth in Lending Act.
- (6) Consumer Credit Protection Act.
- (7) The Equal Credit Opportunity Act.

(8) *Tehe Credit Card Fraud Act (1984).*

Sebagai tindakan pencegahan atas tindak kejahatan menggunakan kartu kredit sementara ini penanganannya di Indonesia adalah dengan :

3.a. Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI).

Di Indonesia telah dibentuk Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) yang anggotanya terdiri dari 9 Bank-Bank *Issuer* yaitu Bank Central Asia, Bank Duta, Bank Bali, BII, Amcx, Citybank, Dinnars Club, Lippobank dan Bank Danamon. Adalah kewajiban AKKI sebagai satu-satunya wadah yang ada bagi pengawasan peredaran kartu kredit di Indonesia untuk mengusulkan kepada Pemerintah agar segera mengadakan peraturan yang jelas berkaitan dengan pemakaian kart<sup>u</sup> kredit di Indonesia.

AKKI selalu memantau semua anggotanya, yaitu ke-9 bank-bank *issuer*, pihak-pihak penerima pembayaran dengan kartu kredit (*merchant*) serta masalah yang menyangkut penyalahgunaan transaksi dengan kartu kredit.

3.b. Perlindungan terhadap Pihak Pemegang Kartu dan Merchant.

### 3.b.1. Perlindungan Terhadap Pemegang Kartu Kredit.

Pada dasarnya perlindungan yang diberikan Bank terhadap pemegang kartu hanya sebatas apa yang ada dalam perjanjian yang telah mereka sepakati bersama.

Misalnya : Pihak Bank akan melindungi pemegang kartu apabila kartunya hilang dengan memasukkan nomor kartu kredit ke dalam daftar Black List sehingga memperkecil kemungkinan kartu yang hilang digunakan orang lain.

### 3.b.2. Perlindungan Terhadap *Merchant*.

Perlindungan terhadap merchant juga tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama antara pihak Bank dengan *Merchant*, mengingat belum ada peraturan khusus mengenai kartu kredit ini.

### 3.c. Ancaman Pidana Bagi Pemalsu Kartu Kredit. ( Aspek Hukum Pidana)

3.c.1. Adapun ancaman pidana yang dapat diterapkan terhadap para pemalsu kartu kredit antara lain sebagai berikut :

- (a) Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Vide (Pasal 263 juncto Pasal 264 KUHP.
- (b) Tindak Pidana Penipuan, vide Pasal 378 KUHP.
- (c) Tindak Pidana Korupsi, jika tersangkut dengan pihak pemerintah, bank pemerintah atau perusahaan pemerintah.
- (d) Tindak Pidana di bidang Paten, Vide Undang-Undang Paten No.6 Tahun 1989, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang No.13 Tahun 1997, Pasal 126 sampai dengan Pasal 129.
- (e) Jika ada merek yang dipaslukan, maka akan termasuk juga tindak pidana di bidang merek, vide Pasal 256 butir 1 e dan Pasal 257 KUHP, dan Pasal 81 sampai dengan Pasal 84 dan Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang No.14 Tahun 1997.<sup>90)</sup>

3.c.2. Ukuran-ukuran tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap pemalsuan kartu kredit :

---

<sup>90)</sup> Munir Fuady, Op.Cit. hal.194

- (a) Tanggung jawab dibebankan kepada siapa saja yang bersalah melakukan pemalsuan.
- (b) Tanggung jawab perdata dapat dibebankan kepada atasan dari pelaku jika pelaku melakukan pemalsuan tersebut dalam menjalankan tugasnya. Misalnya atasan perusahaan pengiriman jika pemalsuan dilakukan oleh seorang pengantar surat.
- (c) Pemegang kartu ikut bertanggung jawab jika dia bersalah, baik karena kesengajaan atau kurang hati-hati. Misalnya dia meminjamkan kartunya kepada orang yang melakukan pemalsuan.
- (d) Jika tidak ada satu pihak pun yang dapat dimintakan tanggung jawabnya, sementara pelaku dengan alasan apapun katakanlah misalnya tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya, misalnya dia tidak dikenal atau tidak tertangkap. Maka yang bertanggung jawab adalah mereka yang harus menanggung resiko secara hukum dalam hal perjanjian jual beli (diantara ketiga pihak) dan

perjanjian pinjam uang (antara pihak penerbit dengan pihak pemegang).<sup>91)</sup>

3.d. Undang - Undang Perlindungan Konsumen (UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) (Aspek Hukum Perlindungan Konsumen).

Pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah RI telah mengeluarkan dan mengumandangkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki terhadap pelaku usaha, seperti dapat kita baca dari konsiderans UU ini, dimana dikatakan bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.<sup>92)</sup>

---

<sup>91)</sup> Ibid, hal.194

<sup>92)</sup> Gunawan Widjaya Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal.2

Perumusan nasabah terdapat dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 butir 16, yaitu pihak yang menggunakan jasa bank.

Khusus untuk produk perbankan yang dikemas dalam bentuk kredit konsumtif, misalnya kartu kredit, biasanya perilaku ini muncul manakala seorang konsumen (nasabah, yaitu pihak yang menggunakan jasa Bank - Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 butir 16 "kebingungan" mengalokasikan uang atau penghasilan kellebihannya.

Bank melalui promosi produk kartu kredit dapat memacu konsumen pemegang kartu kredit untuk berperilaku konsumtif, misalnya melalui penerapan sistem point yang dikombinasikan dengan pemberian hadiah Atas sejumlah pembelanjaan produk barang ataupun jasa.<sup>95)</sup>

Dari sudut perlindungan konsumen penggunaan teknologi perbankan tidak cukup hanya menawarkan berbagai kemudahan kepada konsumen dalam bentuk, misalnya kemudahan pembayaran lebih dari 12 juta tempat di seluruh duinia, penarikan

---

<sup>95)</sup>Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-instrumen Hubungannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.34



tunai 24 jam di seluruh dunia, menciptakan citra eksklusif bagi pemegang/pemiliknya, dan sebagainya. Pemanfaatannya harus diikuti pula dari segi keamanannya bagi konsumen. Praktek perbankan mengindikasikan bahwa yang paling banyak dirugikan adalah konsumen. Bank tidak mau tahu dengan transaksi dan penarikan tunai yang tidak dilakukan konsumen, tetapi tercatat dalam rincian tagihan konsumen yang bersangkutan.

Penyampaian informasi produk perbankan seyogyanya disampaikan secara proposional. Artinya, bank tidak hanya menginformasikan keunggulan atau kekhasan produknya saja, melainkan juga sistem keamanan penggunaan produk yang ditawarkan, sistem perhitungan bunga baik untuk konsumen deposito maupun konsumen debitur.

Untuk konsumen debitur, biasanya produk yang ditawarkan berupa kredit konsumtif, misalnya kartu kresdit dengan berbagai fasilitas, diskon ataupun hadiah yang dikemas dengan sistem point seperti telah disebut diatas. Pada kredit konsumtif jenis ini, bank seharusnya menginformasikan sejumlah informasi penting, seperti sistem perhitungan bunganya, besarnya penalti dan alasan pengenaannya, serta iuran tahunan yang harus dibayar konsumen.

Bukan tidak mungkin kredit macet perbankan bersumber dari sejumlah besar kredit konsumtif. Penyebabnya diduga berasal dari iming-iming produsen perbankan yang tidak diikuti dengan penyampaian informasi penting tersebut sehingga secara tidak langsung menciptakan perilaku konsumtif pada masyarakat konsumen.

Dalam hal konsumen dikenakan tagihan atas kredit konsumtif (misalnya kartu kredit). Yang bukan tanggung jawabnya, fenomena yang mengemuka adalah pelanggaran hak konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya. Bagaimana mungkin seorang konsumen dikenakan sejumlah tagihan, pada hal aplikasi permohonan kartu kreditnya sama sekali belum disetujui pihak bank. Sehingga fenomena yang timbul, kecanggihan teknologi perbankan ternyata belum memberikan jaminan keamanan bagi konsumen.

Dan pada akhirnya, semua bergantung pada sikap jujur dan profesional orang dibalik teknologi tersebut. Dalam hubungan ini, peran bank Indonesia sebagai institusi pengawas perbankan, termasuk pengawasan pelayanan bank terhadap konsumennya sangat diperlukan. Untuk itu bank Indonesia perlu

menginformasikan kepada masyarakat konsumen mengenai kelembagaan bank dan sistem pengawasan atas pelayanan yang diberikan kepada para konsumennya.<sup>95)</sup>

3.e. Ketentuan-ketentuan Yang Diperlukan Dalam Rangka Melindungi Konsumen *Credit Card* (Kartu Kredit) :

- (1) Pengaturan hak dan kewajiban antara pihak pemegang penerbit dan penjual yang seimbang.
- (2) Penegasan hak dari masing-masing pihak untuk dapat menggugat pihak lainnya.
- (3). Kesempatan yang sama di antara pemegang/calon pemegang kartu kredit untuk mendapatkan kartu kredit atau mendapatkan perlakuan yang sama, dalam arti bahwa penerbit tidak dapat melakukan perbedaan perlakuan kepada pemegang/calon pemegang dengan alasan/kriteria yang tidak *reasonable*.
- (3) Kewajiban dari penerbit untuk melakukan *disclosure* terhadap pemegang antara lain tentang hal-hal sebagai berikut :
  - (a) Besarnya bunga kredit dan cara menghitungnya;

---

<sup>95)</sup> Ibid, hal.35

- (b) Seluruh fee yang dipungut, seperti *annual fee, card issuance fee, transaction fee* atau fee-fee lainnya;
  - (c) Denda keterlambatan atau biaya untuk cash payment;
  - (d) *Grace period* antara penagihan dan keharusan pembayaran.
- (4) Melarang penerbit untuk mencegah penjual dalam hal melakukan *discount* jika dilakukan pembayaran harga barang secara *cash*.
- (5) Mensyaratkan penjual untuk mengembalikan harga pembelian yang dibeli dengan kartu kredit jika ada pengembalian barang karena salahnya penjual.
- (6) Melarang penjual untuk memungut kelebihan biaya jika dibeli dengan kartu kredit.
- (7) Dalam hal ada protes dari pihak pemegang terhadap tagihan , mewajibkan penerbit untuk melakukan investigasi secepatnya, dan melakukan koreksi secepatnya jika ada kesalahan dalam perhitungan pembayaran.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Dari uraian hasil dan pembahasan yang diperoleh penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut :

##### 1. Operasionalisasi Pengaturan Perusahaan Penerbit *Credit Card* / Bank Sebagai Alat Pembayaran.

Perusahaan Penerbit / Bank di Indonesia dalam melakukan kegiatan pembiayaan khususnya *Credit Card* sebagai alat pembayaran, ditemukan beberapa aspek hukum yang berlaku.

Perusahaan Penerbit / Bank, dilihat dari pengertiannya, jenisnya, bentuknya, dan usahanya, maka ada beberapa aspek hukum yang berlaku, yaitu "Aspek Hukum Perdata" (diluar Kitab Undang-undang Hukum Perdata), "Aspek Hukum Publik" dan "Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan".

Sedangkan dalam hal kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan Penerbit / Bank dalam mengoperasionalkan penerbitan *Credit Card* sebagai alat pembayaran, berlaku " Aspek Hukum Administrasi Negara", dan "Aspek Hukum Perdata".

Mengenai bentuk perjanjian penerbitan *Credit Card* sebagai alat pembayaran, berlaku "Aspek Hukum Perdata" (Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

## 2. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Proses Penyelenggaraan *Credit Card* Sebagai Alat Pembayaran.

Hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam perjanjian *Credit Card* (kartu kredit) sebagai alat pembayaran di Indonesia, berdasarkan penelitian penulis, belum ada peraturan yang secara khusus mengaturnya, baik itu didalam peraturan lembaga pembiayaan (khususnya kartu kredit), maupun didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ataupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang khusus mengaturnya, karena perjanjian kartu kredit termasuk perjanjian baru (perjanjian tidak bernama).

Didalam praktek penyelenggaraan hubungan hukum para pihak yang terlibat didalam perjanjian kartu kredit ini, bisa memakai dasar atau tunduk kepada ketentuan umum hukum perjanjian. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian baik yang bernama maupun yang tidak bernama, tunduk pada ketentuan umum tentang hukum

perjanjian (Bab kesatu dan kedua buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Kesimpulanya yang berlaku adalah "Aspek Hukum Perdata" (Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

### 3. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Proses Pelaksanaan Perjanjian *Credit Card*.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian *Credit Card* sebagai alat pembayaran di Indonesia adalah :

Perlindungan hukum para pihak sama halnya dengan masalah hubungan hukum para pihak, dalam hal ini juga belum ada peraturan yang secara khusus mengaturnya., sehingga untuk mengantisipasi hal ini berlaku peraturan yang secara khusus dibuat baik oleh pihak penerbit maupun peraturan yang dibuat atas dasar kesepakatan bersama.

Selain hal tersebut diatas, perlindungan hukum para pihak juga bisa diberlakukan "Aspek Hukum Publik" yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Perlindungan Konsumen

(Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

## B. SARAN

1. Transaksi *Credit Card* sebagai alat pembayaran saat ini sudah mulai membudaya di Indonesia. Untuk itu sudah saatnya pemerintah mengeluarkan produk Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai *Credit Card* yang meliputi baik perusahaanya / Bank sebagai perusahaan pembiayaan, pengaturan mengenai hubungan hukum para pihak, dan yang tidak kalah pentingnya adalah masalah mengenai aspek hukum perlindungan konsumennya.
2. Kegiatan transaksi kartu kredit, mulai dari penerbitan sampai dengan pemanfaatanya sebagai alat pembayaran diawali dengan perjanjian para pihak mengingat perjanjian yang diadakan oleh Bank sebagai penerbit kartu kredit termasuk perjanjian baku atau standart, maka sudah saatnya setiap departemen teknis secara aktif meneliti setiap syarat perjanjian baku yang ditawarkan pada masyarakat, agar masyarakat yang awam akan perjanjian memperoleh perlindungan dan kepastian hukum secara lebih awal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhay, Marhaenis M, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Buku pertama penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.
- Arief Sidharta Bernard, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2000.
- Arif , Fakrulloh ,Zudan dan Wuryan Hadi , *Hukum Ekonomi*. Surabaya, Karya Abditama, 1997.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1996.
- Barnes, MC et al, *Organisasi Perusahaan Teori dan Praktek* diterjemahkan oleh Bambang Kussriyanto (LPPM dan PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1984).
- Burton, Richarde, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta , Rineka Cipta, 1996.
- Djarwanto PS, *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknik Penulisan Skripsi*, Yogyakarta : Liberty, 1984).
- Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti, 1993.
- Faisal Sanafiah, *Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar dan Aplikasi Y.A.S.*, Malang, 1990.

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari sudut pandang Hukum Bisnis*, Bandung, PT.

Citra Aditya Bakti, 1999

\_\_\_\_\_, *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Bandung, PT.

Citra Aditya Bakti, 1999.

Gilarso, Drs, *Ekonomi Indonesia Sebuah Pengantar, Jilid I* (Yogyakarta : Kanisius, 1986).

Hadi, Sutrisno, *Statistik 2*, Yogyakarta, Andi Offset, 1998.

Hartono, Sri Rejeki, *Bentuk-bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Fak. Hukum Univ. 17 Agustus 1945, Semarang, 1980.

\_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2000.

\_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2000.

HB Soetopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta, UNS Press, 1988.

HMN Purwosutjitro, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia*, Jilid ke II, Jakarta, Djambatan, 1991.

Hondius, *Hukum Kontrak Indonesia*, Ellips, Jakarta, 1998.

J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1995.

Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung, Alumni, 1983.

Kaslan, Tohir, Ir. *Pengantar Ekonomi Tentang Uang Kredit Bank-Jilid 2*, Jakarta, Cunung Agung, Jakarta, 1970.

- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Lipsey, Richard dan Steiner, Peter, *Pengantar Ilmu Ekonomi III Edisi ke 6*, diterjemahkan oleh Anas Sidik, Jakarta, Bina Karya, 1986.
- Lipis, Allen dan Marchal, Thomas dan Linker, Jan, *Perbankan Elektronik*, diterjemahkan oleh A Hasyni Ali, Drs., Jakarta, Rineka Cipta, 1992.
- Lubis, Nawazirul, Drs. *Uang dan Perbankan*, Jakarta, Karunia Universitas Terbuka, 1986.
- Mallo Manaise et al, *Buku Materi Pokok Metode Penelitian Sosial*, Modul 1-5, Jakarta, Karunia Universitas Terbuka, 1985.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- \_\_\_\_\_, Murniati, Rilda, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, PT., Citra Aditya Bakti, 2000.
- Nawawi, Hadari, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada.
- Pengaribuan, Simanjuntak, Emmy, *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*, Cetakan ke tujuh, Yogyakarta, Seksi Hukum agang Fakultas Hukum niversitas Gajah Mada, 1982.

- \_\_\_\_\_, *Kartu Kredit (Credit Card)*, Penataran Dosen Hukum Perdata/Dagang, Yogyakarta, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Kartu Kredit (Credit Card)*, Penataran Dosen Hukum Perdata/Dagang, Yogyakarta, 16-18 Nopember /30 Nop-12 Desember 1992.
- Peery, FE. *Sistem Perbankan Modern*, diterjemahkan oleh TK Soekiadi, Yogyakarta, PT. Hanindita Graha Widya, 1987.
- Prayoga Suryohadibroto, Imam, *Surat Berharga Alat pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1995.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur, 1981.
- Poerwodarminto, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Modul 1-5, Jakarta, Ghalis Indonesia, 1980.
- Rahman, Hasanudin, *Pendekatan Tehnis dan Filosofis Legal Audit Operasional Perbankan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995.
- Reksoprayitno, Soediyono, *Prinsip-prinsip Dasar Management Bank Umum Penetapannya di Indonesia*, Edisi Pertama, Yogyakarta, BPFE, 1992.
- Rido R, Ali, *Hukum Dagang*, Remaja Karya, CV. Bandung, 1988.
- R. Monnele, Duane, J. Sullivan Thomas, R. Dejoing Cornel dalam Sjahdeini, Sutan Renny, *Kebebasan Berkontran Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993.

- Ruslan, Ahmad & Sustiani Nyoman, *Kegiatan Usaha Bank I*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Safe Deposit Box, Garansi bank dan Credit Card*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Ruslan, Ahmad CS, *Kegiatan Usaha Bank*, Transfer Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta, 1987.
- Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen Hukumnya*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000.
- Simorangkir O.P., *Seluk Beluk Bank Komersial*, Jakarta, Aksara Press, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Etik dan Moral Perbankan*, Jakarta, IND-HILL Co, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*, Jakarta, Aksara Persada, 1989.
- Sinugar, Muchdarsyah, Drs., *Uang dan Bank*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Uang dan Bank*, cetakan ketiga, Jakarta, Rineka Cipta, 1991.
- Syahdeni, Renny, Sutan, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Persusahaan Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Reformasi Peraturan Perundang-Undangan Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1997.

- Sockanto, Soerjono, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1996.
- Sockanto, Soerjono & Mamudji, Sri, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, CV. Rajawali, 1985.
- Soemitro, Ronny, Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.
- Sonhadji, Ahmad, dkk, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, Bandung, Kalimasada Press, 1996.
- Subagyo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta, STIE, YKPN, 1997.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Internusa, 1994.
- Subekti dan Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1992.
- Suyatno, Thomas, *Lalu Lintas Pembayaran Dalam dan Luar Negeri*, Jilid I, Jakarta, Intermedia, 1988.
- Sunyoto, *Hukum Perbankan di Indonesia*, UNS Press, 1995.
- Sutantio, Retnowulan. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung, 1995.
- Sutjipto, Bahan Penataran dan Lokakarya : *Menyimak Ulang Penelitian Hukum*; Disampaikan dalam rangka Penataran dan Lokakarya Metodologi penelitian Hukum di Kampus Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 1994.

S.P. Iswardono, *Ulang dan Bank*, Yogyakarta, EPFE, 1996.

Tjiptoadinugroho P, *Perbankan Masalah Organisasi dan Ketatalaksanaan*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1976.

Usman, Rachmawati, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dari Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/82/KEP/DIR, tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Infobank Nomor 102 Tahun 1988.

Infobank Nomor 102 Tahun 1989.

Infobank Nomor 135 Tahun 1991.

Infobank Nomor 192 Tahun 1995.

Kontan Nomor 12 Edisi III Tahun 1988.

Newsleter Nomor 20 Tahun VI/Maret 1995.

Warta Perundang-undangan Nomor 1383 tahun XVII 28 Nopember 1994.

Warta Perundang-undangan Nomor 1425 tahun XVIII 24 April 1995.

Agus Sudrajat, Simposium Nasional Perbankan Kegiatan Usaha Bank  
(Kerjasama Fak. Hukum UNS - Bank Indonesia, Surakarta, 1993

Makalah Seminar, Sistem Pembayaran Kartu Plastik Perkembangan dan  
Peluang Bisnis Pada Sistem Alat Pembayaran dengan Kartu Plastik,  
Jakarta, 26-27 Juli 1990.

Sri Redjeki Hartono, 1994/1995, Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit,  
Jakarta, BPHN, Departemen Kehakiman.

Iskandar Zulkarnaen, Ceramah dan Dialog: Perbankan di Indonesia, Praktikum  
Jurusan Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2 Desember 1992.

Bank Bali, *Aplication Form.*

\_\_\_\_\_, *Buku Pedoman Merchant.*

\_\_\_\_\_, *Kebijakan Kredit.*

Bank Internasional Indonesia, *Buku Petunjuk BII Visa/Mastercard.*

Bank Lippo, *Training & Branch Support Card Centre Bank Lippo, 1997.*

\_\_\_\_\_, *Credit Card Re-Launch.*